

Catatan Kritis Koalisi LSM Terhadap Legalitas & Kelestarian Hutan Indonesia : Studi Independen Terhadap Sertifikasi SVLK



**KOALISI
ANTI
MAFIA
HUTAN**



GAPETA Borneo

silvagama



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**
the global coalition against corruption

IWGFF

WALHI

Nikalahari
Bergerak Untuk Pelestarian Hutan Kita



Catatan Kritis Koalisi LSM Terhadap Legalitas dan Kelestarian Hutan Indonesia: Studi Independen Terhadap Sertifikasi SVLK

18 Maret 2014

Disusun oleh Koalisi Anti Mafia Hutan

Eyes on the Forest - <http://www.eyesontheforest.or.id>

Indonesia Corruption Watch - <http://www.antikorupsi.org/>

Indonesian Working Group on Forest Finance - <http://www.forestfinance.org/>

Jikalahari - <http://jikalahari.or.id/>

RPHK - <http://pantauhutan.org/>

Silvagama - <http://www.silvagama.org/>

Transparency International Indonesia - <http://www.ti.or.id/>

WALHI - <http://www.walhi.or.id/>

WWF-Indonesia – <http://www.wwf.or.id>

Daftar Isi

1. Sistem Sertifikasi Wajib Indonesia untuk Memastikan Legalitas dan Kelestarian Produk Kayu	1
2. Status Sertifikasi SVLK di Indonesia Tahun 2013.....	3
2.1. Koneksi hutan tanaman industri (IUPHHK-HT) berdasarkan provinsi dan grup	5
2.2. Koneksi IUPHHK-HA berdasarkan provinsi	7
3. Kelemahan Sistemik Standar dan Panduan SVLK.....	9
3.1. Rancangan, sistem skoring dan penilaian akhir Audit	9
3.2. Pertimbangan undang-undang dan peraturan non-kehutanan yang relevan.....	11
3.3. Praktik-praktik korup dalam proses perizinan	12
3.4. Lacak balak dan persyaratan asosiasi kelompok	12
3.5. Masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia/konflik lahan	12
3.6. Kurangnya transparansi dalam proses audit.....	13
4. Kelemahan Mendasar Sertifikat yang Diterbitkan di Sumatera dan Kalimantan.....	14
4.1. Masalah-masalah yang ditemukan pada koneksi IUPHHK-HT yang bersertifikat SVLK.....	14
4.1.1. RIAU	14
4.1.2. JAMBI & SUMATERA SELATAN.....	20
4.1.3. KALIMANTAN.....	23
4.2. Persoalan-persoalan yang ditemukan pada koneksi IUPHHK-HA yang memiliki sertifikat SVLK	26
4.2.1. SUMATERA	26
4.2.2. KALIMANTAN.....	26
5. Beberapa Studi Kasus dengan Persoalan terkait Perusahaan Bersertifikat SVLK di Sumatera dan Kalimantan	30
5.1. Sertifikat SVLK diterbitkan pada pemegang izin melalui korupsi.....	30
5.2. Sertifikat SVLK yang diterbitkan untuk koneksi IUPHHK yang bermasalah tumpang tindih izin, perambahan, konflik tenurial untuk penggunaan lahan non kehutanan seperti kelapa sawit dan pertambangan.....	33
5.2.1. PT. Austral Byna	33
5.2.2. PT. Surya Hutani Jaya (SHJ)	35
5.3. Perbedaan keputusan sertifikat oleh auditor SVLK.....	37
5.3.1. PT. Puji Sempurna Raharja (PSR)	37
5.4. Sertifikat SVLK yang diterbitkan untuk koneksi HTI dengan persoalan hak asasi manusia/konflik lahan	38
5.4.1. PT. Suntara Gajapati (SGP).....	38
5.4.2. PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) – Blok Pulau Rupat (blok IV).....	38

5.4.3. PT. Wira Karya Sakti (WKS)	39
6. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.

Daftar Tabel

Tabel 1. — <i>Status Pelaksanaan SVLK hingga 31 Agustus 2013.</i>	5
Tabel 2. — <i>Kawasan konsesi IUPHHK-HT yang memiliki sertifikat SVLK di Indonesia hingga 31 Agustus 2013.</i>	6
Tabel 3. — <i>Kawasan konsesi HTI bersertifikat SVLK di Indonesia berdasarkan provinsi dan grup perusahaan.</i>	6
Tabel 4. — <i>Perusahaan HTI bersertifikat SVLK di Indonesia berdasarkan provinsi dan grup perusahaan.</i>	6
Tabel 5. — <i>Kawasan konsesi HPH yang memiliki sertifikat SVLK hingga 31 Agustus 2013.</i>	7
Tabel 6. — <i>Perubahan standar dan panduan SVLK untuk audit PHPL berdasarkan empat Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan yang dikeluarkan sejak tahun 2009.</i>	9
Table 7. — <i>Konsesi HTI di Riau dan beragam persoalan persoalan.</i>	16
Tabel 8. — <i>Konsesi HTI di Jambi dan Sumatera Selatan serta berbagai persoalannya</i>	20
Tabel 9. — <i>Ringkasan persoalan yang ditemukan di konsesi HTI yang memiliki sertifikat SVLK di 4 provinsi Kalimantan.</i>	24
Tabel 10. — <i>Ringkasan persoalan yang ditemukan di konsesi HPH yang memiliki sertifikat SVLK di Kalimantan.</i>	27
Tabel 11. — <i>Daftar pemegang sertifikat SVLK di Riau yang izin IUPHHK-HT dan/atau RKT-nya diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang didakwa melakukan korupsi (lihat daftar diatas). Kerugian Negara dikompilasi oleh Eyes on the Forest berdasarkan berbagai sumber termasuk keputusan pengadilan, “Anti Corruption Clearing House” KPK (http://acch.kpk.go.id), blog “Monitoring Pengadilan Korupsi di Riau” yang dikelola oleh LSM riau dan mahasiswa (http://riaucorruptiontrial.wordpress.com/).</i>	31
Tabel 12. — <i>Daftar 14 perusahaan kehutanan yang diperiksa oleh pihak berwenang sejak tahun 2007 dan menghadapi perhatian baru dari KPK sejak Februari 2013. Terdapat 10 perusahaan dalam daftar yang telah menerima sertifikat SVLK hingga 31 Agustus 2013.</i>	32

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Data yang dikumpulkan dan dianalisis	40
Lampiran 2. Persoalan legalitas kunci terkait kehutanan yang lestari pada pemegang IUPHHK-HA/HT beroperasi selama lebih dari 5 tahun, undang-undang dan peraturan Indonesia yang relevan dan indikator PHPL atau LK SVLK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan terdapat di Tabel 6.	45
Lampiran 3. Perusahaan IUPHHK-HT yang memiliki sertifikat wajib SVLK di Indonesia.	48
Lampiran 4. Perusahaan IUPHHK-HA yang memiliki sertifikat wajib SVLK di Indonesia.	56

Foto Halaman Depan: PT. Mitra hutani Jaya, pemegang sertifikat SVLK, pemasok dari Asia Pulp & Paper, lahan gambut kering, hutan gundul, ditanami Acacia dan membersihkan lahan hutan gambut yang merupakan habitat dari Harimau Sumatra yang terancam punah di daerah Kampar Peninsula di Provinsi Riau. Pengeringan lahan gambut yang terus terjadi menyebabkan emisi gas rumah kaca. Diluar dari keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Indonesia terkait dengan penyuapan dalam mendapatkan izin pengelolaan, perusahaan ini tetap beroperasi. Foto diambil oleh WWF-Indonesia pada 21 November 2013 pada N0°21'56.09"; E102°54'7.28".

Ringkasan

Indonesia adalah salah satu pengeksport produk kayu terbesar di dunia. Indonesia juga termasuk Negara kunci dengan isu pembalakan liar dan penggundulan hutan yang serius. Peningkatan tata kelola hutan dan penegakan hukum serta penghentian penggundulan hutan dan perusakan hutan menjadi sangat penting untuk menjamin legalitas dan keberlangsungan industri ini.

Indonesia dan Uni Eropa telah menandatangani *Forest Law Enforcement Governance and Trade* (FLEGT) Kesepakatan Kemitraan Sukarela (Voluntary Partnership Agreement – VPA) untuk memastikan produk kayu Indonesia yang diproduksi, dipanen dan dikirimkan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Indonesia membentuk Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk : (1) menetapkan aturan dan perundang-undangan Negara yang diberlakukan pada sektor kehutanan, dan (2) membangun sistem untuk memverifikasi legalitas kayu ekspor Indonesia untuk Uni Eropa telah sesuai dengan peraturan ini. Begitu SVLK terbukti menyediakan jaminan yang kredibel untuk legalitasnya, produk bersertifikat “V-Legal” dapat memperoleh izin FLEGT dan secara otomatis bisa masuk di pasar Uni Eropa.

Tujuan utama dari studi ini untuk menyediakan pedoman bagi pemerintah Indonesia dan Uni Eropa yang akan membuat sertifikat SVLK berkekuatan dan sekredibel mungkin dan untuk memastikan tidak ada produk yang menggunakan kayu ilegal di ekspor dari Indonesia berdasarkan sertifikat ini. Mulai Agustus 2013, penulis laporan ini telah mendampingi penyusunan standarisasi untuk SVLK sejak awal dan mengevaluasi semua sertifikat yang dikeluarkan sampai akhir bulan dengan satu pertanyaan mendasar: Apakah sertifikat LK Indonesia menyediakan jaminan bagi Uni Eropa untuk legalitas produk? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis kembali mempelajari 183 perusahaan perkayuan yang telah mendapatkan sertifikat SVLK di seluruh Indonesia dan menggunakan analisa GIS untuk mengevaluasi operasional dan dampaknya di provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

Studi ini menemukan beberapa kelemahan sebagai berikut:

- Sejak awal diberlakukan, standard SVLK berulang kali mengalami pelemahan.
- Penerapan sertifikasi SVLK tidak sesuai dengan berbagai peraturan pemerintah
- Penerapan sertifikasi SVLK tidak berkelanjutan.
- Penerapan sertifikasi SVLK memungkinkan adanya sumber kayu ilegal dan atau kayu yang tidak berasal dari hutan lestari yang berasal dari perusahaan lain.
- Perusahaan bersertifikat SVLK memiliki masalah serius soal legalitas dan kelestarian hutan dalam operasional mereka.
- Pengawasan independen terhadap proses sertifikasi SVLK tidak berjalan efektif.

Kesimpulan, sertifikasi SVLK/ sertifikat V-Legal tidak menjamin pengecualian produk kayu yang berasal dari: perizinan yang diperoleh melalui praktek korupsi, pembersihan area hutan alami milik penduduk asli, habitat satwa yang dilindungi, penurunan kadar air lahan gambut yang menyebabkan lepasnya mega ton emisi gas rumah kaca ke udara, dan atau daerah konsesi yang baru-baru ini terbakar. Sebagai tambahan, produk olahan bersertifikasi seperti bubuk kertas atau kertas bisa saja berasal dari sumber ilegal dan atau operasional yang tidak lestari.

Pada 19 Februari 2014, setelah studi internal terhadap sertifikasi SVLK dan masukan dari beberapa lembaga masyarakat sipil termasuk penulis dalam laporan ini, Parlemen Eropa mengadopsi “gerakan/mosi”¹ dengan beberapa rekomendasi untuk pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa yang bertujuan agar Kemitraan

¹ Parlemen Eropa (19 Februari 2014) mengeluarkan mosi mengenai penyelesaian untuk perdebatan mengenai pernyataan dari Komisi Peraturan 110(2) dari Prosedur Peraturan pada bagian kesimpulan dari Kerjasama Sukarela antara Uni Eropa dan Republik Indonesia dalam tata kelola hutan dan penegakan hukum kehutanan, perdagangan kayu yang masuk ke Uni Eropa (2013/2990(RSP)) Yannick Jadot, Vital Moreira atas nama Komite Perdagangan Internasional
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT%2BMOTION%2BB7-2014-0187%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0//EN&language=EN>

berjalan dengan baik. Penulis menerima mosi ini sebagai sebuah refleksi kepedulian terhadap laporan yang memberikan bukti-bukti nyata yang lebih rinci. Bagaimana pun, penulis percaya pemerintah harus menangani beberapa isu tambahan yang tidak disebutkan dalam mosi tersebut, yang paling penting untuk dicatat adalah beberapa kelemahan dasar dari standard SVLK itu sendiri :

- Tidak mempertimbangkan pentingnya keterkaitan dengan peraturan diluar undang-undang kehutanan.
- Sistem skoring tampaknya dirancang untuk memberikan sertifikat bagi perusahaan yang bahkan sangat buruk performanya
- Tidak mempertimbangkan praktek korupsi dalam pengajuan izin.

Studi ini merekomendasikan agar SVLK menjadi sistem yang lebih kuat sejalan Indonesia dan pemerintahan Uni Eropa yang bekerja ke arah yang sama, sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan yang saling berkaitan antara pengembangan sistem dan implementasinya:

1. Secara umum standar dan pedoman pelaksanaannya mengalami peningkatan termasuk dalam definisi “legalitas kayu” dan kelestarian, kriteria audit, indikator performa/verifikasi, pelaksana verifikasi dan skema penggolongan.
2. Semua sertifikat yang sudah dikeluarkan perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan standard yang telah diperbaharui dan harus mengajukan ulang sertifikat.
3. Auditor dan badan verifikasi dibentuk dengan standard tertinggi melalui audit independen dan verifikasi pihak ketiga yang independen.
4. Standar ini mengadopsi sistem lacak balak yang mengharuskan semua produk bersertifikat berasal dari sumber yang operasionalnya juga bersertifikat.
5. Transparansi proses ditingkatkan dan masyarakat sipil sebagai pengawas diberikan akses ke setiap langkah dalam proses.

1. Pengantar

1.1. Latar Belakang – Sistem Sertifikasi yang Diwajibkan di Indonesia adalah Untuk Menjamin Legilitas dan Kelestarian Produk Kayu Indonesia.

Pada 27 Februari 2014, Parlemen Eropa meratifikasi *Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreement (VPA)* dengan pemerintah Indonesia. VPA ini dirancang untuk mendorong peningkatan tata kelola hutan dan penegakan hukum kehutanan dan mendukung pengelolaan hutan lestari² sebagai bagian dari upaya dunia menghentikan kegiatan penggundulan dan kerusakan hutan³. Salah satu elemen dalam VPA adalah memastikan produk kayu Indonesia yang diekspor masuk ke Uni Eropa, yang tercakup dalam VPA proses produksi, pemanenan dan pengiriman telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia⁴⁵.

Ini menandakan awal dari fase terakhir dari proses panjang yang dimulai September 2001 ketika Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri pertama di Asia Timur dan Pasifik yang membahas *Forest Law Enforcement and Governance (FLEG)*. Di tahun 2003, **Uni Eropa mengadopsi Rencana Aksi Tata Kelola Penegakan Hukum dan Perdagangan (FLEGT) yang mengidentifikasi Indonesia sebagai Negara eksportir kunci dengan isu pembalakan liar yang sangat serius**. Rencana aksi Uni Eropa ini memasukkan beberapa langkah, termasuk negosiasi kesepakatan hubungan bi-lateral secara sukarela di antara Negara-negara yang menghadapi masalah pembalakan liar. Selanjutnya ditentukan sebuah peraturan tentang **Skema Perizinan FLEGT** dengan Negara mitra untuk memastikan hanya produk kayu ilegal yang masuk dalam pasar Uni Eropa sesuai kerangka perjanjian⁶. Tahun 2007, Indonesia memulai negosiasi hubungan kemitraan VPA dengan Uni Eropa⁷.

Di bawah VPA, Indonesia perlu : (1) menentukan peraturan dan undang-undang yang berlaku untuk sektor kehutanan, dan (2) membangun sebuah sistem untuk memverifikasi legalitas ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa sesuai aturan yang berlaku. Setelah dialog panjang dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, asosiasi perdagangan dan organisasi masyarakat sipil, definisi legal untuk **Sistem Verifikasi Kayu SVLK** dibuat dalam dua peraturan tahun 2009 (Peraturan Kementerian Kehutanan P.38/Menhut-II/2009⁸ dan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan no. P.6/VI-Set/2009⁹). Aturan ini tidak hanya mengenai legalitas kayu tapi juga tentang tata kelola hutan lestari. Kedua aturan ini dibingkai dengan **prinsip-prinsip** kunci yang meliputi aspek penting dalam produksi produk kehutanan, pengelolaan dan **kriteria, indikator dan pelaku verifikasi**, juga tentang **pedoman pelaksanaan verifikasi** yang menjabarkan metodologi dan norma penilaian yang digunakan.

Indonesia menetapkan sertifikasi SVLK sebagai sebuah kewajiban bagi seluruh perusahaan yang memproduksi, menjual, mengelola dan mengekspor kayu. Sejumlah badan sertifikasi dan verifikasi independen diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk mengaudit operasional perusahaan-perusahaan perikanan. Audit dilakukan berdasarkan standard penilaian legalitas atau tata kelola

² http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/FLEGT_en_final_en.pdf

³ European Parliament (19 February 2014)

⁴ Komisi Eropa (30 September 2013) UE dan Indonesia setuju untuk menghilangkan kayu ilegal http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-887_en.htm
⁵ http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/FLEGT_en_final_en.pdf
⁶ http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/FLEGT_en_final_en.pdf
⁷ European Commission (30 September 2013), Pertanyaan dan Jawaban mengenai perjanjian antara UE dan Indonesia dalam kayu ilegal http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-828_en.htm

⁸ <http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23029/FLEGT+Voluntary+Partnership+Agreement+Between+the+Republic+of+Indonesia+and+the+European+Union++Briefing+Note+May+2011/cfcd6026-55a9-4b7f-a28d-f147d9e6c9d5>

⁹ http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/FLEGT_en_final_en.pdf

⁷ Sebagai contoh <http://www.euflegt.efi.int/portal/>, http://ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging.htm, <http://svlk.info/>, <http://www.mfp.or.id/>

⁸ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
http://pantauhutan.files.wordpress.com/2012/06/p-38_menhut-ii_2009.pdf

⁹ Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.6/VI-Set/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. http://www.fkt.ugm.ac.id/files/u1/Produksi_Lestari_dan_Verifikasi_Legalitas_Kayu.pdf

hutan lestari dan sertifikat yang dikeluarkan untuk **Legalitas Kayu, LK** atau **Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PHPL. Dokumen V-Legal** dikeluarkan untuk eksportir.

Sebagai langkah pelengkap untuk Kesepakatan Kemitraan VPA, Peraturan Perakayan Uni Eropa (**EU Timber Regulation-EUTR**) diberlakukan Maret 2013, melarang penjualan produk kayu yang dipanen secara ilegal di wilayah Uni Eropa. EUTR menerima produk yang mendapatkan **izin FLEGT** dari Negara-negara yang berada dalam Kemitraan VPA, sebagai produk legal secara otomatis. Perizinan FLEGT untuk produk Indonesia baru bisa dijual hanya ketika sistem SVLK terbukti menyediakan jaminan yang kredibel untuk legalitasnya.

1.2. Tujuan dari Laporan

Tujuan utama dari studi ini untuk menyediakan pedoman bagi pemerintah Indonesia dan Uni Eropa yang akan membuat sertifikat SVLK berkekuatan dan sekredibel mungkin dan untuk memastikan tidak ada produk yang menggunakan kayu ilegal yang di ekspor dari Indonesia dengan sertifikat ini. Mulai Agustus 2013, penulis telah menilai penyusunan standar untuk SVLK sejak awal dan mengevaluasi semua sertifikat yang dikeluarkan sampai akhir bulan dengan satu pertanyaan mendasar: **Apakah sertifikat LK Indonesia memberikan jaminan bagi Uni Eropa untuk legalitas produk?**

Kami juga mencoba menjawab pertanyaan penting lainnya yang berkaitan dengan sertifikasi SVLK: **Apakah Sertifikat LK adalah langkah kedepan dalam menuju hutan yang lestari dan apakah sertifikat PHPL memberikan Uni Eropa sebuah jaminan yang kelestarian?**

Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, penulis melihat pada 183 perusahaan kehutanan yang telah mendapatkan sertifikat SVLK diseluruh Indonesia serta melakukan analisa GIS untuk mengevaluasi lebih dalam mengenai operasi dan dampaknya di Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur

Bab 2, kami meninjau status sertifikasi SVLK di dua sektor utama produk hutan Indonesia, hutan tanaman untuk bubuk kertas (IUPHHK-HT) dan penebangan selektif (IUPHHK-HA)

Bab 3, kami meninjau kelemahan sistemik dari standar SVLK dan pedoman pelaksanaannya.

Bab 4, kami melakukan review dokumen dari seluruh sertifikat SVLK yang dikeluarkan untuk pemegang izin IUPHHK-HT dan HA sampai 31 Agustus 2013 untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam penerapan standar SVLK

Bab 5, kami menyediakan studi kasus dari konsensi bersertifikat yang ada di Sumatera dan Kalimantan.

Bab 6, kami menyampaikan kesimpulan dari hasil tinjauan.

2. Status Sertifikasi SVLK di Indonesia Tahun 2013

Sistem SVLK terdiri atas dua skema sertifikasi:

1. Sertifikat **Legalitas Kayu (LK)** untuk “Industri (termasuk pulp, kayu gergajian, kayu lapis dan olahan lain)” dan “Unit Pengelolaan Hutan (konsesi)” yang telah beroperasi setidaknya selama 5 tahun.
2. Sertifikat **Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)** untuk Unit Pengelolaan Hutan yang telah beroperasi selama lebih dari 5 tahun.

Pelaksanaan SVLK wajib telah memasuki tahun ke empat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. P.42/Menhut-II/2013¹, semua pemegang izin (IUPHHK-HT untuk hutan tanaman, IUPHHK-HA untuk HPH/tebang pilih atau IUPHHK-RE untuk restorasi ekosistem) disyaratkan untuk memiliki sertifikat PHPL atau LK paling lambat 31 Desember 2013. Ini merupakan tenggat waktu baru yang diberikan setelah tenggat waktu awal (31 Maret 2013 untuk sertifikat LK dan 30 Juni 2013 untuk sertifikat PHPL) terlewati².

Kajian ini mengkompilasi sertifikat SVLK pemegang izin IUPHHK-HT/HA/RE yang dikeluarkan hingga 31 Agustus 2013 dan masih valid hingga 15 September 2013 (Lampiran 3 & 4). Hingga empat bulan sebelum tenggat waktu berakhir, sekitar dua pertiga pemegang izin IUPHHK belum mendapatkan sertifikat (Tabel 1).

Tabel 1.—Status Pelaksanaan SVLK hingga 31 Agustus 2013.

Jumlah dan total luasan IUPHHK berdasarkan tipe izin ³			Konsesi IUPHHK yang mendapatkan sertifikat PHPL atau LK pada tanggal 31 Agustus 2013			
Tipe izin	# perusahaan*	luasan (ha)	# perusahaan	% total	luasan (ha)	% total
IUPHHK-HT	234	10.952.317	76	32%	5.404.532	51%
IUPHHK-HA	296	22.921.203	107	36%	10.901.955	47%
IUPHHK-RE	5	219.350	0	-	0	-

* Berdasarkan data Kementerian Kehutanan

2.1. Konsesi hutan tanaman industri (IUPHHK-HT) berdasarkan provinsi dan grup

Kajian ini menganalisis lebih dari 10 juta ha kawasan konsesi dengan izin IUPHHK definitif yang dikeluarkan hingga 31 Agustus 2013 dan berlaku setidaknya hingga 15 September 2013 (Tabel 2, lihat Lampiran 3 untuk daftar lengkap termasuk sumber data) dan menemukan bahwa:

- Sekitar 3,3 juta ha (31%) menerima sertifikat PHPL (S-PHPL), 2,2 juta ha (20%) menerima sertifikat LK (S-LK), sisanya (49%) tetap belum bersertifikat.
- Dari 4,9 juta ha konsesi HTI yang ada di Kalimantan dan Sumatra, sekitar 1,9 juta ha (38% dari total luasan) HTI di Kalimantan memiliki sertifikat sementara hanya 3,4 juta ha (68%) HTI di Sumatera yang bersertifikat.
- Dengan luasan 1,5 juta ha (81% dari luasan HTI di provinsi) Riau memiliki luasan terbesar perusahaan yang bersertifikat di Indonesia, diikuti oleh Sumatera Selatan dengan luasan 1,2 juta ha (juga 81%).
- Dari seluruh luasan konsesi yang bersertifikat, 48% diantaranya memiliki kaitan dengan Grup Sinar Mas/Asia Pulp & Paper (SMG/APP), 25% terkait dengan Grup *Royal Golden Eagle/Asia Pacific Resources International* (RGE/APRIL) (Tabel 3).

Sertifikat SVLK ini dipegang oleh 76 perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

- Terdapat 38 perusahaan (50%) yang berlokasi di Riau, 9 (12%) perusahaan di Sumatera Selatan dan 9 (12%) perusahaan di Kalimantan Barat (Tabel 4).
- Terdapat 34 (45%) konsesi pemasok SMG/APP dan 27 (36%) konsesi pemasok RGE/APRIL (Tabel 3).

Tabel 2.—Luasan konsesi IUPHHK-HT yang memiliki sertifikat SVLK di Indonesia hingga 31 Agustus 2013.

Status SVLK	SUMATERA									
	Riau		Jambi		Sumatera Selatan		Sumatera Utara*		Sumatera Barat*	
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Dengan S-PHPL	1.138.728	61%	0	0%	1.074.382	71%	213.375	58%	0	0%
Hanya S-LK	378.476	20%	383.103	54%	151.252	10%	0	0%	28.617	57%
Tanpa S-PHPL/S-LK	342.863	18%	321.927	46%	278.914	19%	157.322	42%	22.032	43%
Total	1.860.067	100%	705.030	100%	1.504.548	100%	370.697	100%	50.649	100%

Status SVLK	SUMATERA									
	Aceh*		Bengkulu*		Lampung*		Bangka Belitung*		SUBTOTAL (1)	
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Dengan S-PHPL	0	0%	0	-	0	0%	0	0%	2.426.485	49%
Hanya S-LK	0	0%	0	-	0	0%	0	0%	941.449	19%
Tanpa S-PHPL/S-LK	226.820	100%	0	-	114.444	100%	112.148	100%	1.576.469	32%
Total	226.820	100%	0	-	114.444	100%	112.148	100%	4.944.403	100%

Status SVLK	KALIMANTAN									
	Kalimantan Barat		Kalimantan Tengah		Kalimantan Timur dan Utara		Kalimantan Selatan*		SUBTOTAL (2)	
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Dengan S-PHPL	148.284	8%	0	0%	629.531	34%	48.720	10%	826.536	17%
Hanya S-LK	544.796	31%	115.606	15%	111.675	6%	268.585	54%	1.040.662	21%
Tanpa S-PHPL/S-LK	1.089.528	61%	651.038	85%	1.098.677	60%	180.255	36%	3.019.498	62%
Total	1.782.609	100%	766.644	100%	1.839.883	100%	497.560	100%	4.886.696	100%

Status SVLK	PULAU LAIN						INDONESIA TOTAL	
	Papua		Lainnya		SUBTOTAL			
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Dengan S-PHPL	0	0%	0	0%	0	0%	3.253.020	31%
Hanya S-LK	169.400	38%	0	0%	169.400	22%	2.151.511	20%
Tanpa S-PHPL/S-LK	270.850	62%	320.968	100%	591.818	78%	5.187.785	49%
Total	440.250	100%	320.968	100%	761.218	100%	10.592.317	100%

* Data total luasan konsesi IUPHHK-HT untuk provinsi-provinsi ini hanya berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan (2012). Provinsi lain memasukkan sumber lain yang ditampilkan pada Lampiran 1.

Tabel 3.—Luasan HTI bersertifikat SVLK di Indonesia berdasarkan provinsi dan grup perusahaan.

Grup	Berdasarkan Provinsi							TOTAL	
	Riau	Jambi	Sumatera Selatan	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Timur dan Utara	Lainnya	(ha)	(% total)
SMG	783,376	312,019	787,950	368,978	0	324,530	0	2,576,852	48%
RGE	733,829	0	0	0	0	355,361	241,992	1,331,182	25%
Lainnya	0	71,084	437,685	324,103	115,606	61,315	486,705	1,496,498	28%
Total	1,517,204	383,103	1,225,634	693,081	115,606	741,206	728,697	5,404,532	100%

Tabel 4.—Perusahaan HTI bersertifikat SVLK di Indonesia berdasarkan provinsi dan grup perusahaan.

Grup	Berdasarkan Provinsi							TOTAL	
	Riau	Jambi	Sumatera Selatan	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Timur dan Utara	Lainnya	#	(% total)
SMG	16	2	8	4	0	4	0	34	45%
RGE	22	0	0	0	0	2	3	27	36%
Lainnya	0	2	1	5	2	2	3	15	20%
Total	38	4	9	9	2	8	6	76	100%

2.2. Konsesi IUPHHK-HA berdasarkan provinsi

Analisis dilakukan pada hampir 23 juta kawasan konsesi perusahaan dengan izin IUPHHK-HA definitif yang diterbitkan hingga 31 Agustus 2013 dan berlaku setidaknya sampai 15 September 2013 (Tabel 5, lihat Lampiran 4 untuk daftar lengkap termasuk sumber data)⁴ dan ditemukan:

- Sekitar 9,3 juta ha (41%) memiliki S-PHPL, 1,6 juta ha (7%) memiliki S-LK, sisanya (52%) tidak memiliki sertifikat.
- Kalimantan memiliki lebih banyak sertifikat SVLK (6,7 juta ha) dibandingkan Sumatera (0,3 juta ha).
- IUPHHK-HA yang telah memiliki sertifikat SVLK luasannya dua kali lipat (10,9 juta ha) dari kawasan IUPHHK-HT yang memiliki sertifikat SVLK (5,4 juta ha).

Sertifikat SVLK tersebut dimiliki oleh 107 perusahaan, dengan empat perusahaan berada di Sumatera (2 perusahaan di Riau, 2 di Sumatera Barat), 82 perusahaan di Kalimantan, 8 perusahaan di Papua, 2 perusahaan di Maluku dan 4 perusahaan di Maluku Utara.

Penyebab utama kenapa hanya sejumlah kecil luasan/jumlah konsesi di Sumatera yang memiliki sertifikat IUPHHK-HA adalah karena perusahaan-perusahaan tersebut sudah tidak aktif atau telah mengalami rezonasi menjadi konsesi IUPHHK-HT untuk mendukung industri pulp dan kertas di Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.

Tabel 5.—Luasan konsesi IUPHHK-HA yang memiliki sertifikat SVLK hingga 31 Agustus 2013.

Status SVLK	SUMATERA									
	Riau*		Jambi*		Sumatera Selatan*		Sumatera Utara*		Sumatera Barat*	
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Dgn S-PHPL	90.956	30%	0	0%	0	0%	0	0%	131.750	70%
Hanya S-LK	44.314	14%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Tanpa S-PHPL/S-LK	172.888	56%	56.045	100%	56.000	100%	343.603	100%	57.725	30%
Total	308.158	100%	56.045	100%	56.000	100%	343.603	100%	189.475	100%

Status SVLK	SUMATERA									
	Aceh*		Bengkulu*		Lampung		Bangka Belitung		SUBTOTAL (1)	
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Dgn S-PHPL	0	0%	0	0%	0	-	0	-	222.706	16%
Hanya S-LK	0	0%	0	0%	0	-	0	-	44.314	3%
Tanpa S-PHPL/S-LK	405.129	131%	56.070	0%	0	-	0	-	1.147.460	81%
Total	405.129	100%	56.070	100%	0	-	0	-	1.414.480	100%

Status SVLK	KALIMANTAN									
	Kalimantan Barat**		Kalteng**		Kaltim & Kaltara**		Kalsel*		SUBTOTAL (2)	
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Dgn S-PHPL	121.399	10%	1.601.025	39%	3.414.284	57%	99.570	41%	5.236.278	45%
Hanya S-LK	170.581	14%	553.215	13%	539.876	9%	87.241	36%	1.350.912	12%
Tanpa S-PHPL/S-LK	951.324	77%	1.980.399	48%	2.039.992	34%	56.430	23%	5.028.145	43%
Total	1.243.304	100%	4.134.638	100%	5.994.152	100%	243.241	100%	11.615.335	100%

Status SVLK	PULAU-PULAU LAIN								INDONESIA TOTAL	
	Papua*		Papua Barat*		Lainnya*		SUBTOTAL (3)		(1)+(2)+(3)	
	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)	(ha)	(%)
Dgn S-PHPL	2.034.505	40%	1.589.155	43%	230.440	20%	3.854.100	39%	9.313.084	41%
Hanya S-LK	99.665	2%	0	0%	93.980	8%	193.645	2%	1.588.871	7%
Tanpa S-PHPL/S-LK	2.924.960	58%	2.084.683	57%	834.000	72%	5.843.643	59%	12.019.248	52%
Total	5.059.130	100%	3.673.838	100%	1.158.420	100%	9.891.388	100%	22.921.203	100%

** Total luasan konsesi IUPHHK-HA untuk provinsi-provinsi ini hanya berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan (2012). Data dari Kementerian Kehutanan tidak memasukkan PT. Minas Pagai Lumber Corp di Sumatera Barat, sehingga perusahaan tersebut dimasukkan dalam total luasan. Data provinsi lain ditambahkan dengan sumber tambahan yang terdapat pada Lampiran 1.*

*** Total luasan konsesi termasuk luasan yang tumpang tindih dengan konsesi-konsesi lain.*

3. Kelemahan Sistemik Standar dan Panduan SVLK

3.1. Rancangan, sistem skoring dan penilaian akhir Audit

Standar dan panduan SVLK awal versi tahun 2009 merupakan rancangan sistem yang relatif kuat dengan panduan audit PHPL dan LK yang mengevaluasi kinerja pemegang izin dan output. Sistem skoring lulus atau gagal pada tiap indikator audit berdasarkan pada Aturan tahun 2009 dan 2010 yang memberikan hasil audit yang lebih objektif dan tegas. Akan tetapi, perubahan pada standar dan panduan sejak tahun 2010 menyebabkan berbagai kelemahan yang dijabarkan pada Tabel 6.

Dengan mempertimbangkan bahwa versi terbaru standar SVLK yang sangat memudahkan para auditor untuk menghindari memberikan skor kinerja perusahaan sebagai “BURUK” untuk setiap verifier dan bahwa sistem penilaian yang baru menjadikan suatu perusahaan dapat lulus meskipun skornya “SEDANG” untuk setiap verifier, sehingga SVLK tidak lagi menjadi tolok ukur yang dapat diterima untuk melihat kinerja yang baik dari perusahaan yang sudah dinilai.

Tabel 6.—Perubahan standar dan panduan SVLK untuk audit PHPL berdasarkan 4 Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan yang dikeluarkan sejak tahun 2009.

Peraturan				Isu yang muncul
	Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-Set/2009 ⁵	Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.02/VI-BPPHH/2010 ⁶	Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2011 ⁷ dengan perubahan pada P.8/VI-BPPHH/2012 ⁸	
Dasar Hukum	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.P38/Menhut-II/2009 ⁹		Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. P68/Menhut-II/2011 ¹⁰ yang direvisi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. P.45/Menhut-II/2012 ¹¹	
Berlaku sejak	1 Sep 2009	1 Feb 2010	30 Des 2011 dan tanggal revisi 17 Des 2012	
Peraturan ditandatangani oleh	Hadi Daryanto		Iman Santoso & Bambang Hendroyono	
Jumlah kriteria	4 kriteria termasuk (1) Pra-syarat, (2) Produksi, (3) Ekologi dan (4) Sosial.			
Jumlah indikator pada tiap kriteria	(1) Pra-syarat: 6 (2) Produksi: 7 (3) Ekologi: 6 (4) Sosial: 5 Total: 24 indikator		(1) Prasyarat: 5 (2) Produksi: 6 (3) Ekologi: 6 (4) Sosial: 5 Total: 22 indikator	<ul style="list-style-type: none"> Aturan tahun 2009 dan 2010 serta tahun 2011 dan 2012 menggunakan indikator yang sama. Tiga indikator pada Aturan tahun 2010 dihapus oleh aturan tahun 2011. Perubahan pada satu diantara indikator yang dihapus tersebut dianggap bermasalah karena terkait dengan aspek legalitas, kunci utama dari standar SVLK
Number of indicators under each criterion				

Peraturan				
	Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-Set/2009 ⁵	Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.02/VI-BPPHH/2010 ⁶	Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2011 ⁷ dengan perubahan pada P.8/VI-BPPHH/2012 ⁸	Isu yang muncul
				<p>("1.4. Kesesuaian dengan kerangka hukum, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari" dengan salah satu verifier yang terkait dengan "Kesesuaian implementasi teknis kelola hutan dengan peraturan perundang-undangan yang diacu").</p> <ul style="list-style-type: none"> Aturan tahun 2011 menambahkan "<i>Free Prior Informed Consent (FPIC)</i>" sebagai indikator yang baru, akan tetapi verifikasi lemah dan mudah untuk lulus.
Panduan untuk skoring untuk tiap indikator dan/atau verifier	Skoring untuk tiap indikator adalah "BAIK" atau "BURUK".	<p>Membedakan indikator menjadi "KUNCI" dan "BUKAN KUNCI".</p> <p>Skoring untuk tiap indikator adalah "BAIK" atau "BURUK".</p>	<p>Tidak lagi membedakan indikator menjadi "KUNCI" dan "BUKAN KUNCI" tetapi mulai menggunakan "verifier" pada tiap indikator dan membedakannya menjadi "DOMINAN" dan "CO-DOMINAN".</p> <p>Indikator yang masuk dalam kategori "DOMINAN" memiliki skor dua kali lipat.</p> <p>Setiap verifier di skor sebagai "BAIK", "SEDANG", atau "BURUK".</p>	<ul style="list-style-type: none"> Aturan tahun 2011 dan 2012 mengklasifikasikan verifier sehingga mudah untuk mendapatkan skor "BAIK" pada kategori "DOMINAN" dan verifier yang lebih penting tetapi sulit dicapai masuk sebagai kategori "CO-DOMINAN" (sebagai contoh, lihat verifier 1.1.3; 1.1.4; 1.5.3; 3.1.4). Aturan dari Kementerian Kehutanan kemudian memberikan nilai verifier lemah yang masuk dalam kategori "DOMINAN" dua kali lipat dibandingkan verifier yang sulit dicapai yang masuk kategori "CO-DOMINAN" Sangat tidak mungkin perusahaan mendapatkan penilaian "BURUK" untuk tiap verifier karena (a) verifier dijabarkan dalam bahasa yang ambigu yang terbuka untuk interpretasi sehingga memudahkan auditor untuk memberikan skor "SEDANG" dibanding memberikan skor "BURUK" dan (b) verifikasi audit tidak lagi berdasarkan "kinerja dan output" tetapi "komitmen tertulis, proses dan dokumentasi".
Panduan untuk penilaian akhir sertifikasi	Suatu perusahaan tidak dapat mendapatkan sertifikat jika mendapatkan nilai "BURUK" meski hanya	Suatu perusahaan tidak bisa mendapatkan sertifikat jika mendapatkan nilai "BURUK" meski hanya pada satu indikator KUNCI	Suatu perusahaan tidak bisa mendapatkan sertifikat jika mendapatkan nilai "BURUK" untuk meski hanya pada satu verifier	<ul style="list-style-type: none"> Pada aturan tahun 2009, indikator yang digunakan sangat jelas dan semua harus memiliki nilai "BAIK" sebagai syarat perusahaan mendapatkan sertifikat. Aturan tahun 2011/2012 membuat perusahaan menjadi sangat mudah untuk mendapatkan sertifikat, walaupun mereka tetap melaksanakan

Peraturan			Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2011 ⁷ dengan perubahan pada P.8/VI-BPPHH/2012 ⁸	Isu yang muncul
Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-Set/2009 ⁵	Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.02/VI-BPPHH/2010 ⁶			
pada satu indikator. Jika sebaliknya, perusahaan bisa mendapatkan penilaian akhir "BAIK".	Jika sebaliknya, perusahaan bisa mendapatkan penilaian akhir "BAIK".	"DOMINAN" dan/atau jika indikator akhir kinerja adalah <59% dari nilai maksimum. Jika sebaliknya, perusahaan bisa mendapatkan sertifikat dengan nilai akhir "BAIK" (76%-100%) atau "SEDANG" (60-75%).	<i>business-as-usual</i> . Bukan hanya tidak mungkin perusahaan mendapatkan nilai "BURUK" pada verifier manapun (lihat diatas) tetapi sistem skoring ini juga dirancang sehingga meski perusahaan hanya memiliki skor "SEDANG" untuk semua verifier akan mencapai kinerja indikator akhir dengan nilai yang cukup untuk mendapatkan sertifikat, yaitu 67%.	

3.2. Pertimbangan undang-undang dan peraturan di luar kehutanan yang relevan

Dalam FLEGT VPA, kayu legal didefinisikan sebagai "kayu yang telah ditebang, diangkut, diolah dan diperdagangkan mengikuti semua hukum yang berlaku di Indonesia"¹².

Akan tetapi, kajian ini menemukan banyak pelanggaran undang-undang dan peraturan Indonesia dalam banyak IUPHHK-HT dan HA yang bersertifikat SVLK (Lampiran 2, Bab 4 dan 5):

1. Hilangnya hutan alam di habitat spesies yang terancam punah dan/atau dilindungi, seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera dan orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan dan gajah Kalimantan.
2. Hilangnya hutan alam di gambut dalam dengan kedalaman lebih dari 3 meter.
3. Hilangnya hutan alam di Hutan Produksi Terbatas, Hutan/Kawasan Produksi dan Kawasan Konservasi (seperti taman nasional, suaka margasatwa) berdasarkan tata ruang yang saat ini berlaku.
4. Terjadinya kebakaran
5. Adanya korupsi dalam mendapatkan izin.
6. Adanya perkebunan/perladangan non kehutanan di dalam kawasan IUPHHK.
7. Tumpang tindih antara satu perusahaan dengan yang lainnya, seperti kelapa sawit.

Sementara, standar dan panduan audit SVLK:

- Tidak memasukkan indikator LK terkait isu-isu legalitas diatas yang menyebabkan perusahaan mendapatkan sertifikat LK meskipun terdapat persoalan tersebut
- Tidak memasukkan indikator PHPL untuk korupsi (isu ke-5) yang menyebabkan perusahaan mendapatkan sertifikat PHPL meskipun terdapat adanya praktik korupsi.
- Terdapat indikator PHPL tentang deforestasi terkait dengan isu 1-4 dan 6-7, tetapi panduan audit yang lemah menyebabkan perusahaan mendapatkan sertifikat PHPL walaupun terdapat pelanggaran terkait deforestasi.

Mempertimbangkan banyaknya pelanggaran hukum Indonesia oleh perusahaan yang telah memiliki sertifikat, standar SVLK yang berlaku saat ini tidak terlihat sebagai benchmark yang memadai untuk sertifikasi legalitas perusahaan kehutanan. Semua hukum Indonesia yang relevan dan tidak hanya yang dipilih oleh Kementerian Kehutanan harus dinilai dalam kegiatan audit.

Mempertimbangkan luasnya pembukaan hutan tropis dan drainase gambut yang secara legal

diperbolehkan di konsesi IUPHHK-HT (HTI) oleh Kementerian Kehutanan dan kegiatan tersebut ternyata juga dapat diterima di konsesi IUPHHK-HA (HPH) walaupun hal tersebut merupakan pelanggaran hukum Indonesia yang jelas membayarkan standar SVLK yang berlaku saat ini sebagai tolok ukur untuk sertifikasi kelestarian perusahaan kehutanan.

3.3. Praktik-praktik korup dalam proses perizinan

Berdasarkan panduan SVLK, auditor hanya melakukan verifikasi atas dokumen izin IUPHHK-HA/HT/RE, bagan kerja atau rencana kerja tahunan saja, tetapi tidak melakukan evaluasi prosedur perizinan dan pelanggaran peraturan selama perusahaan berupaya untuk mendapatkan izin, termasuk korupsi.

Kajian ini menemukan bahwa sertifikat PHPL dan LK di Provinsi Riau telah diberikan pada 12 pemegang izin IUPHHK-HT walaupun perusahaan tersebut memperoleh izin IUPHHK-HT dan/atau RKT melalui praktik korupsi (lebih jelas lihat Bab 5.1). Contoh tersebut hanya sejumlah kecil yang terdokumentasi dengan baik. Kemungkinan masih banyak perusahaan yang memiliki sertifikat dengan menghadapi persoalan yang sama.

Mempertimbangkan bahwa standar SVLK mengabaikan bukti-bukti pengadilan dan bukti-bukti yang dipublikasi adanya praktik-praktik korupsi maka kemungkinan menjadi tidak mungkin untuk diterima oleh yurisdiksi impor seperti Uni Eropa, Amerika atau Jepang yang memandang korupsi sebagai isu yang besar.

3.4. Lacak balak dan persyaratan asosiasi kelompok

Sistem SVLK semestinya memberikan sertifikasi legalitas dan kelestarian produk yang diekspor dari Indonesia.

Kajian ini menemukan bahwa pabrik yang memiliki sertifikat LK dapat mengolah produk kayu secara khusus dengan menggunakan kayu dari konsesi yang tidak mendapatkan sertifikat SVLK dan mengekspor dengan sertifikat V-Legal. Hal ini dapat menjadi isu yang besar terutama untuk pabrik pulp dan kertas yang menangani kayu dan pulp dengan jumlah yang besar dari berbagai sumber yang kemungkinan illegal. Sistem SVLK tidak “menangkap” sumber yang berpotensi illegal ini karena tidak mensyaratkan verifikasi “lacak balak” yang dapat memastikan bahwa produk akhir pulp dan kertas yang diekspor sebagai V-Legal hanya menggunakan kayu yang berasal dari perusahaan yang juga bersertifikat SVLK. Sistem SVLK juga tidak memiliki “kebijakan asosiasi” yang dapat memastikan legalitas dan kelestarian ditingkat grup perusahaan dan mencegah suatu grup perusahaan yang memiliki masalah hukum melakukan ekspor produknya melalui perusahaan lain dalam satu grup yang telah mendapatkan sertifikat.

Mempertimbangkan kurangnya “kebijakan asosiasi” dan verifikasi lacak balak, importir tidak bisa mengandalkan SVLK untuk menjamin bahwa klaim produk kayu yang diimpor dari Indonesia dengan dokumen V-Legal dihasilkan secara eksklusif hanya dari bahan baku yang benar-benar lestari dan legal oleh pabrik yang seluruh produksinya bersertifikat. Desain SVLK tidak dapat mendeteksi produk tidak bersertifikat yang dicampurkan dalam pengiriman ekspor.

3.5. Masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia/konflik lahan

VPA antara Indonesia dan Uni Eropa mensyaratkan bahwa produk kayu Indonesia menaati, setidaknya, “hak ulayat sah atau hak untuk menggunakan lahan dan sumberdaya yang dapat terkena dampak dari penebangan kayu”^{13, 14}.

LSM Human Rights Watch menemukan bahwa sistem SVLK tidak melindungi masyarakat dari pelanggaran hak asasi manusia oleh sektor kehutanan¹⁵ sehingga tidak menaati persyaratan VPA.

Kajian ini menemukan bahwa beberapa provinsi di Pulau Sumatera seperti Riau dan Jambi, banyak terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat yang tetap menjadi isu yang serius tanpa penyelesaian dan resolusi walaupun perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan sertifikat (sebagai contoh lihat Bab 5.3). Kasus-kasus seperti ini belum mendapat perhatian media meskipun masyarakat sipil mendapat mandat untuk mengawasi sistem SVLK. Kurangnya kepatuhan persyaratan transparansi SVLK dari pemerintah telah melemahkan peran pemerintah itu sendiri (lihat di bawah).

Mempertimbangkan bahwa pelaksanaan standar SVLK saat ini memungkinkan perusahaan dengan pelanggaran hak tenurial yang berat untuk mendapatkan sertifikat, pasar internasional bisa jadi menganggap importir produk V-Legal sebagai fasilitator pelanggaran sosial dan menurunkan nilai produk mereka.

3.6. Kurangnya transparansi dalam proses audit

Sistem SVLK melibatkan 5 lembaga yang berperan besar:

1. Kementerian Kehutanan sebagai pembuat aturan dan pembuat standar sistem SVLK.
2. Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai pemberi akreditasi untuk lembaga sertifikasi dan verifikasi
3. Lembaga sertifikasi dan verifikasi (Lembaga Verifikasi) independen yang melakukan audit sertifikasi sesuai dengan standar dan panduan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan dan KAN.
4. Pemegang izin atau mereka yang berkewajiban untuk mendapatkan sertifikat PHPL atau LK
5. Lembaga Pemantau Independen (LPI) dari masyarakat sipil yang memonitor proses sertifikasi, sebagai suatu grup dari individu atau badan hukum. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) <http://info.jpiik.or.id/> dibentuk oleh beberapa LSM pada September 2010 untuk memonitor pelaksanaan SVLK.

Kajian ini menemukan bahwa transparansi dan representasi oleh para pihak selama proses penilaian SVLK masih kurang, terutama kehadiran pemantau independen (PI).

Pemantau Independen (PI) kurang terlibat dalam proses sertifikasi. Mereka hanya diundang dalam konsultasi publik yang dimandatkan dalam semua proses sertifikasi. PI dapat melakukan monitoring independen selama proses sertifikasi, tetapi mereka tidak diberikan akses pada fase verifikasi di lapangan pada saat audit sebagai observer independen. PI juga hanya memiliki sumberdaya yang sangat terbatas untuk melaksanakan audit independen. Saat PI mengajukan complain pada KAN atau lembaga sertifikasi dan verifikasi, mereka kerap tidak mendapatkan tanggapan karena dianggap data dan informasi PI tidak relevan dengan standar dan panduan SVLK.

Tanpa pelibatan penuh saat proses penilaian sertifikasi, PI tidak memiliki akses pada data yang seharusnya menjadi domain publik tetapi tidak pernah dipublikasikan, seperti dokumen dan peta perencanaan. Pada tanggal 30 September 2013, saat pemerintah Indonesia dan Uni Eropa menandatangani VPA, JPIK mengingatkan bahwa kesulitan akses data dan informasi dari auditor, pemerintah dan perusahaan merupakan tantangan besar untuk memperkuat pelaksanaan SVLK dan memastikan kredibilitasnya¹⁶.

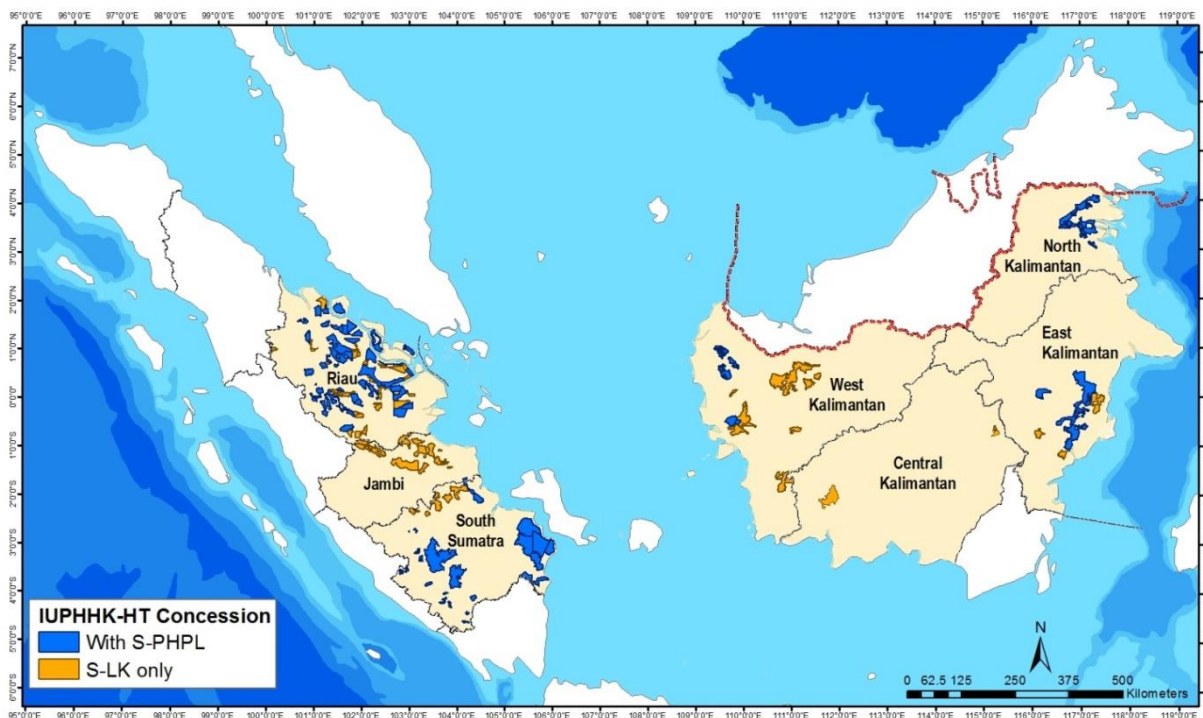
Mempertimbangkan kesulitan PI dan masyarakat sipil secara umum untuk mendapatkan akses informasi terkait SVLK, saat ini tidak ada sistem pemantauan independen pihak ketiga yang efektif, sehingga sulit untuk memonitor dan memperbaiki pelaksanaan SVLK agar kredibel.

4. Kelemahan Mendasar Sertifikat yang Diterbitkan di Sumatera dan Kalimantan

Bab 3 telah menyorot isu-isu utama yang ditemukan pada kajian ini yang terkait dengan standar SVLK yang berlaku saat ini. Pada Bab ini, kajian akan menyorot laporan investigasi atas isu-isu tersebut secara detail untuk semua perusahaan HTI dan HPH yang bersertifikat SVLK di tujuh provinsi: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Utara dan Kalimantan Barat. Analisis penginderaan jauh dan GIS digunakan untuk mendapatkan luasan kehilangan hutan alam selama periode 2009 – 2012 pada kawasan perusahaan dan apakah terjadi pelanggaran undang-undang dan peraturan yang terdapat di Bab 3.2 dan Lampiran 2.

4.1. Masalah-masalah yang ditemukan pada konsesi hutan tanaman industri (IUPHHK-HT) yang memiliki sertifikat SVLK

Kajian ini mengkompilasi data GIS untuk 70 perusahaan HTI di tujuh provinsi (Peta 1, Lampiran 3).



Peta 1.—Konsesi HTI (IUPHHK-HT) bersertifikat SVLK di tujuh provinsi di Sumatera dan Kalimantan, Indonesia.

4.1.1. RIAU

Di Provinsi Riau, sebagai tambahan 38 IUPHHK-HT yang memiliki sertifikat SVLK, kajian ini juga memasukkan PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa sebagai IUPHHK-HA yang telah menebang habis hutan alam di kawasannya untuk produksi pulp dan kertas SMG/APP.

Banyak IUPHHK-HT yang ada di Riau telah mengalami kehilangan hutan alam pada periode 2009 – 2012 (Tabel 7):

1. Di dalam daerah jelajah harimau dan/atau gajah sumatera (Peta 2).
2. Pada gambut dalam (dua kelas, 2-4 meter dan lebih dari 4 meter) (Peta 3).
3. Pada tiga zona (HPT, HL dan HAS-W) tata ruang yang digunakan saat ini (TGHK) dan/atau kawasan konservasi yang melarang adanya pembukaan hutan alam (Peta 4).

Beberapa konsesi juga ditemukan memiliki:

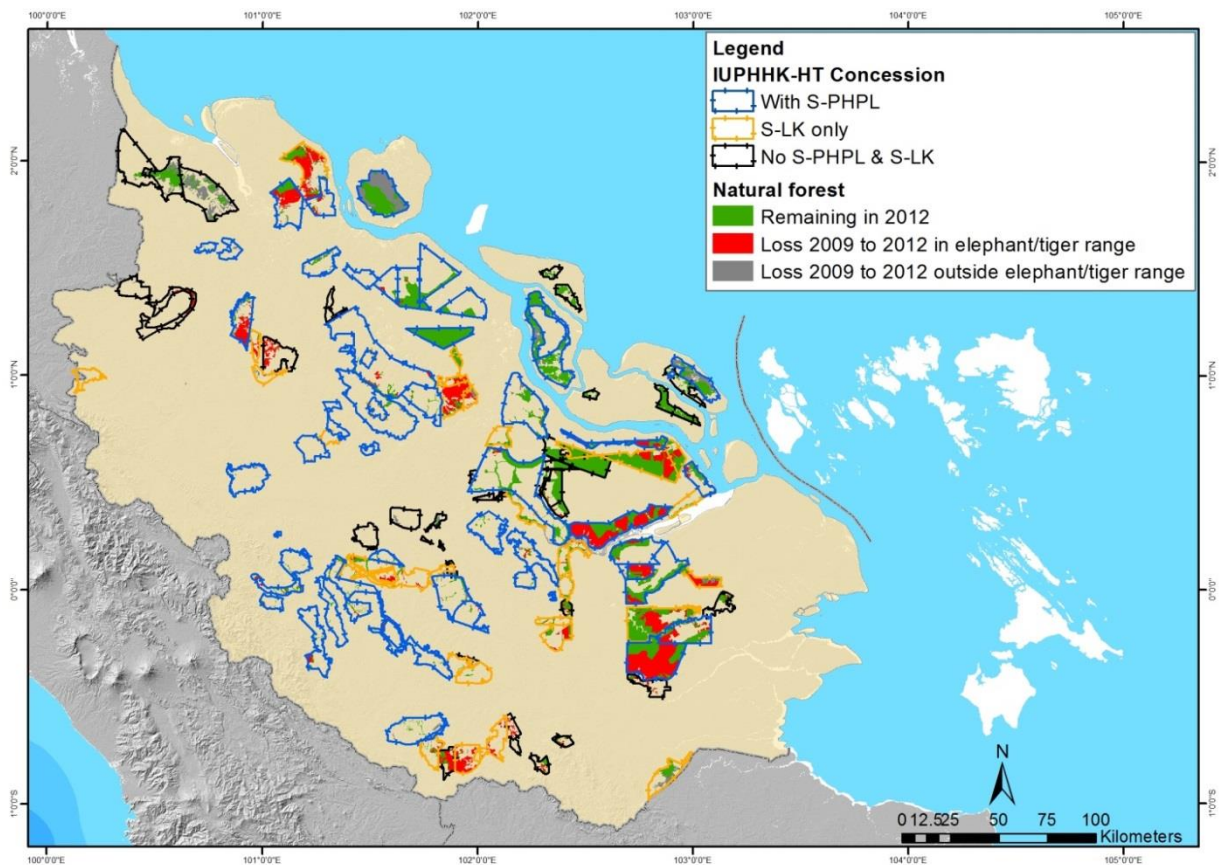
4. Titik api antara 1 Januari-31 Agustus 2013 (Peta 5).

Ada empat perusahaan bersertifikat PHPL - PT. Bukit Batu Hutani Alam, PT. Sekato Pratama Makmur dan PT. Ruas Utama Jaya (pemasok SMG/APP) dan PT. Sumatera Riang Lestari (pemasok RGE/APRIL) – ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan secara sengaja melakukan pembakaran pada Juni-Juli 2013 yang melanggar Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPHL) yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup^{17, 18, 19, 20}.

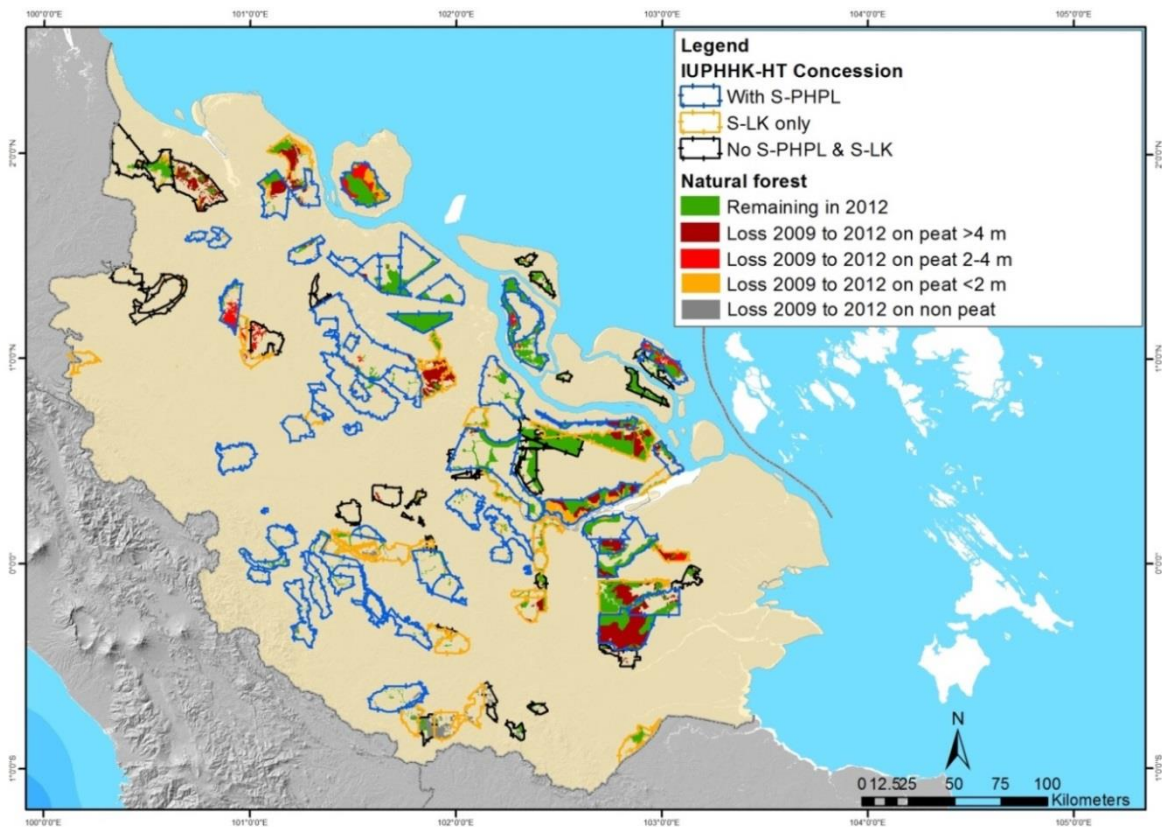
5. keterlibatan dalam kasus korupsi pada penerbitan izin (Peta 6 lihat Bab 5.1).
6. kawasan yang cukup luas dari konsesi yang ditanami oleh perusahaan dengan tanaman lain seperti perkebunan sawit dan bukannya kayu untuk pulp²¹ (Peta 7).
7. keterlibatan dalam beberapa konflik dengan masyarakat (Bab 5.4).

Tabel 7.—IUPHHK-HT dengan sertifikat SVLK di Riau dan berbagai persoalan .

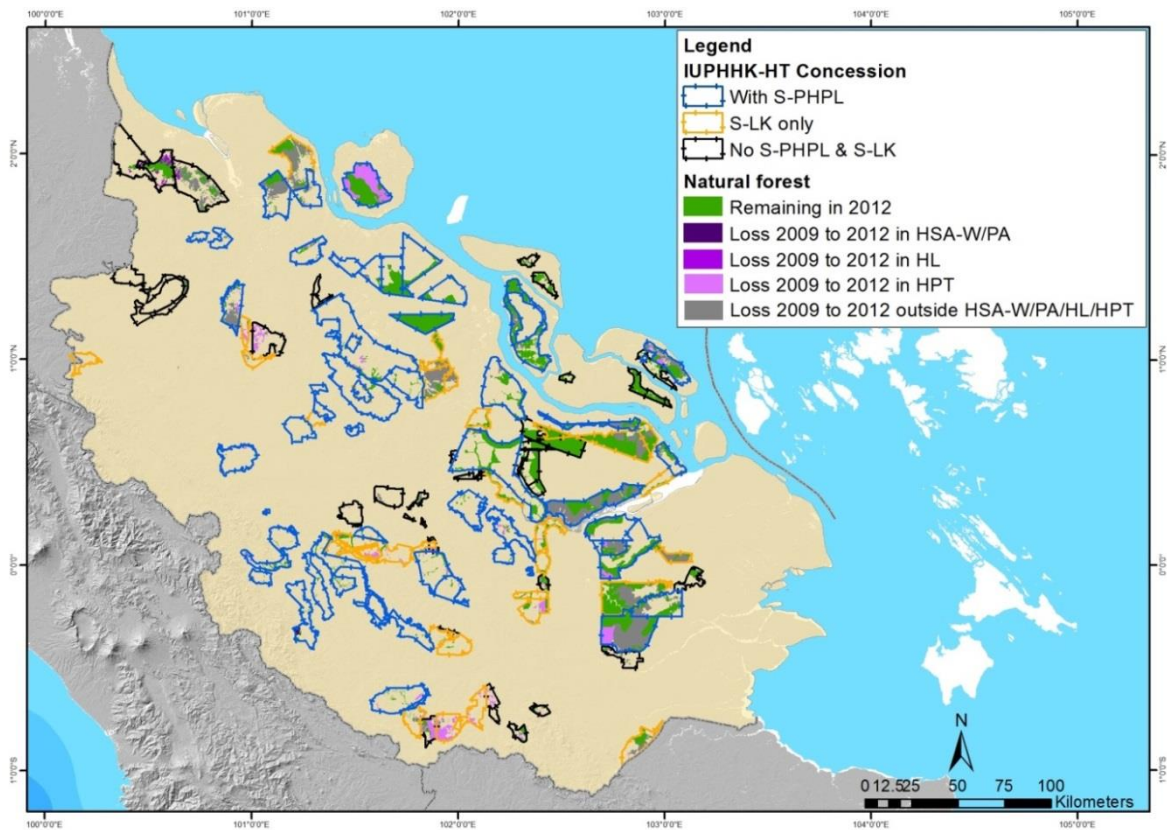
Perusahaan pemegang SVLK			Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agustus 2013	Deforestasi 2009-2012						# titik api 1 Jan-31 Agt 13	Kasus korupsi?	% ditanam bukan dg tanaman u pulp
Grup	#	Nama			dlm jelajah harimaulgih?	pd gambut 2-4 m?	pd gambut >4 m?	pada HPT?	pada HL?	pada HSA-WIPA?			
APP	1	PT. Arara Abadi	362.886	S-PHPL, tnp S-LK	ya	ya	ya	ya	tdk	ya	668	tdk	24%
APP	2	PT. Bina Daya Bentala	20.386	S-PHPL & S-LK	ya	ya	tdk	ya	tdk	tdk	160	tdk	11%
APP	3	PT. Bina Duta Laksana	29.200	S-PHPL & S-LK	ya	ya	ya	tdk	tdk	tdk	9	tdk	23%
APP	4	PT. Bukit Batu Hutani Alam	33.057	S-PHPL, tnp S-LK	tdk	ya	ya	tdk	tdk	tdk	43	tdk	13%
APP	5	PT. Perawang Sukses Perkasa Industri	54.472	S-PHPL, tnp S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	25	tdk	18%
APRIL	6	PT. RAPP	345.792	S-PHPL, tnp S-LK	ya	ya	ya	ya	tdk	ya	280	tdk	10%
APP	7	PT. Ruas Utama Jaya	44.773	S-PHPL & S-LK	ya	ya	ya	ya	tdk	tdk	218	tdk	36%
APP	8	PT. Satria Perkasa Agung	75.253	S-PHPL, tnp S-LK	ya	ya	ya	ya	tdk	tdk	113	tdk	3%
APP	9	PT. Satria Perkasa Agung - Serapung	11.867	S-PHPL, tnp S-LK	ya	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	36	ya	4%
APP	10	PT. Sekato Pratama Makmur	44.782	S-PHPL, tnp S-LK	ya	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	109	tdk	4%
APRIL	11	PT. Sumatera Riang Lestari	107.416	S-PHPL, tnp S-LK	ya	ya	ya	ya	tdk	tdk	75	tdk	8%
APRIL	12	PT. Wananugraha Bina Lestari	8.841	S-PHPL, tnp S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	11	tdk	24%
APP	13	PT. Balai Kayang Mandiri	21.211	hanya a S-LK	ya	ya	ya	tdk	tdk	ya	129	ya	23%
APRIL	14	PT. Bina Daya Bintara	6.029	hanya a S-LK	ya	ya	tdk	ya	tdk	tdk	131	ya	11%
APRIL	15	PT. Bukit Batabuh Sei. Indah	14.604	hanya a S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	3	tdk	30%
APRIL	16	PT. Citra Sumber Sejahtera	15.423	hanya a S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	8	tdk	41%
APRIL	17	PT. Eka Wana Lestari Dharma	9.485	hanya a S-LK	ya	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	12	tdk	2%
APRIL	18	PT. Merbau Pelalawan Lestari	6.472	hanya a S-LK	ya	tdk	ya	ya	tdk	tdk	25	ya	18%
APP	19	PT. Mitra Hutani Jaya	9.672	hanya a S-LK	ya	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	57	ya	8%
APRIL	20	PT. Mitra Kembang Selaras	14.737	hanya a S-LK	ya	tdk	ya	ya	tdk	tdk	6	tdk	20%
APRIL	21	PT. Mitra Taninusa Sejati	7.617	hanya a S-LK	ya	ya	tdk	ya	tdk	tdk	4	ya	5%
APRIL	22	PT. Nusa Prima Manunggal	4.325	hanya a S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	6	tdk	17%
APRIL	23	PT. Nusa Wana Raya	23.893	hanya a S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	42	tdk	17%
APP	24	PT. Riau Abadi Lestari	15.831	hanya a S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	9	tdk	35%
APP	25	PT. Riau Indo Agropalma	9.704	hanya a S-LK	ya	ya	ya	tdk	tdk	tdk	2	tdk	8%
APRIL	26	PT. Rimba Lazuardi	20.932	hanya a S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	47	tdk	16%
APP	27	PT. Rimba Mandau Lestari	5.604	hanya a S-LK	ya	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	21	ya	4%
APRIL	28	PT. Rimba Mutiara Permai	8.069	hanya a S-LK	ya	ya	tdk	ya	tdk	tdk	6	ya	2%
APRIL	29	PT. Rimba Peranap Indah	14.160	hanya a S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	11	tdk	12%
APRIL	30	PT. Sari Hijau Mutiara	16.670	hanya a S-LK	tdk	ya	tdk	ya	tdk	tdk	12	tdk	63%
APP	31	PT. Satria Perkasa Agung & KTH. Sinar Merawang - Pulau Muda	9.885	hanya a S-LK	ya	tdk	ya	ya	tdk	tdk	0	tdk	0%
APRIL	32	PT. Selaras Abadi Utama	17.435	hanya a S-LK	ya	ya	ya	tdk	tdk	ya	43	ya	12%
APRIL	33	PT. Seraya Sumber Lestari	19.052	hanya a S-LK	ya	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	213	ya	9%
APRIL	34	PT. Siak Raya Timber	21.402	hanya a S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	3	tdk	16%
APRIL	35	PT. Sumatera Sylva Lestari	8.957	hanya a S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	4	tdk	18%
APP	36	PT. Suntara Gajapati	34.790	hanya a S-LK	ya	tdk	ya	ya	tdk	tdk	80	tdk	51%
APRIL	37	PT. Triomas FDI	9.687	hanya a S-LK	ya	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	13	ya	0%
APRIL	38	PT. Uni Seraya	32.830	hanya a S-LK	ya	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	5	ya	0%
APP	HPH	PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa	44.314	hanya a S-LK	ya	tdk	ya	ya	tdk	tdk	10	tdk	8%



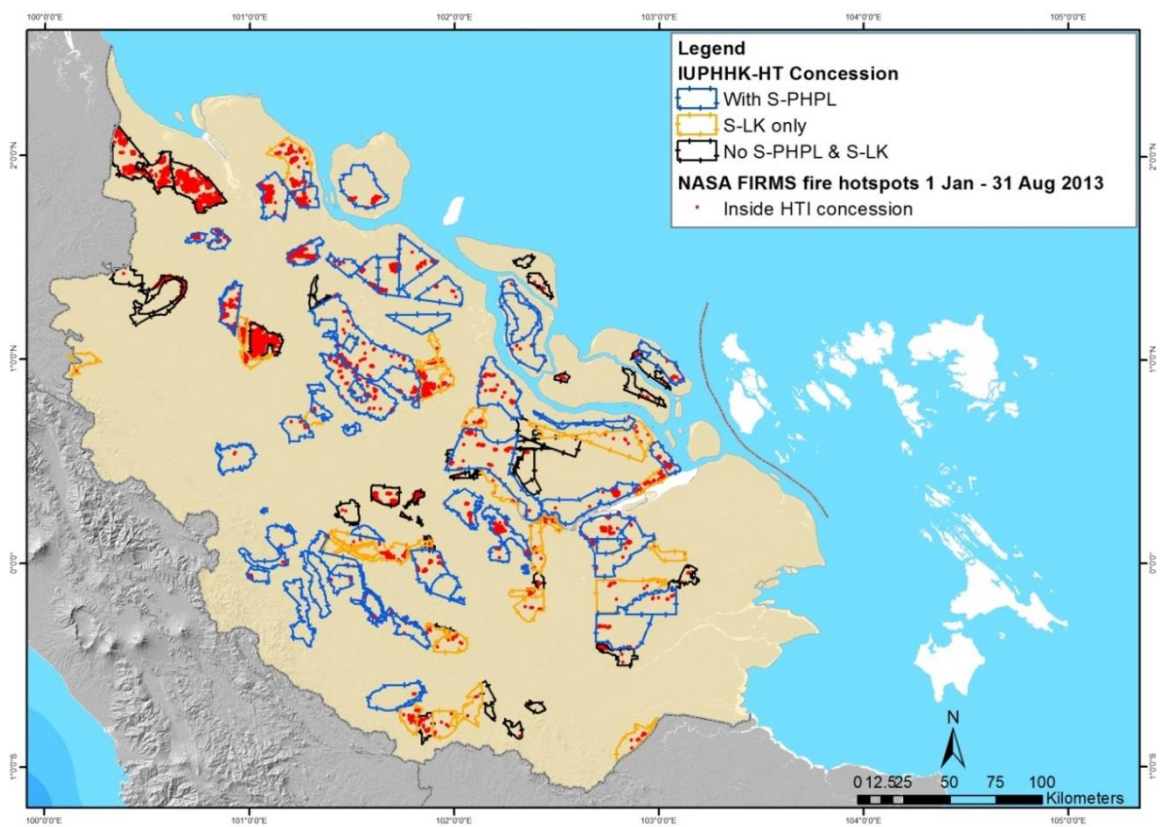
Peta 2.—Hutan alam yang hilang antara tahun 2009 dan 2012 di konsesi IUPHHK-HT (ditambah area IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa) dengan dan tanpa SVLK di dalam dan di luar wilayah jelajah harimau dan/atau gajah sumatera.



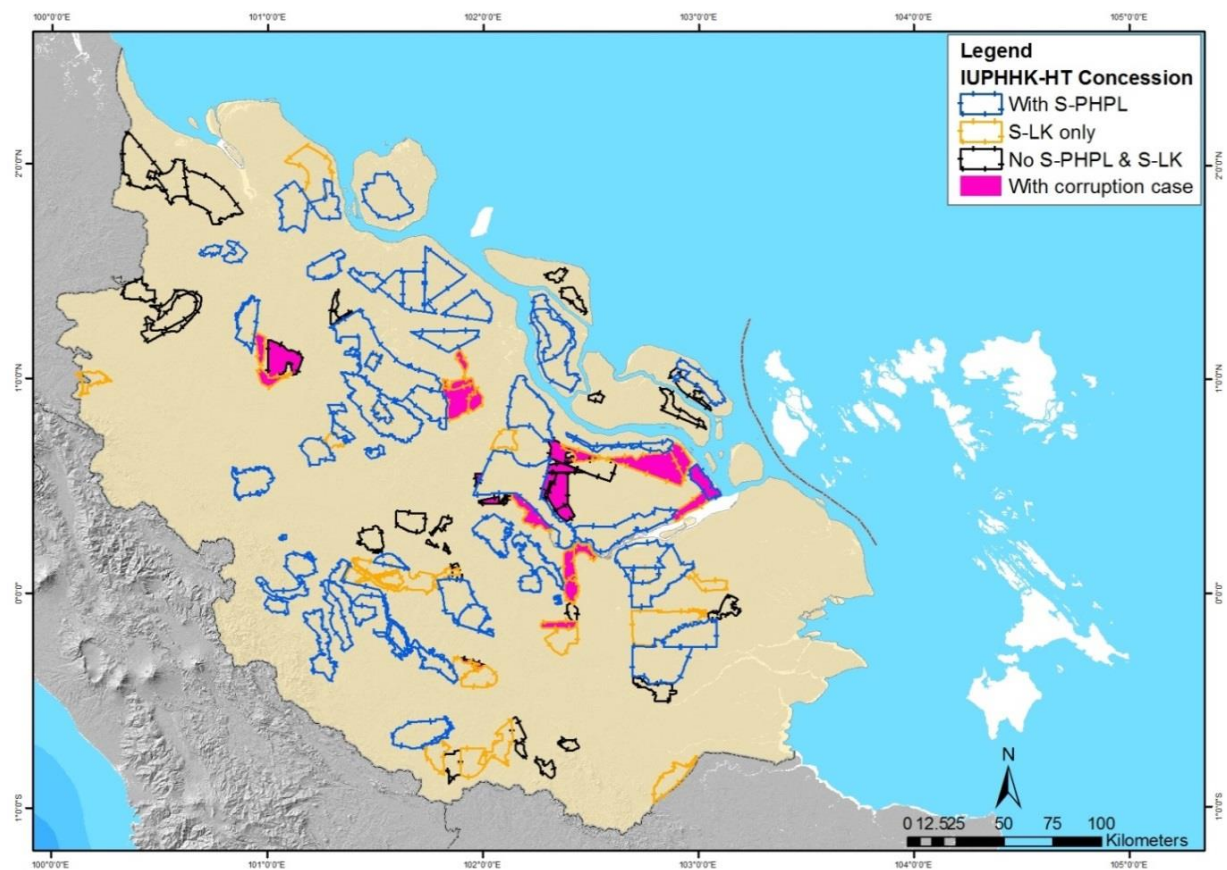
Peta 3.—Hutan alam yang hilang antara tahun 2009 dan 2012 di konsesi IUPHHK-HT (ditambah IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa) dengan atau tanpa SVLK pada tanah gambut atau non gambut di Riau.



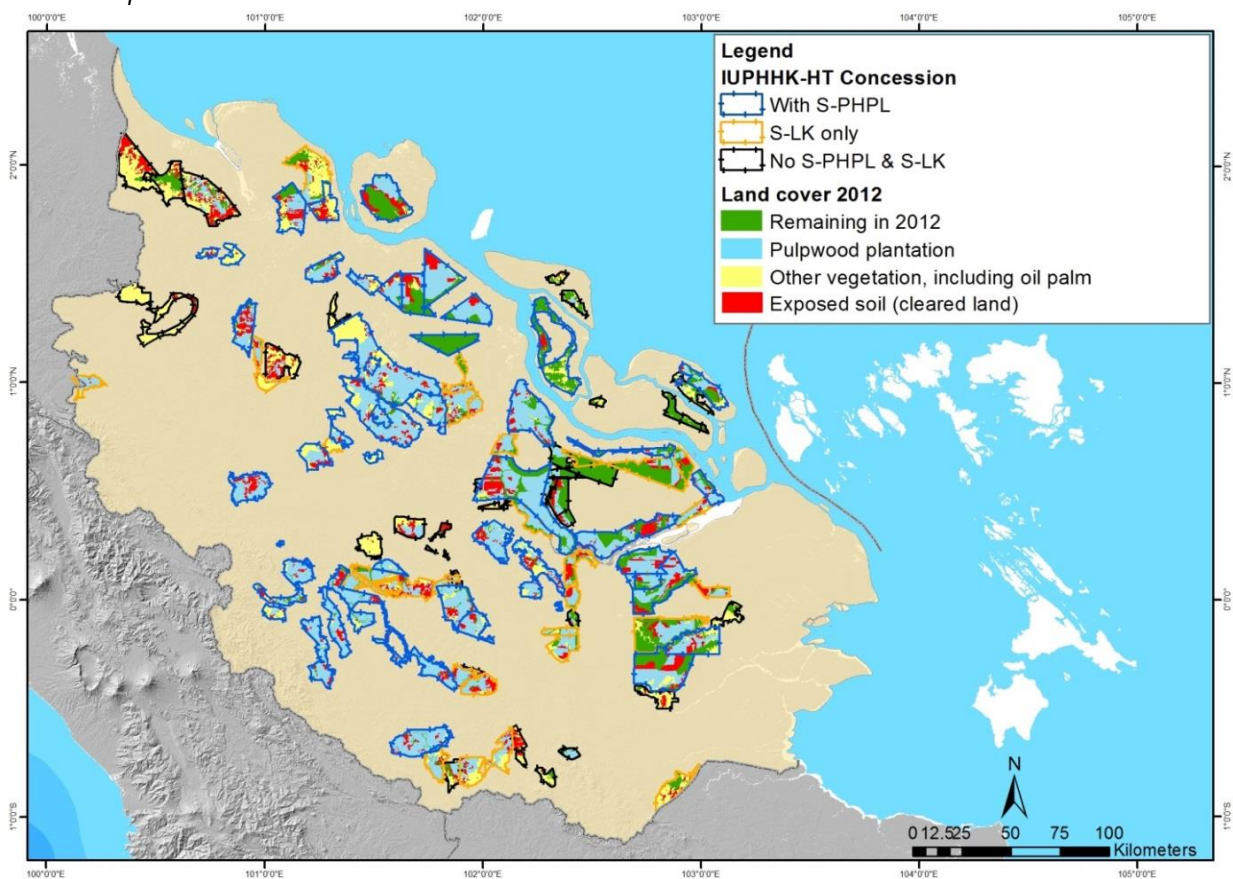
Peta 4.— Hutan alam yang hilang antara tahun 2009 dan 2012 di konsesi IUPHHK-HT (ditambah IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa) dengan atau tanpa SVLK di tiga zona TGHK (HAS-W, HL dan HPT) dan kawasan konservasi di Riau



Peta 5.—Konsesi IUPHHK-HT (ditambah IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa) dengan atau tanpa SVLK dan titik api antara 1 Januari dan 31 Agustus 2013 (Data NASA FIRMS) di Riau.



Peta 6.—Konsesi IUPHHK-HT (ditambah IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa) dengan atau tanpa SVLK dan kasus korupsi.



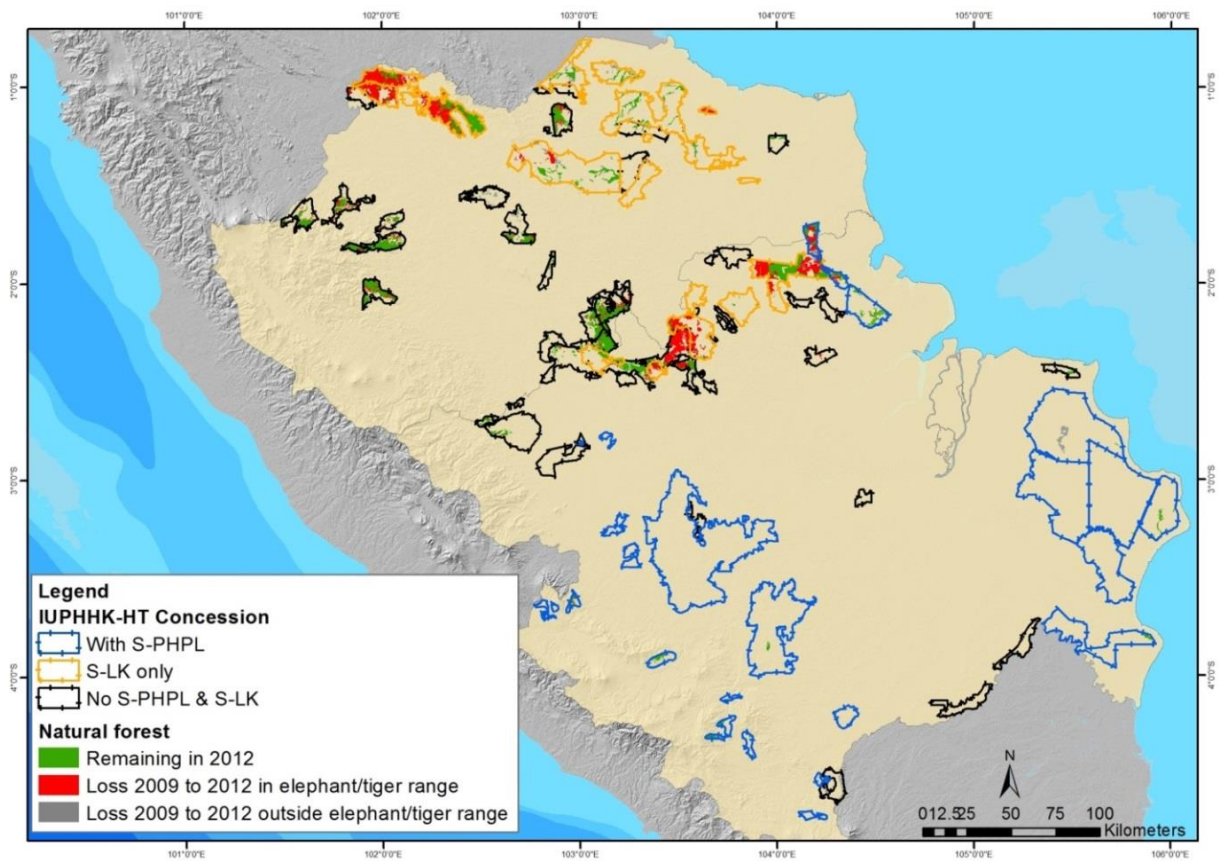
Peta 7.—IUPHHK-HT (ditambah IUPHHK-HA PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa) dengan atau tanpa SVLK dan tutupan lahan di Riau.

4.1.2. JAMBI DAN SUMATERA SELATAN

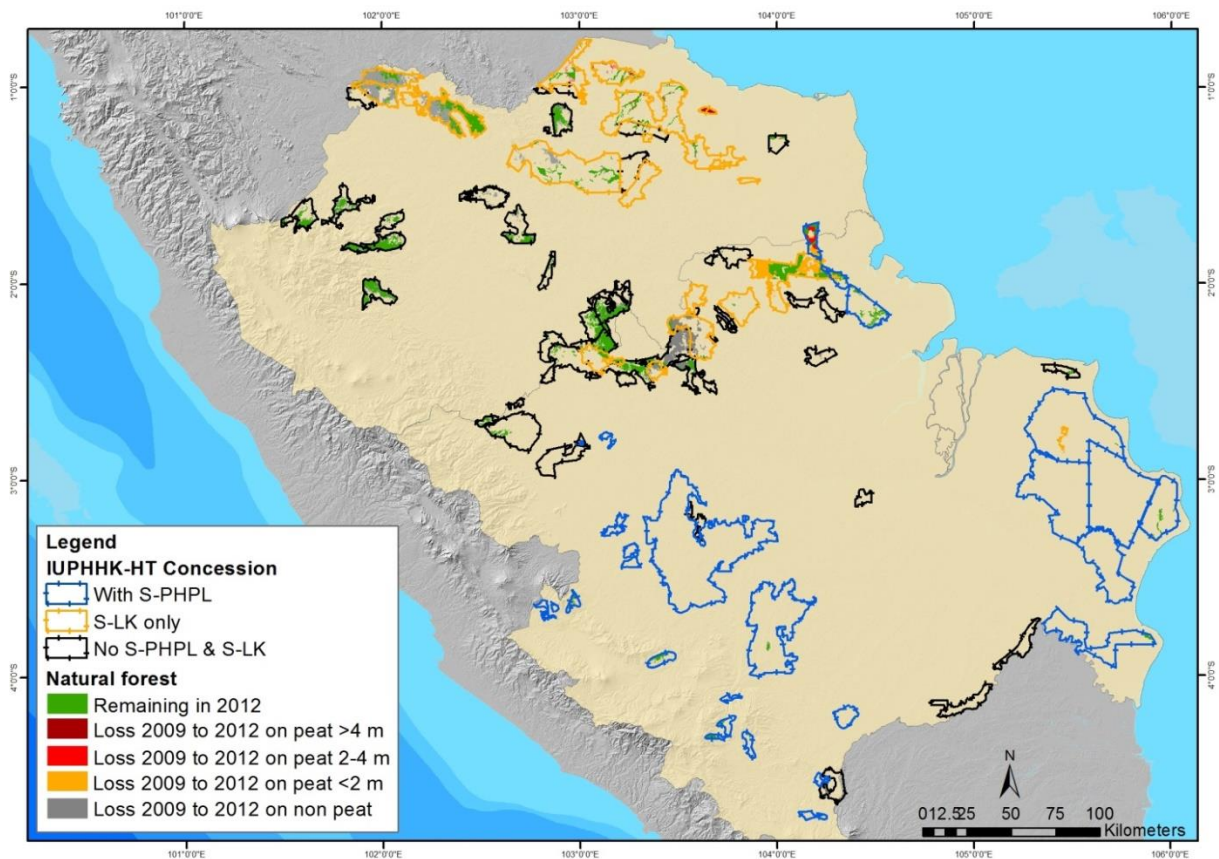
Konsesi-konsesi di Jambi dan Sumatera Selatan yang kehilangan hutan alam setelah tahun 2009 memiliki beberapa persoalan sebagaimana yang teramati di provinsi tetangga Riau.

Tabel 8.—IUPHHK-HT dengan sertifikat SVLK di Jambi dan Sumatera Selatan dan berbagai persoalan .

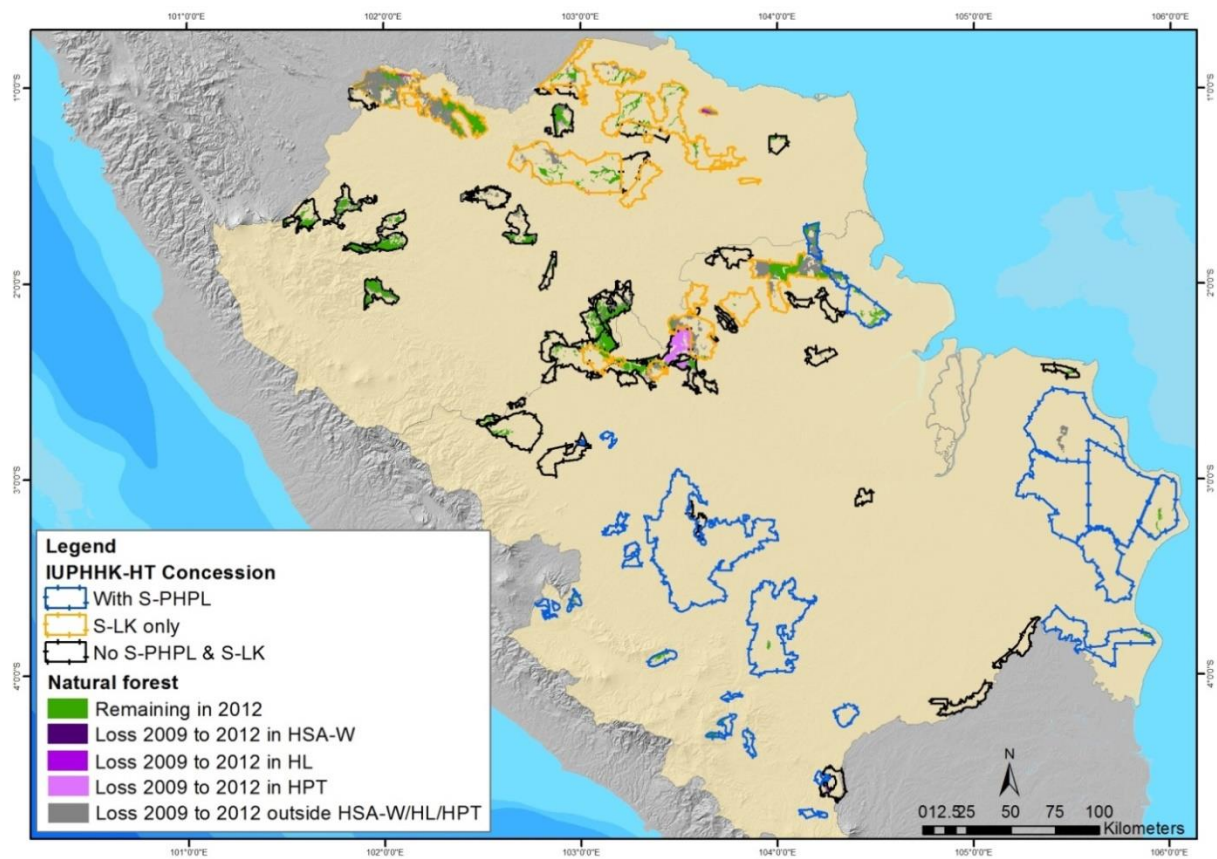
Perusahaan pemegang SVLK			Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agustus 2013	Deforestasi 2009-2012						# tdk api 1 Jan-31 Ag 13	% ditanam bukan dg tanaman u pulp
Grup	#	Nama			Dlm jelajah Harimau/Gjh/OU?	Pd gambut 2-4 m?	Pd gambut >4 m?	Pada HPT?	Pada HL?	Pada HSA-WIPA?		
JAMBI												
Barito	1	PT. Lestari Asri Jaya	61.709	hanya S-LK	ya	tdk	tdk	tdk	ya	tdk	295	38%
APP	2	PT. Tebo Multi Agro	20.132	hanya S-LK	ya	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	6	37%
Barito	3	PT. Wanamukti Wisesa	9.375	hanya S-LK	ya	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	9	55%
APP	4	PT. Wira Karya Sakti	291.887	hanya S-LK	ya	ya	ya	ya	ya	ya	93	27%
SUMATERA SELATAN												
APP	1	PT. Bumi Andalas Permai	192.932	S-PHPL,tnp S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	ya	tdk	16	32%
APP	2	PT. Bumi Mekar Hijau	251.191	S-PHPL,tnp S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	23	68%
Marube	3	PT. Musi Hutan Persada	437.685	S-PHPL,tnp S-LK	ya	tdk	tdk	ya	ya	tdk	49	45%
APP	4	PT. SBA Wood Industries	143.483	S-PHPL,tnp S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	0	42%
APP	5	PT. Sumber Hijau Permai	30.072	S-PHPL,tnp S-LK	ya	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	7	19%
APP	6	PT. Tri Pupajaya	19.019	S-PHPL & S-LK	ya	ya	tdk	tdk	tdk	tdk	3	15%
APP	7	PT. Bumi Persada Permai I	60.486	hanya S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	7	28%
APP	8	PT. Bumi Persada Permai II	24.666	hanya S-LK	ya	tdk	tdk	ya	ya	tdk	2	64%
APP	9	PT. Rimba Hutani Mas	66.101	hanya S-LK	ya	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	10	22%



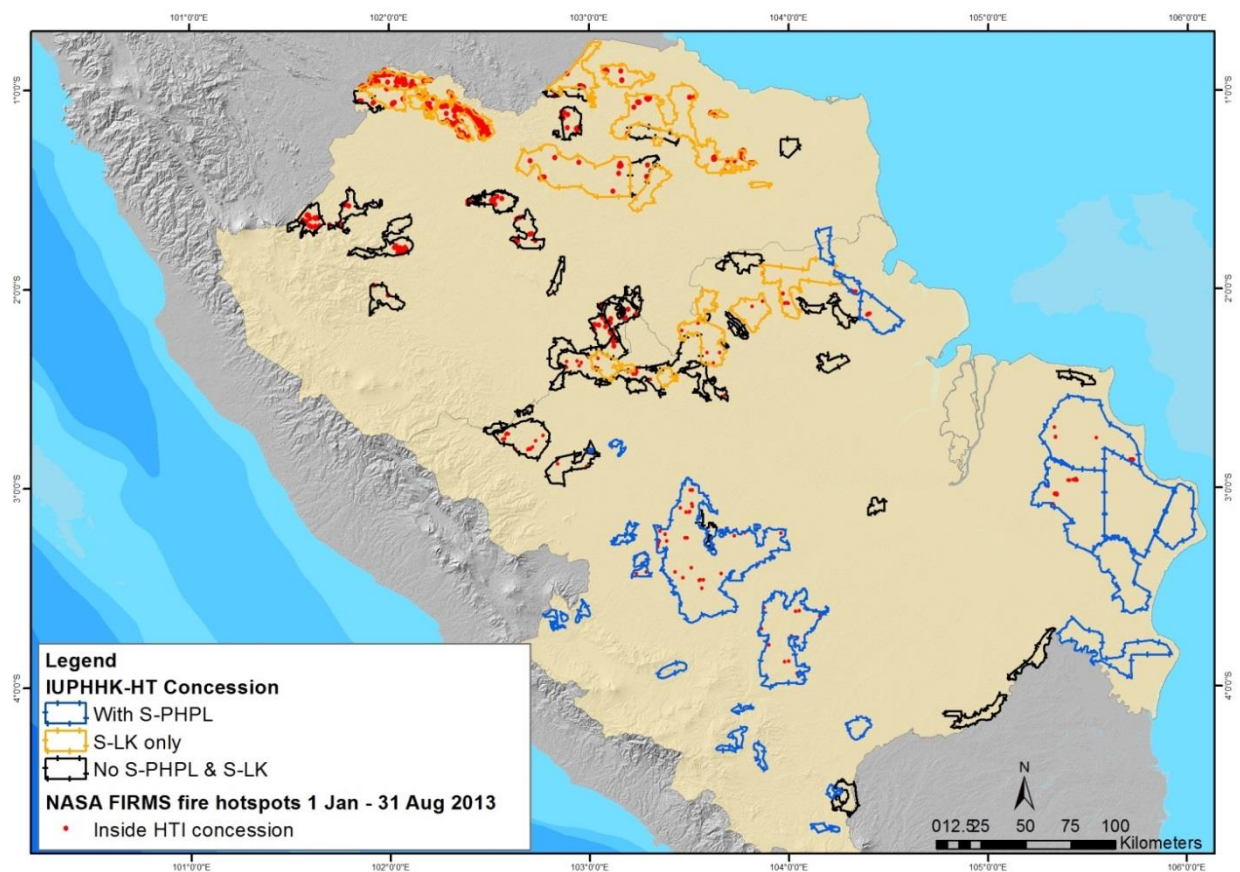
Peta 8.—Hutan alam yang hilang antara 2009 dan 2012 di konsesi IUPHHK dengan atau tanpa SVLK di dalam dan di luar area jelajah gajah dan/atau harimau Sumatera di Jambi dan Sumatera Selatan.



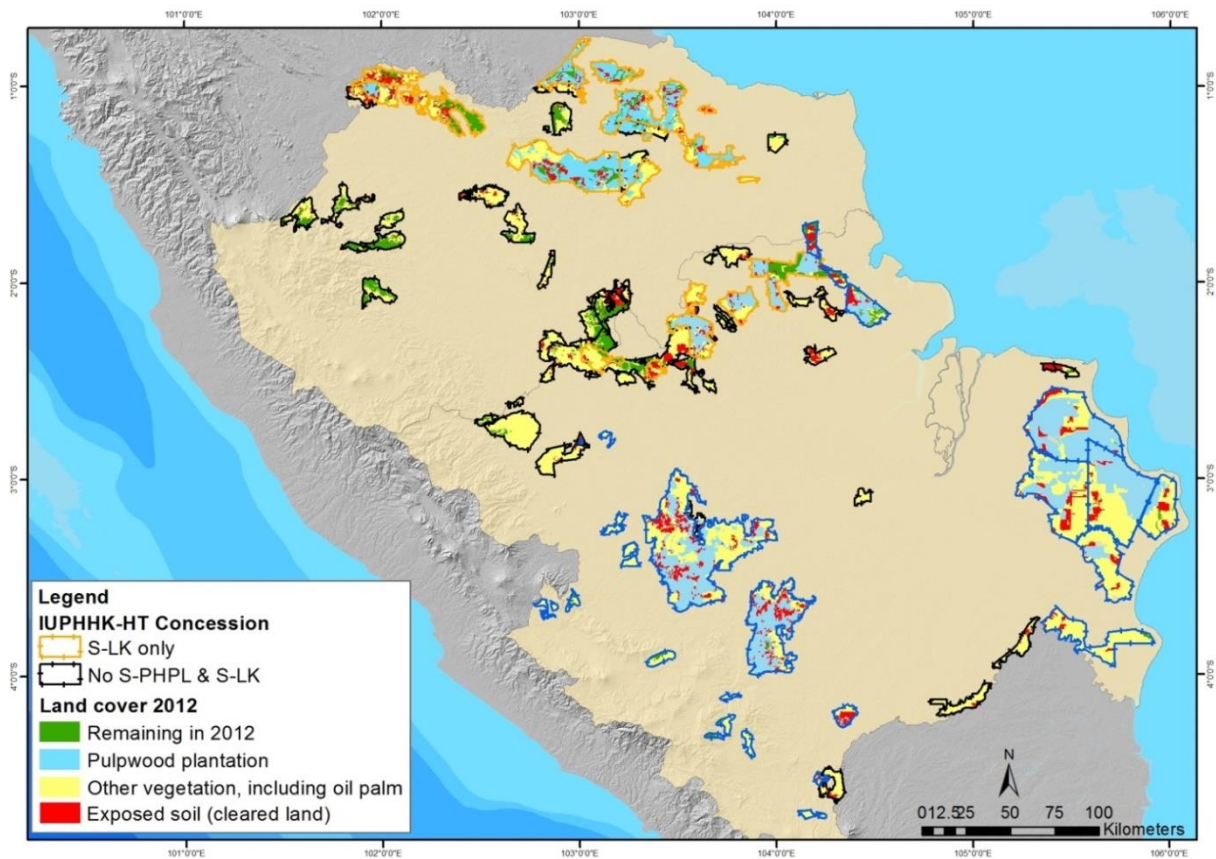
Peta 9.—Hutan alam yang hilang antara 2009 dan 2012 di konsesi IUPHHK dengan atau tanpa SVLK di lahan gambut atau non gambut di Jambi dan Sumatera Selatan.



Peta 10.— Hutan alam yang hilang antara 2009 dan 2012 di IUPHHK dengan atau tanpa SVLK dalam tiga zona TGHK (HSA-W, HL dan HPT) dan kawasan konservasi di Jambi dan Sumatera Selatan.



Peta 11.— Titik api di konsesi IUPHHK dengan atau tanpa SVLK antara 1 Januari dan 31 Agustus 2013 (data NASA FIRMS) di Jambi dan Sumatera Selatan.



Peta 12.—Konsesi IUPHHK-HT dengan atau tanpa SVLK dan tutupan lahan 2012 di Jambi dan Sumatera Selatan.

4.1.3. KALIMANTAN

Kajian ini dilaksanakan dengan analisis GIS yang sama dengan Sumatera. Akan tetapi data tutupan hutan untuk 2009 dan 2012 memiliki resolusi yang lebih kasar sehingga kurang akurat. Sehingga analisis yang disajikan adalah analisis awal dan disarankan untuk dilakukan investigasi lebih lanjut yang lebih detail.

Dibandingkan dengan Sumatera, kajian ini menemukan hutan yang hilang antara 2009 dan 2012 lebih sedikit pada perusahaan yang memiliki sertifikat SVLK, kecuali beberapa perusahaan di Kalimantan Barat (Tabel 9). Beberapa dari perusahaan ini dan satu perusahaan di Kalimantan Utara memiliki beberapa persoalan lain:

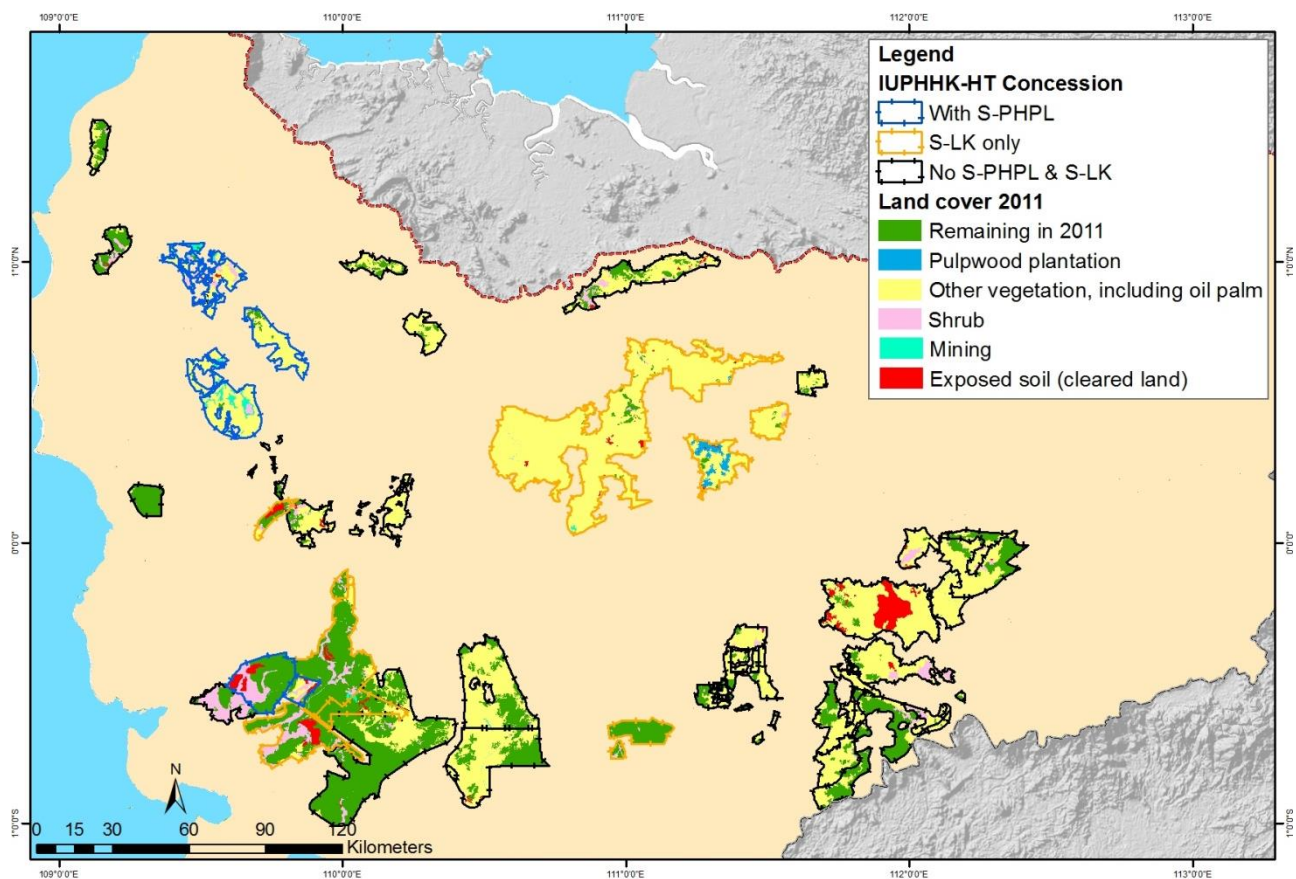
- Berdasarkan data tutupan lahan Kementerian Kehutanan tahun 2011, cukup banyak perusahaan kehutanan yang memiliki tutupan lahan bukan hutan (tidak ada hutan alam dan tidak ada hutan tanaman untuk pulp) di sebagian besar konsesinya, seperti kelapa sawit, pertambangan, transmigrasi (Peta 13).
- Terutama di Kalimantan Timur, banyak perusahaan yang memiliki sertifikat SVLK tumpang tindih dengan izin kelapa sawit (Kalimantan Timur, Peta 14).

Tabel 9.—Ringkasan persoalan yang ditemukan di konsesi IUPHHK-HT yang memiliki sertifikat SVLK di 4 provinsi Kalimantan.

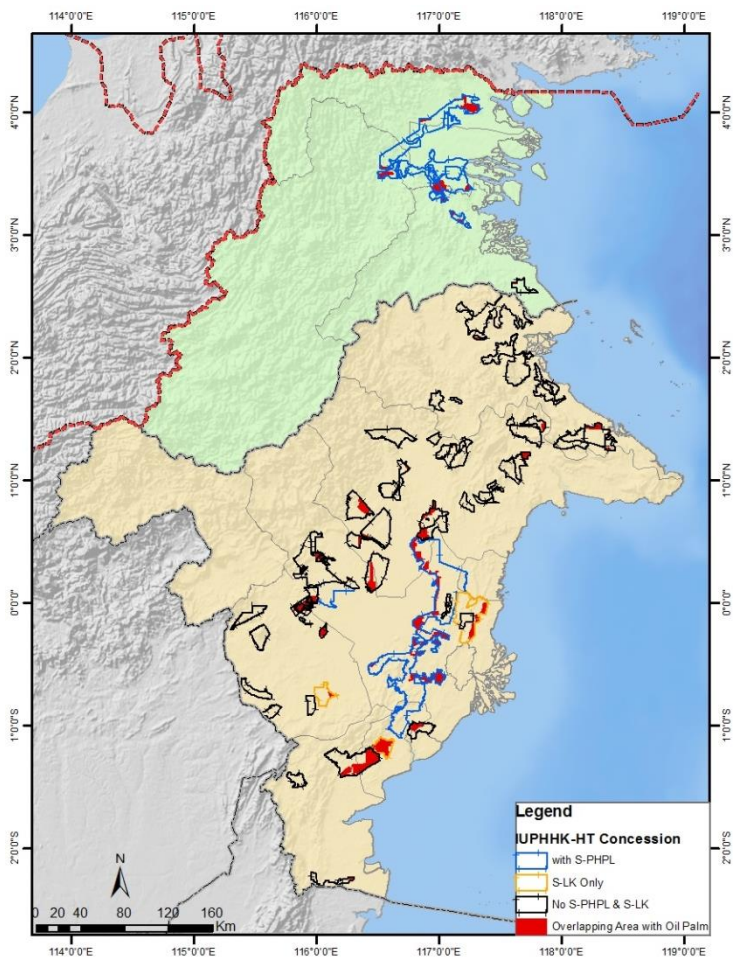
Perusahaan Pemegang SVLK			Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agustus 2013	Deforestasi 2009-2012						# titik api 1 Jan- 31 Agt 13	% overlap dg non kehut.*	Overlap dg izin kebun kelapa sawit**
Grup	#	Nama			dalam jelajah OU ranges?	pada gambut 2-4 m?	pada gambut >4 m?	pada HPT?	pada HL?	pada HSA-WIPA?			
Kalimantan Barat													
	1	PT. Bina Silva Nusa	9.314	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	0	34%	NA
	2	PT. Nityasa Idola	98.811	S-PHPL, tdk S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	ya	tdk	0	88%	NA
Sumitomo & Alas Kusuma Group	3	PT. Wana Subur Lestari	40.159	S-PHPL & S-LK	ya	tdk	ya	ya	ya	tdk	0	0%	NA
APP	4	PT. Asia Tani Persada	20.719	hanya S-LK	ya	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	17	19%	NA
APP	5	PT. Daya Tani Kalbar	47.915	hanya S-LK	ya	tdk	ya	ya	ya	tdk	3	4%	NA
APP	6	PT. Finnantara Intiga	286.928	hanya S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	0	94%	NA
APP	7	PT. Kalimantan Subur Permai	13.416	hanya S-LK	ya	ya	tdk	tdk	tdk	tdk	7	10%	NA
Sumitomo	8	PT. Mayangkara Tanaman Industri (SK 480)	71.952	hanya S-LK	ya	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	7	6%	NA
	9	PT. Wana Hijau Pesaguan	103.867	hanya S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	0	30%	NA
Kalimantan Tengah													
Korindo	1	PT. Korintiga Hutani	97.808	hanya S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	1	34%	NA
Barito Pacific Lumber	2	PT. Meranti Sembada	17.798	hanya S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	0	13%	NA
Kalimantan Timur dan Utara													
APP	1	PT. Acasia Andalan Utama (Kukar)	39.300	S-PHPL, tdk S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	2	0%	0%
RGE	2	PT. Adindo Hutani Lestari	195.453	S-PHPL, tdk S-LK	tdk	ya	ya	ya	tdk	tdk	6	25%	17%
Murdaya	3	PT. Intraca Hutani Lestari	40.241	S-PHPL, tdk S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	0	5%	21%
RGE	4	PT. ITCI Hutani Manunggal	159.908	S-PHPL, tdk S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	1	64%	19%
APP	5	PT. Surya Hutani Jaya	194629	S-PHPL, tdk S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	9	10%	22%
	6	PT. Bentala Subur	21074	hanya S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	0	28%	91%
APP	7	PT. Kelawit Wana Lestari (Kubar)	21.503	hanya S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	0	38%	15%
APP	8	PT. Sumalindo Hutani Jaya II	69.098	hanya S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	5	13%	20%

* Dihitung berdasarkan data Tutupan Lahan Kementerian Kehutanan, di- download dari <http://appgis.dephut.go.id/appgis/download.aspx> tanggal 23 Oktober 2013

** Dihitung berdasarkan luasan izin perkebunan sawit – lihat Lampiran 1 untuk sumber data.



Peta 13.—Tutupan lahan tahun 2011 (MoF 2013) di dalam konsesi IUPHHK-HT di Kalimantan Barat. Wilayah kuning termasuk pertanian lahan kering (perladangan lahan kering dan pertanian lahan kering bercampur semak) dan perkebunan kelapa sawit.



Peta 14.—Tumpang tindih konsesi IUPHHK-HT yang memiliki sertifikat SVLK dan izin perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur dan Utara .

4.2. Persoalan-persoalan yang ditemukan dalam IUPHHK-HA yang memiliki sertifikat SVLK

4.2.1. SUMATERA

Hanya terdapat 28 perusahaan dengan izin IUPHHK-HA di Sumatera berdasarkan Kementerian Kehutanan²², hanya empat perusahaan yang memiliki sertifikat SVLK, dua perusahaan berada di Riau dan dua perusahaan di Sumatera Barat (Lampiran 4).

Di Riau, PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa (supplier SMG/APP) telah menerima sertifikat S-LK yang patut dipertanyakan. Meskipun memiliki izin IUPHHK-HA, perusahaan tersebut masih melaksanakan “dua sistem silvikultur” dimana “Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)” dan “Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI)” dilaksanakan secara bersamaan.

Dalam sistem ini, perusahaan telah melakukan tebang habis hutan hujan rapat di sebagian besar konsesinya, pada lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan pada habitat harimau Sumatera selama periode audit LK dan bahkan hingga 31 Januari 2013 (lihat Bab 4.1.1). Hanya konsesi IUPHHK-HA ini di Indonesia yang diketahui melakukan kegiatan kehutanan yang biasanya dilakukan di IUPHHK-HT.

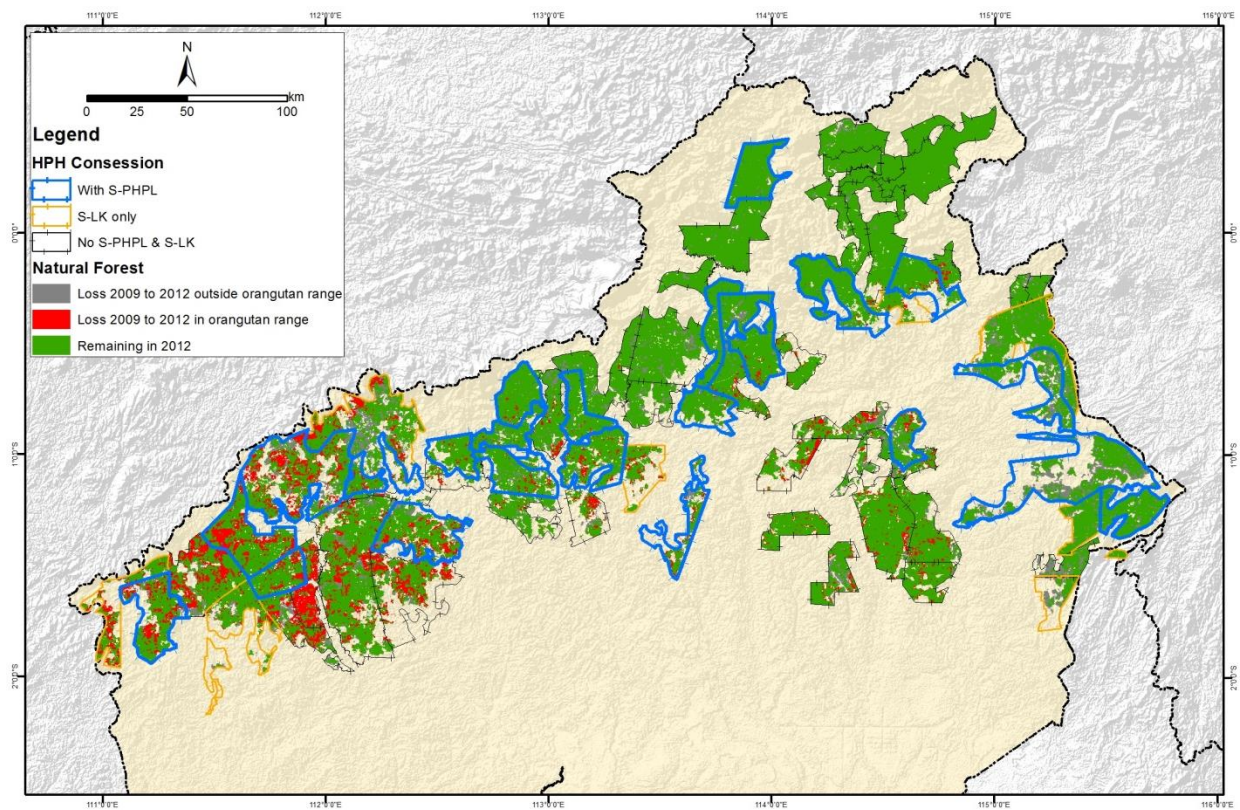
4.2.2. KALIMANTAN

Kajian ini memetakan hilangnya hutan alam antara 2009 dan 2012 di konsesi yang memiliki sertifikat SVLK terkait dengan ruang jelajah orangutan Kalimantan, kawasan/kedalaman gambut, zona tata ruang aktif dan titik api antara 1 Januari dan 31 Agustus 2013 (Tabel 17). Kajian ini menemukan bahwa:

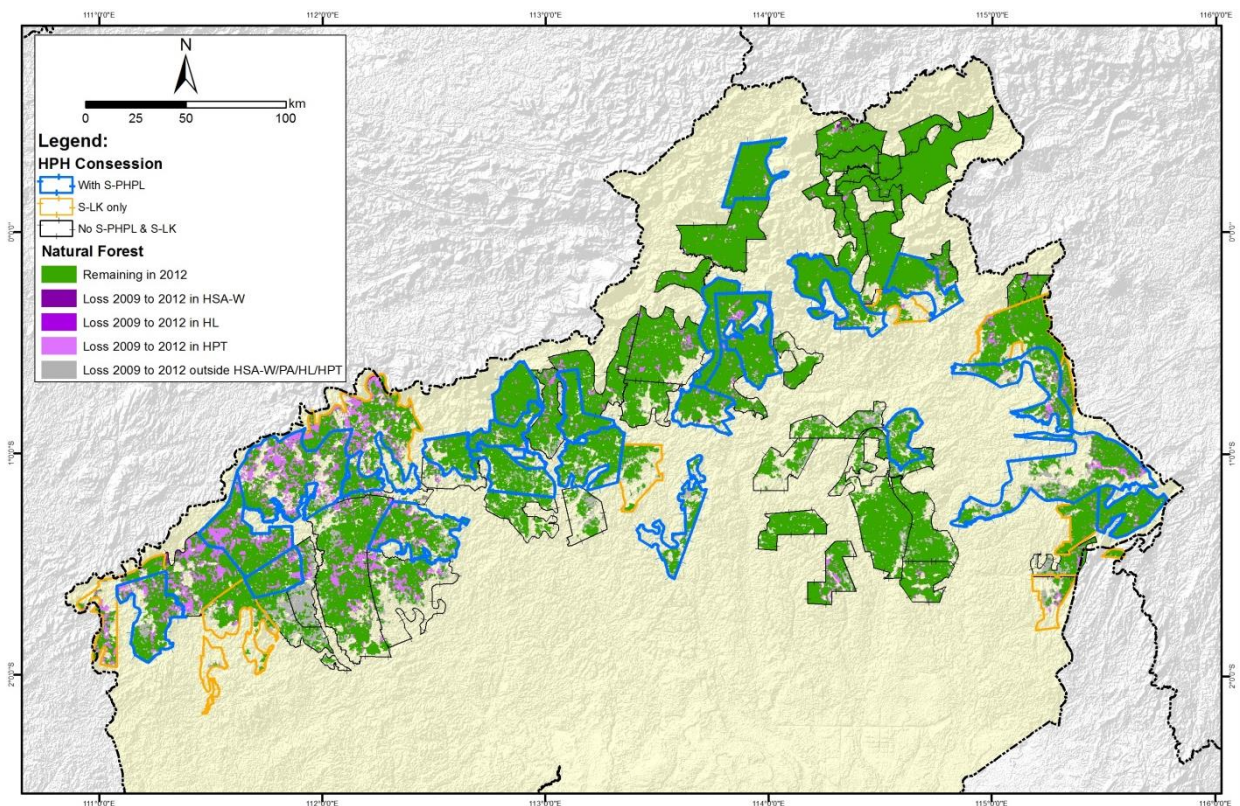
- Banyak konsesi yang memiliki sertifikat masih terjadi deforestasi, walaupun tidak diizinkan pada konsesi HPH (IUPHHK-HA).
- Beberapa deforestasi terlihat berada di dalam:
 - Area jelajah orangutan
 - Zona Hutan Produksi Terbatas (HPT)
 - Zona Hutan Lindung (HL)
 - Pada satu konsesi yang memiliki sertifikat LK di Kalimantan Timur (PT. Bara Karang Sakti) juga terjadi kehilangan hutan yang berada dalam zona kawasan konservasi.
- Beberapa konsesi yang memiliki sertifikat mengalami tumpang tindih dengan perusahaan lain tanpa solusi legal.
- Beberapa konsesi yang memiliki sertifikat pada sebagian kawasannya ditutupi oleh penggunaan lahan bukan kehutanan seperti kelapa sawit, pertambangan, transmigrasi.

Tabel 10.—Ringkasan persoalan yang ditemukan di konsesi HPH yang memiliki sertifikat SVLK di Kalimantan.

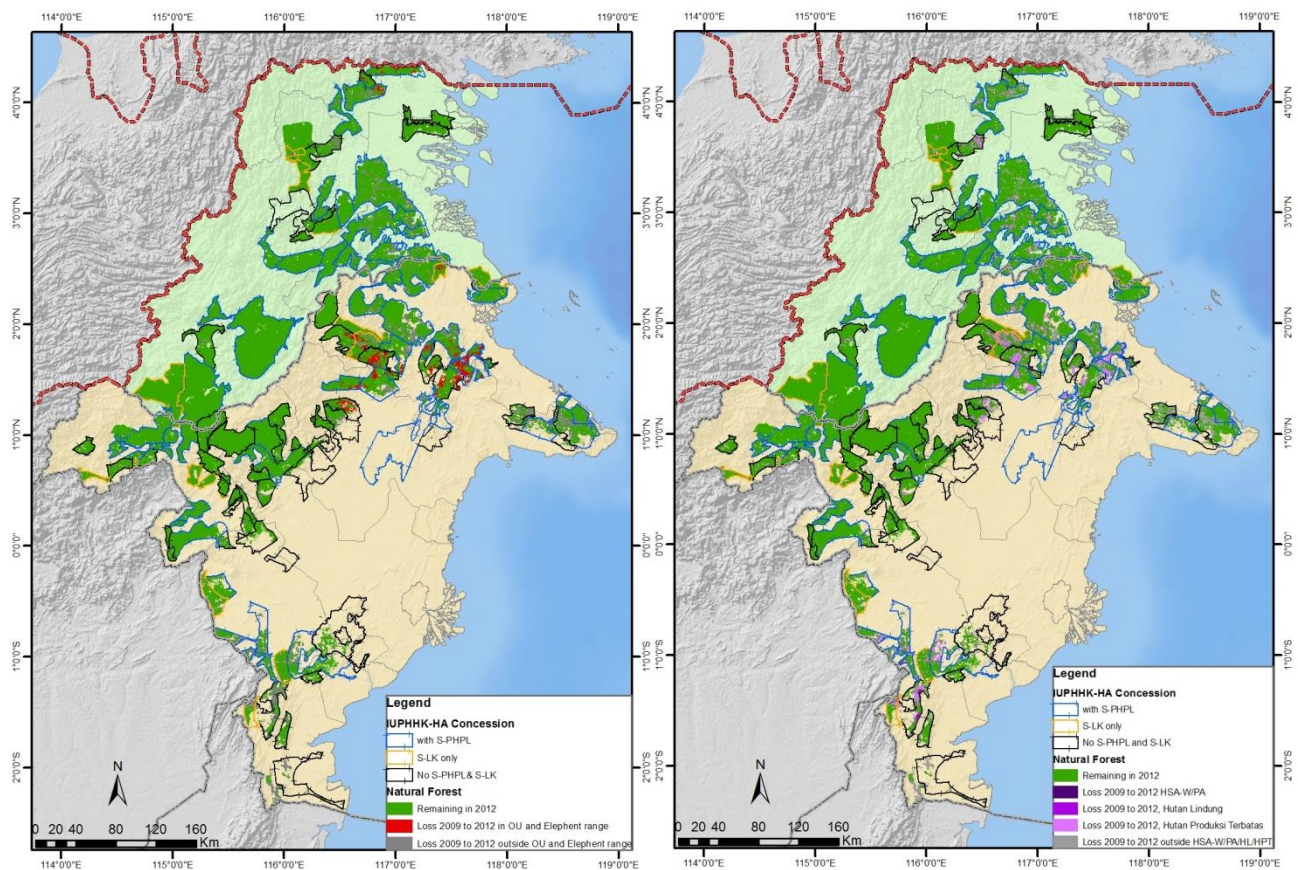
Perusahaan Pemegang SVLK		Luasan Peta (ha)	Status SVLK hingga Agustus 2013	Deforestation 2009-2012							# titik api 1Jan-3Agt 2013	% overlap dg non kehutanan*	Overlap dg izin kebun kelapa sawit**	Catatan
#	Nama			dlm jelajah OU/Gjh?	Pd gambut 2-4m?	pd gambut >4m ?	pada HPT?	pada HL?	pada HAS-W?					
Kalimantan Barat														
1	PT. Bina Ovivipari Semesta	10.192	S-PHPL & S-LK	tdk	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	2%	NA		
2	PT. Kalimantan Satya Kencana	46.079	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	ya	tdk	1	10%	NA		
3	PT. Kandelia Alam	18.203	S-PHPL & S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	0%	NA		
4	PT. Wanasoka Hasilindo	46.925	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	ya	tdk	tdk	1%	NA		
5	PT. Suka Jaya Makmur	170.581	hanya S-LK	ya	tdk	tdk	ya	ya	tdk	1	1%	NA		
Kalimantan Tengah														
1	PT. Amprah Mitra Jaya	79.411	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	12%	NA		
2	PT. Austral Byna	263.557	S-PHPL, tdk S-LK	tdk	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	1	10%	NA		
3	PT. Bina Multi Alam Lestari	34.836	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	0%	NA	Overlap dg PT. Joloy Mosak (130 ha) masih dlm proses tata batas ulang.	
4	PT. Bumimas Permata Abadi	47.076	S-PHPL & S-LK	ya	tdk	tdk	ya	ya	tdk	tdk	0%	NA		
5	PT. Dwima Jaya Utama	128.448	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	1%	NA		
6	PT. Erna Juliawati	180.322	S-PHPL & S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	5	11%	NA		
7	PT. Erythrina Nugraha Megah	42.236	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	0%	NA		
8	PT. Fitamaya Asmapara	43.184	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	4%	NA		
9	PT. Graha Sentosa Permai	45.984	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	2%	NA		
10	PT. Gunung Meranti	87.544	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	1%	NA		
11	PT. Hasil Kalimantan Jaya	51.522	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	1%	NA		
12	PT. Hutanindo Lestari Raya Timber	92.579	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	2%	NA		
13	PT. Indexim Utama Corp.	52.789	S-PHPL, tdk S-LK	tdk	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	0%	NA		
14	PT. Kahayan Terang Abadi	42.985	S-PHPL & S-LK	tdk	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	0%	NA		
15	PT. Karya Delta Permai	79.134	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	3%	NA		
16	PT. Kayu Tribuana Rama	87.534	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	2%	NA		
17	PT. Kayu Waja	38.363	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	0%	NA		
18	PT. Meranti Mustika	45.530	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	2%	NA		
19	PT. Mitra Perdana Palangka	56.523	S-PHPL, tdk S-LK	tdk	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	0%	NA		
20	PT. Pematang Abaditama	53.128	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	14%	NA		
21	PT. Sarana Piranti Utama	48.340	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	0%	NA		
22	PT. Barito Putera	41.671	hanya S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	20%	NA		
23	PT. East Point Indonesia	51.377	hanya S-LK	ya	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	tdk	0%	NA		
24	PT. Hasnur Jaya Utama	38.195	hanya S-LK	tdk	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	22%	NA	Overlay dg PT. Trisetia Intiga (1,465 ha) masih dlm proses tata batas ulang.	
25	PT. Sari Bumi Kusuma (Unit I dan II)	205.109	hanya S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	9%	NA		
26	PT. Sindo Lumber	37.308	hanya S-LK	tdk	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	0%	NA		
27	PT. Trisetia Intiga	87.303	hanya S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	7	29%	NA	Overlap dg PT.Sindo Lumber (237 ha) masih dlm proses tata batas ulang.	
28	PT. Wana Inti Kahuripan Intiga	92.252	hanya S-LK	tdk	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	tdk	3%	NA		
Kalimantan Timur dan Utara														
1	PT. Adimira Lestari	51.984	S-PHPL, tdk S-LK	ya	tdk	tdk	ya	tdk	tdk	1	4%	1%		
2	PT. Balikpapan Forest Industri	140.844	S-PHPL & S-LK	tdk	tdk	tdk	tdk	ya	tdk	1	11%	20%		



Peta 15.—Konsesi HPH (IUPHHK-HA), deforestasi (atas) di dalam atau di luar area jelajah orangutan dan/atau gajah Kalimantan dan (bawah) berbagai kawasan konservasi di Kalimantan Tengah.



Peta 16.—Konsesi HPH (IUPHHK-HA), deforestasi (atas di dalam dan di luar berbagai kawasan konservasi di Kalimantan Tengah.



Peta 17.—Konsesi HPH (IUPHHK-HA), deforestasi (kiri) di dalam dan diluar area jelajah orangutan dan/atau gajah Kalimantan dan (kanan) berbagai kawasan konservasi di Kalimantan Timur dan Utara.

5. Beberapa Studi Kasus dengan Persoalan terkait Perusahaan Bersertifikat SVLK di Sumatera dan Kalimantan

Pada Bab 3, kajian ini menyorot persoalan yang ditemukan pada standar SVLK yang berlaku saat ini. Pada Bab 4, kajian ini melihat beberapa persoalan untuk semua IUPHHK yang memiliki sertifikat di tujuh provinsi untuk menunjukkan tingkat dan penyebaran persoalan diseluruh sistem sertifikasi. Untuk Bab ini, kajian ini memilih beberapa IUPHHK dan area geografis sebagai contoh kajian untuk menunjukkan beberapa persoalan dengan lebih detail.

5.1. Sertifikat SVLK diterbitkan pada pemegang izin melalui korupsi

Di Provinsi Riau, terdapat 12 perusahaan yang memiliki sertifikat SVLK yang terkait langsung dengan enam pejabat pemerintah yang telah dihukum penjara atau ditahan karena terkait kasus suap perizinan IUPHHK-HT²³ atau persetujuan rencana kerja tahunan (RKT) kepada perusahaan pemasok kayu untuk SMG/APP dan RGE/APRIL^{24, 25, 26, 27, 28} (Tabel 11):

- Tengku Azmun Jafar (TAJ), mantan Bupati Pelalawan, didakwa atas kasus suap dalam pemberian izin IUPHHK-HT dan dihukum 11 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (Nomor Keputusan No. 736 K/Pid.Sus/2009).
 - Arwin A.S (AAS), mantan Bupati Siak, didakwa atas kasus suap dalam pemberian izin IUPHHK-HT dan didakwa 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru.
 - Syuhada Tasman (ST), mantan kepala Dinas Kehutanan Riau tahun 2003, didakwa atas kasus suap dalam persetujuan RKT dan dihukum 5 tahun penjara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru.
 - Asral Rachman (AR), mantan kepala Dinas Kehutanan Riau tahun 2005, didakwa atas kasus suap dalam persetujuan RKT dan dihukum 5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru.
 - Burhanuddin Husein (BH), mantan kepala Dinas Kehutanan tahun 2006, didakwa atas kasus suap dalam persetujuan RKT dan dihukum 2,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru.
 - Rusli Zainal (RZ), mantan Gubernur Riau sedang dalam pengadilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 27 November 2013 dengan dakwaan menerima suap dalam pemberian RKT tahun 2004 sebagai Gubernur yang bukan kewenangannya.
 - Rusli Zainal (RZ), mantan Gubernur Riau dihukum 14 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada 12 Maret 2014 karena terbukti mengeluarkan izin penebangan yang bukan kewenangannya di Riau^[i],^[ii].
-
- ^[i] Jakarta Globe (12 March 2014) Ex-Riau Governor Gets 14 Years Over Logging Permit, National Games Corruption Cases. <http://www.thejakartaglobe.com/news/ex-riau-governor-gets-14-years-logging-permit-national-games-corruption-cases/>
 - ^[ii] Mongabay.com (13 March 2014) Indonesian politician gets 14 years in jail for illegal permits, forest corruption. <http://news.mongabay.com/2014/0313-dparker-zainal-corruption-riau.html>

Tabel 11.—Daftar pemegang sertifikat SVLK di Riau yang izin IUPHHK-HT dan/atau RKT-nya dilakukan oleh pejabat pemerintah yang didakwa melakukan korupsi (lihat daftar diatas). Kerugian Negara dikompilasi oleh Eyes on the Forest berdasarkan berbagai sumber termasuk keputusan pengadilan, “Anti Corruption Clearing House” KPK (<http://acch.kpk.go.id>), blog “Monitoring Korupsi di Riau” yang dikelola oleh LSM Riau dan mahasiswa (<http://riaucorruptiontrial.wordpress.com/>).

Perusahaan bersertifikat SVLK			Status SVLK hingga Agustus 2013	Pemberi izin IUPHHK-HT	Pemberi izin RKT	Perkiraan kerugian negara (milyar rupiah)
Grup	#	Nama				
SMG	9	PT. Satria Perkasa Agung - Serapung	S-PHPL, tdk S-LK	TAJ	RZ	40
SMG	13	PT. Balai Kayang Mandiri	Hanya S-LK	AAS	AR	48
RGE	14	PT. Bina Daya Bintara	Hanya S-LK	AAS	AR	176
RGE	18	PT. Merbau Pelalawan Lestari	Hanya S-LK	TAJ	BH, RZ	109
SMG	19	PT. Mitra Hutani Jaya	Hanya S-LK	TAJ	RZ	61
RGE	21	PT. Mitra Taninusa Sejati	Hanya S-LK	TAJ	ST, BH, RZ	252
SMG	27	PT. Rimba Mandau Lestari	Hanya S-LK	AAS	AR	25
RGE	28	PT. Rimba Mutiara Permai	Hanya S-LK	TAJ	ST, BH, RZ	204
RGE	32	PT. Selaras Abadi Utama	Hanya S-LK	TAJ	ST, BH, RZ	408
RGE	33	PT. Seraya Sumber Lestari	Hanya S-LK	AAS	AR	91
RGE	37	PT. Triomas FDI	Hanya S-LK	TAJ	BH	52
RGE	38	PT. Uni Seraya	Hanya S-LK	TAJ	BH	38

Tahun 2012, “Koalisi Anti Mafia Kehutanan” dari beberapa LSM Indonesia²⁹ meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum terhadap 35 perusahaan pemasok kayu SMG/APP dan RGE/APRIL yang dikonfirmasi maupun diduga telah memberi suap pada pejabat pemerintah untuk menebang habis lebih dari 400.000 ha hutan alam Sumatera³⁰. Pada Februari 2013, KPK menyatakan bahwa pihaknya akan menginvestigasi 14 perusahaan kayu dan pulp tersebut yang terlibat dalam kasus illegal logging dan korupsi di Riau (Tabel 12). Perusahaan yang sama juga telah direkomendasikan oleh tim antar-departemen yang dibentuk oleh Presiden SBY tahun 2008 untuk diinvestigasi secara menyeluruh atas tuduhan melakukan penebangan habis illegal pada hutan yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi, semua kasus tersebut mendadak tidak dilanjutkan ketika ada satu saksi yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan yang menyatakan pada Kejaksaan Riau bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan³¹. Akan tetapi pada tahun 2012, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dibawah Presiden memperkirakan kerugian keuangan Negara dari kerusakan hutan oleh 14 perusahaan yang sama mencapai Rp 2.000 triliun (US\$ 200 milyar) dan Kementerian Lingkungan Hidup secara publik berkomitmen untuk menuntut perusahaan-perusahaan tersebut³².

. Akan tetapi pada tanggal 31 Agustus 2013, tiga perusahaan dari 14 mendapatkan sertifikat PHPL dan tujuh perusahaan mendapatkan sertifikat LK (Tabel 12).

Tabel 12.—Daftar 14 perusahaan kehutanan yang diperiksa oleh pihak kepolisian sejak tahun 2008 Terdapat 10 perusahaan dalam daftar yang telah menerima sertifikat SVLK hingga 31 Agustus 2013.

#	Perusahaan yang memiliki Sertifikat SVLK			Status SVLK hingga 31 Agustus 2013
	Grup	#	Nama	
1	SMG	1	PT. Arara Abadi	S-PHPL, tanpa S-LK
2	SMG	3	PT. Bina Duta Laksana	S-PHPL & S-LK
3	SMG	7	PT. Ruas Utama Jaya	S-PHPL & S-LK
4	RGE	15	PT. Bukit Batabuh Sei Indah	Hanya S-LK
5	RGE	16	PT. Citra Sumber Sejahtera	Hanya S-LK
6	RGE	18	PT. Merbau Pelalawan Lestari	Hanya S-LK
7	RGE	20	PT. Mitra Kembang Selaras	Hanya S-LK
8	RGE	22	PT. Nusa Prima Manunggal	Hanya S-LK
9	SMG	27	PT. Rimba Mandau Lestari	Hanya S-LK
10	SMG	36	PT. Suntara Gajapati	Hanya S-LK
11	RGE		PT. Anugerah Bumi Sejahtera	Bukan HTI
12	SMG		PT. Inhil Hutan Pratama	Tidak memiliki sertifikat SVLK
13	RGE		PT. Madukoro	Tidak memiliki sertifikat SVLK
14	SMG		PT. Wana Rokan Bonai Perkasa	Bukan HTI

Banyak LSM Indonesia yang telah mengkampanyekan kasus korupsi kehutanan di Riau. Gerakan ini dimulai oleh LSM lokal pada tahun 2005³³ kemudian diangkat oleh LSM-LSM tingkat nasional yang membentuk Koalisi Anti Mafia Kehutanan³⁴. Koalisi tersebut berkampanye mendukung KPK untuk menghukum pejabat pemerintah yang terlibat dalam korupsi di bidang kehutanan. Dan kampanye tersebut telah mendapatkan beberapa hasil seperti daftar terdakwa/tahanan yang disebutkan sebelumnya di atas. Tetapi kampanye koalisi agar sistem peradilan untuk meminta perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi yang sama juga turut bertanggung jawab seperti ini belum berhasil^{35, 36}.

Salah satu pengakuan terburuk praktik korupsi di perusahaan-perusahaan kayu Indonesia adalah ketika Uni Eropa menerima sertifikat SVLK yang diberikan pada perusahaan-perusahaan tersebut.

5.2 Sertifikasi SVLK yang dikeluarkan untuk konsesi IUPHHK yang tumpang tindih izin, ada perambahan, konflik tenurial untuk penggunaan lahan non kehutanan seperti kelapa sawit dan pertambangan

Bab 4 membahas secara detail bahwa banyak konsesi IUPHHK yang memiliki sertifikat SVLK ternyata bertumpang tindih lahan dengan penggunaan lahan bukan kehutanan atau tumpang tindih izin. Dua studi kasus diberikan dalam bab ini sebagai contoh.

5.2.1 PT. Austral Byna

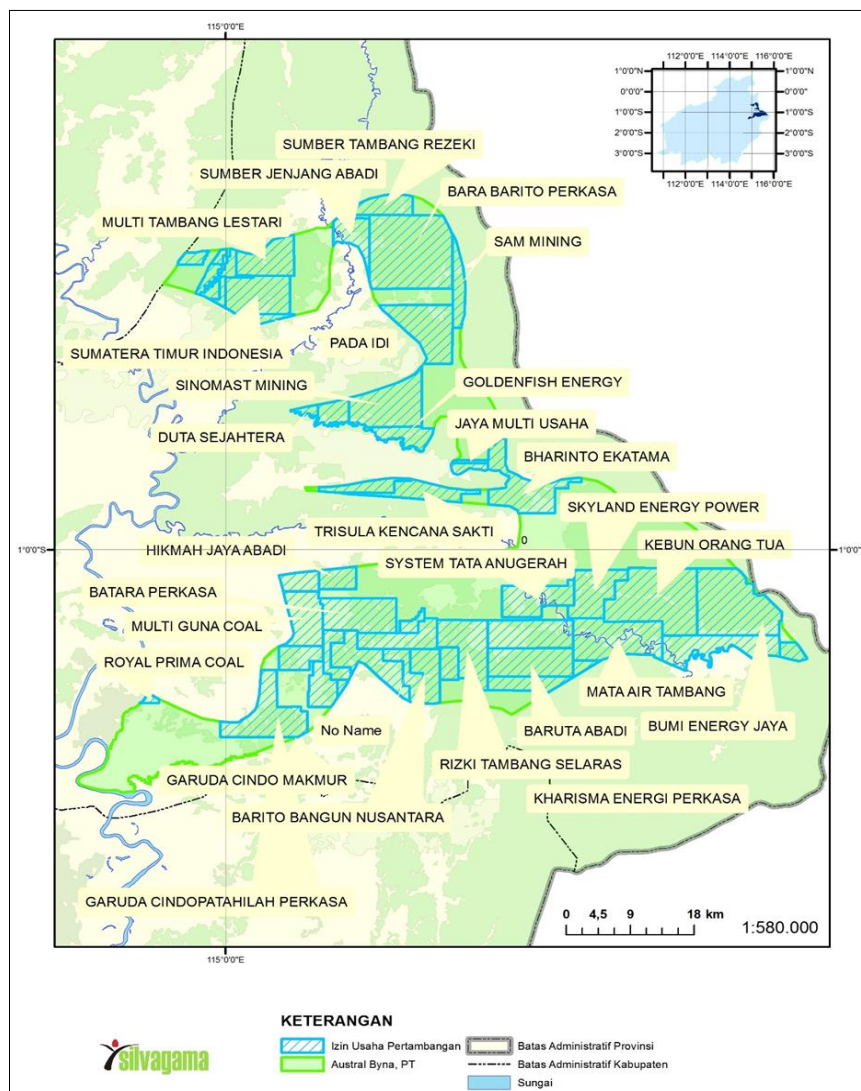
Kabupaten/Provinsi: Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Izin (luas kawasan): izin IUPHHK-HA, SK Menteri Kehutanan No. SK.557/Menhut-II/2009 tanggal 17 September 2009 (255.530 ha)

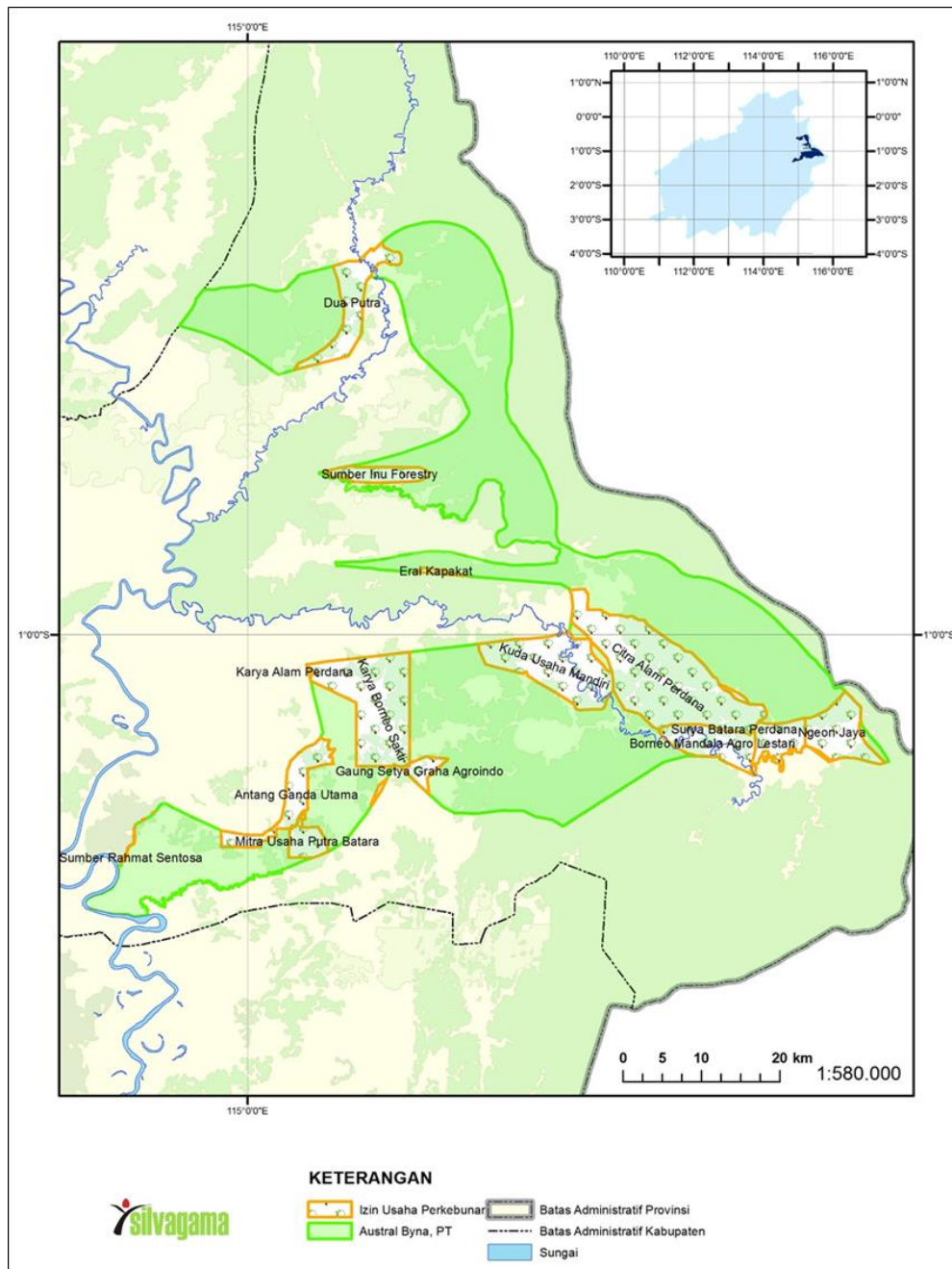
Sertifikat SVLK: BAIK untuk PHPL SertifikatNo. 001/LPPHPL-018/X/2012³⁷, berlaku antara 9 Oktober 2012 dan 8 Oktober 2017.

Lembaga sertifikasi: PT. Transtra Permada

Penyelidikan oleh LSM Silvagama menunjukkan bahwa 88% dari konsesi PT. Austral Byna (AB) diduga tumpang tindih dengan 48 izin pertambangan dengan luas total 155.466 ha (izin pertambangan IUP diberikan dengan Surat Keputusan Bupati Barito Utara) dan dengan izin perkebunan kelapa sawit dengan total luasan 69.171 ha. Selain itu, konsesi IUPHHK tersebut juga tumpang tindih dengan izin perkebunan karet³⁸.



Peta 18.—Tumpang tindih antara PT. Austral Byna dan izin pertambangan.



Peta 19.—*Tumpang tindih antara PT. Austral Byna dengan izin kelapa sawit.*

Penilaian PHPL oleh PT. AB mengacu pada SK Menteri Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2011 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPHH/2011. Terkait dengan tumpang tindih dengan izin lain, auditor PHPL menilai kinerja PT. AB sebagai “SEDANG” untuk indikator 1.1 “Kepastian kawasan pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan” pada kriteria (1) “Prasyarat”, dengan verifier 1.1.3 “Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan”, 1.1.4 “Perubahan fungsi kawasan” and 1.1.5 “Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.”

Fakta bahwa auditor merasa nyaman untuk memberikan nilai “SEDANG” daripada “BURUK” pada perusahaan yang area IUPHHK-nya hampir seluruhnya tumpang tindih dengan izin penggunaan lahan destruktif untuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit menunjukkan adanya ambiguitas yang besar dari panduan standar yang digunakan dan kelemahan standar dengan pengelompokan verifier penting seperti tersebut diatas sebagai “co-dominan” sehingga perusahaan dengan persoalan seperti PT. AB bisa mendapatkan sertifikat (lihat Bab 3.1).



Foto 1.—Satu kegiatan pertambangan di dalam konsesi IUPHHK=HA PT. AB pada koordinat $S0^{\circ}45'37.80''$ $E109^{\circ}48'52.21''$, diambil pada Maret 2013. Foto oleh Silvagama untuk WWF-Indonesia.

5.2.2. PT. Surya Hutani Jaya (SRH)

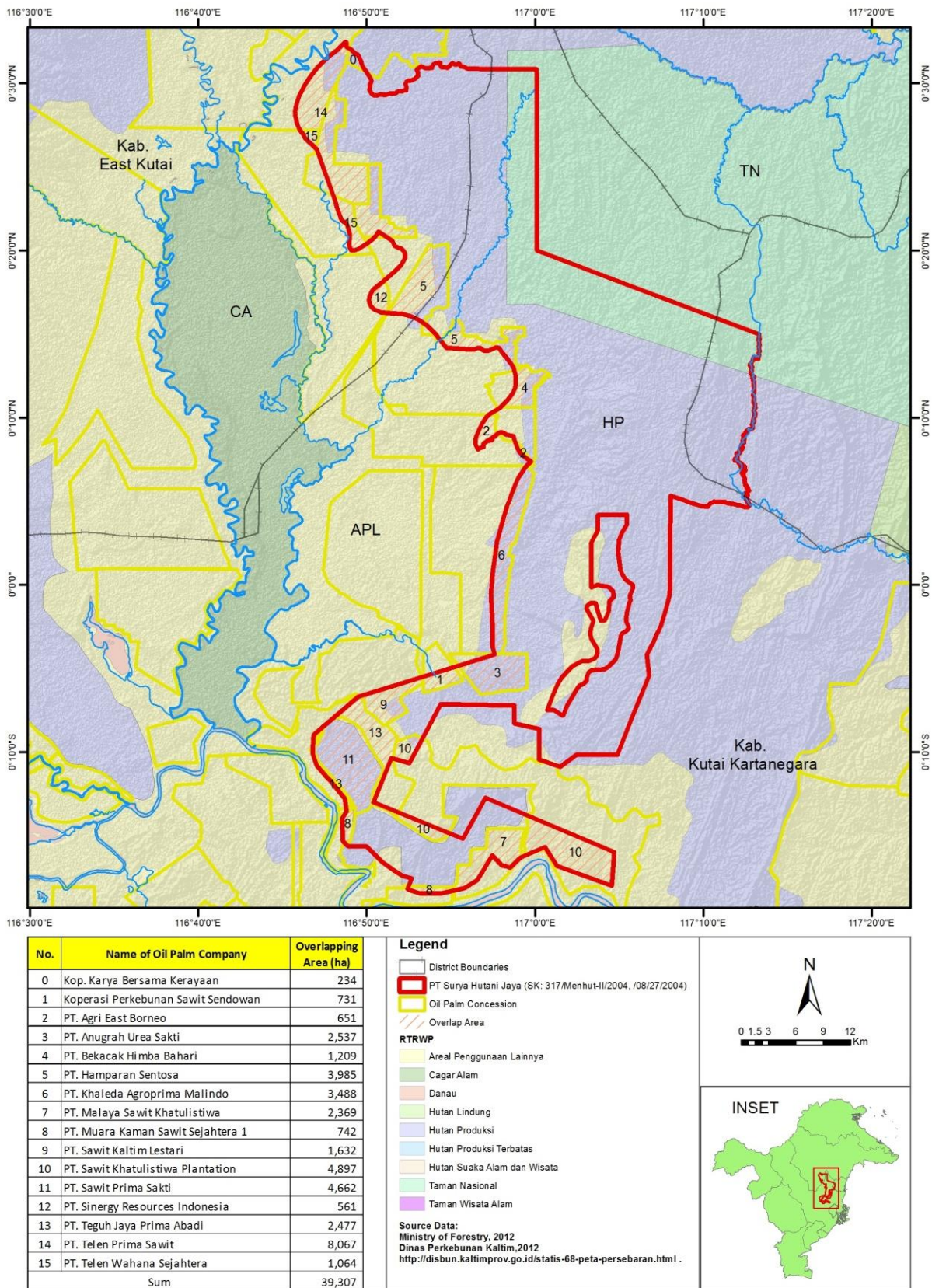
Kabupaten/Provinsi: Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
Izin (luas kawasan): IUPHHK-HT, SK Menteri Kehutanan No. SK.317/Menhut-II/2004 tanggal 27 August 2004 (183,300 ha)
Pembeli/pengguna kayu: Asia Pulp & Paper
Sertifikat SVLK: BAIK untuk sertifikat PHPL No. 02/S. PHPL-RGT/2010³⁹, berlaku antara 15 November 2010 dan 14 November 2013

WWF dan JPIK Kalimantan Timur menemukan IUPHHK PT. SRH tumpang tindih dengan 15 perkebunan kelapa sawit dengan Izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Kartanegara⁴⁰ (Peta 20). Sekitar 20% kawasan perusahaan tumpang tindih dengan izin perkebunan kelapa sawit, sekitar 10% sudah menunjukkan adanya kegiatan non kehutanan (seperti perkebunan kelapa sawit) berdasarkan peta tutupan lahan Kementerian Kehutanan (Tabel 9). Selain itu, analisis GIS dari kajian ini menunjukkan bahwa kawasan perusahaan tumpang tindih dengan taman nasional di timur laut (Peta 20).

Audit PHPL mengacu pada SK Menteri Kehutanan No.P38/Menhut-II/2009 dan peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.02/VI-BPHH/2010. Indikator 1.1 “Kepastian kawasan pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan” terkait dengan isu kawasan IUPHHK dan pemanfaatan yang tumpang tindih dengan sektor non kehutanan dan panduan 2010 cukup jelas bahwa ketika perusahaan mendapat skor BURUK untuk indikator ini. Sayangnya, laporan audit oleh PT. Rensa Global Trust Certification tidak dibuka untuk umum dan publik tidak bisa mengetahui skor sebenarnya yang diberikan untuk indikator ini. Akan tetapi, pada tahun 2010, indikator tersebut masuk dalam klasifikasi “BUKAN KUNCI”. Sehingga, meskipun perusahaan mendapatkan skor BURUK karena banyaknya tumpang tindih izin pembangunan perkebunan kelapa sawit, perusahaan masih dapat mendapatkan sertifikat PHPL.

Sebelum sertifikat PHPL ini berakhir pada November 2013, PT. SRH menerima sertifikat PHPL baru (menggunakan panduan yang sudah direvisi) dari PT. Trustindo Prima Karya, berlaku antara 12 Oktober

2013 dan 11 Oktober 2018⁴¹. Walaupun ada tumpang tindih dengan izin kelapa sawit, PT. SRH tidak mendapatkan skor BURUK untuk masing-masing lima verifiser di Indikator 1.1 yang menunjukkan ambiguitas yang besar dari panduan standar yang berlaku saat ini dan pelemahan standar dengan klasifikasi verifiser penting seperti tersebut di atas sebagai “co-dominan” yang menyebabkan perusahaan dengan persoalan seperti PT. SHK mendapatkan sertifikat (lihat Bab 3.1).



Peta 20.—Tumpang tindih antara PT. Surya Hutani Jaya dengan 15 izin perkebunan kelapa sawit.

5.3 Perbedaan keputusan sertifikat oleh auditor SVLK

5.3.1 PT. Puji Sempurna Raharja (PSR)

Kabupaten/Provinsi: Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Izin (luas kawasan): IUPHHK-HA, SK Menteri Kehutanan No. SK.304/Kpts-II/90 tanggal, 14 Juni 1990, berakhir 13 Juni 2010 (43,950 ha)

Sertifikat SVLK: Tidak ada sertifikat PHPL menurut PT. Sarbi International Certification tetapi skor SEDANG Sertifikat PHPL menurut PT. Nusa Bhakti Mandiri

Tahun 2012, PT. PSR mendapatkan dua audit PHPL dengan hasil yang berbeda:

1. Dilakukan oleh PT. Sarbi International Certification pada Januari 2012. Hasil audit diumumkan pada 28 Februari 2012 yang menunjukkan nilai “BURUK”. Sehingga Sertifikat PHPL tidak diberikan untuk perusahaan tersebut⁴².
2. Dilakukan oleh PT. Nusa Bhakti Mandiri antara Januari dan Mei 2012. Hasil audit diumumkan pada 28 Mei 2012 menunjukkan nilai “BAIK”. Sehingga sertifikat PHPL diberikan⁴³.

Izin IUPHHK-HA PT. PSR diterbitkan pada tahun 1990 dan berakhir tanggal 13 Juni 2010. Pada tahun 2007, PT SRS mengajukan perpanjangan izin⁴⁴, tetapi pada tanggal 16 Juli 2009, Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa persyaratan untuk perpanjangan belum dipenuhi⁴⁵. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2008 tentang perpanjangan izin mensyaratkan PT. PSR untuk memenuhi semua persyaratan termasuk sertifikat PHPL dalam waktu 60 hari sejak deklarasi. Akan tetapi PT. SPR tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut dan tidak dapat memperpanjang izinnya.

PT. SPR meminta Kementerian Kehutanan untuk menunjuk lembaga sertifikasi untuk audit PHPL tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Perusahaan kemudian menunjuk sendiri PT. Sarbi International Certification (PT. SIC) sebagai auditornya. Pada tahun 2011, Kementerian Kehutanan⁴⁶ menyetujui PT. SIC untuk melakukan audit PHPL untuk PT. SPR sebagai auditor dan auditor telah menjelaskan bahwa PT. SPR telah memenuhi semua persyaratan administratif untuk perpanjangan izin, kecuali sertifikat PHPL. Pada tanggal 9 Januari 2012, Kementerian Kehutanan mengeluarkan surat pada Kepala Dinas Kehutanan setempat⁴⁷ untuk menjelaskan latar belakang dan meminta PT. PSR untuk membagi hasil audit PHPL dengan batas waktu Februari 2012.

Pada tanggal 4 Februari 2012, PT. SIC memberikan penilaian final audit PHPL “BURUK”⁴⁸ dan membagi hasilnya dengan Kementerian Kehutanan dengan surat keputusan No.409/SIC/Dirut/II/2012 tertanggal 6 Februari 2012. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.8/VI-BPPHH/2011, PT. PSR memiliki hak menyanggah skor dalam waktu 14 hari sejak surat keputusan disampaikan. Tetapi PT. PSR tidak menggunakan haknya dan PT. SIC mempublikasikan skor final tanpa sanggahan pada tanggal 18 Februari 2012.

Anehnya, lembaga sertifikasi lain, PT. Nusa Bhakti Mandiri (PT. NBM) melakukan audit PHPL tiga bulan kemudian dan mengeluarkan sertifikat PHPL untuk PT. PSR dengan skor akhir “SEDANG” pada tanggal 20 Mei 2012. Akan tetapi Menteri Kehutanan sepertinya tidak mengakui sertifikat kedua ini. Dengan menggunakan hasil audit PT. SIC pada Februari 2012, Kementerian Kehutanan mengeluarkan SK. Menteri Kehutanan No.S.360/Menhut-VI/2012 tertanggal 23 Agustus 2012, menolak memberikan izin perluasan dan mengumumkan penghapusan izin. PT. NBM tidak lagi memiliki klien audit PHPL lain sejak Januari 2013⁴⁹. Akreditasi mereka dibekukan oleh KAN pada Mei 2012 dan ditarik pada November 2013 oleh Badan Standarisasi Nasional⁵⁰.

PT. SIC dan PT. NBM keduanya diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan seharusnya memahami dan melaksanakan peraturan yang sama dalam melakukan audit kinerja PHPL PT. PSR dalam jangka waktu hanya tiga bulan dari waktu masing-masing audit. Kasus ini menunjukkan bahwa tampak mudah bagi perusahaan pengelola hutan untuk mendapatkan sertifikat PHPL selama perusahaan dapat menemukan auditor yang mau memberikan nilai audit tanpa perubahan kinerja perusahaan sebenarnya (PT. PSR belum beroperasi sejak izin IUPHHK-nya berakhir, sehingga tidak mungkin kinerjanya dapat berubah). Sebagaimana dijelaskan pada Bab 3.1, ambiguitas standar dan panduan SVLK memungkinkan adanya perbedaan interpretasi.

5.4. Sertifikat SVLK yang diterbitkan untuk konsesi HTI dengan persoalan hak asasi manusia/konflik lahan

5.4.1 PT. Suntura Gajapati (SGP)

Kabupaten/Provinsi: Kota Dumai, Provinsi Riau

Izin (luas kawasan): IUPHHK, SK Menteri Kehutanan No. SK.71/Kpts-II/2001 tertanggal 15 Maret 2001 (34,792ha)

Pembeli/pengguna kayu: Asia Pulp & Paper

Sertifikat SVLK: Sertifikat LK 824 303 120008⁵¹, berlaku antara 9 Juli 2012 dan 8 Juli 2015

Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: PT. TUV Rheinland Indonesia

Sebelum sertifikat SVLK dikeluarkan tanggal 29 Juni 2012, seorang warga setempat bernama Supratmin ditemukan meninggal dengan luka-luka bengkok di kanal gambut di dalam konsesi PT. SGP^{52, 53, 54, 55}. Komisi HAM Nasional menyelidiki kasus tersebut dan pada September 2012 menyimpulkan sementara bahwa kematian tersebut bukan karena penyebab alami mengingat terjadinya konflik antara perusahaan dengan kelompok petani lokal terkait hak petani atas lahan⁵⁶. Pada saat yang bersamaan, kepolisian setempat (Dumai) memberikan pernyataan yang berlawanan dengan menyatakan bahwa kepolisian telah memeriksa mayat tetapi tidak menemukan bukti apapun⁵⁷.

Menurut ketua kelompok tani lokal, Supratmin dan dua petani dikejar oleh petugas keamanan perusahaan setelah ketiganya menebang pohon akasia yang ditanam perusahaan. Kedua petani kemudian ditahan polisi setempat dan Supratmin kemudian ditemukan telah meninggal. Komisi HAM Nasional meminta kepolisian setempat untuk membebaskan kedua petani yang telah ditahan dan bertekad untuk terus melakukan penyelidikan. Akan tetapi kejadian tersebut tidak pernah dibawa ke pengadilan. Konflik antara perusahaan dan kelompok petani lokal belum terselesaikan hingga saat ini.

5.4.2 PT. Sumatera Riang Lestari (SRL) – Blok Pulau Rupert (blok IV)

Kabupaten/Provinsi: Pulau Rupert, Provinsi Riau

Izin (luas kawasan): IUPHHK-HT, SK Menteri Kehutanan No. SK.262/Menhut-II/2004 tertanggal 21 Juli 2004 jo SK.99/Menhut-II/2006 tertanggal 11 April 2006 jo SK.208/Menhut-II/2007 tertanggal 25 Mei 2007 (215,305ha) (ini ini meliputi bukan hanya Blok IV Pulau Rupert)

Pembeli/pengguna kayu: Asia Pacific Resources International Limited

Sertifikat SVLK: BAIK untuk Sertifikat PHPL No. 09-SIC-04.01⁵⁸, berlaku antara 3 Juni 2011 dan 2 Juni 2014

Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: PT. Sarbi International Certification

Perusahaan tengah berkonflik dengan masyarakat tempatan karena perusahaan telah memperluas operasinya tanpa konsultasi dengan masyarakat. Tidak lama setelah sertifikat PHPL dikeluarkan pada November 2011, beberapa alat berat perusahaan dibakar oleh massa yang marah yang memprotes perusahaan yang ingkar janji. Seperti biasa, pejabat keamanan digunakan sebagai “mediator” antara perusahaan dan masyarakat dalam situasi konflik seperti ini^{59, 60}.

SRL juga merupakan kasus yang menarik untuk diskusi SVLK karena kurangnya “kebijakan asosiasi” dari standar SVLK. Sertifikat PHPL-nya dikeluarkan hanya untuk sebagian dan bukan keseluruhan area konsesi. Awalnya perusahaan mencoba untuk mendapatkan sertifikat PHPL untuk enam blok konsesi di Riau dan Sumatera Utara dengan total luasan 220.000 ha. Akan tetapi pada Mei 2011, auditor (PT. Sarbi International Certification) memutuskan untuk tidak memberikan sertifikat karena perusahaan tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan isu-isu sosial^{61, 62}. SRL kemudian mengajukan penilaian ulang dengan mengeluarkan dua blok (Blok II - Estate Garingging dan Blok III - Estate Kubu) yang tidak lolos verifikasi legalitas. Auditor akhirnya mengeluarkan sertifikat PHPL untuk blok yang lainnya, termasuk blok Pulau Rupert^{63, 64}. Ini berarti bahwa produk dari perusahaan berizin dan telah dinilai tetapi memiliki blok yang ditolak masih dapat dikirim ke Uni Eropa dan pembeli tidak mungkin dapat membedakan produk tersebut.

5.4.3. PT. Wira Karya Sakti (WKS)

Kabupaten/Provinsi: Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi

Izin (luas kawasan): IUPHHK-HT, SK Menteri Kehutanan No. 346/Menhut-II/2004 tertanggal 10 September 2004 (293.812ha)

Pembeli/pengguna kayu: Asia Pulp & Paper

Sertifikat SVLK: 824 303 120001, berlaku antara 14 April 2012 dan 13 April 2015

Lembaga yang mengeluarkan sertifikat: PT. TUV Rheinland Indonesia

Persatuan Petani Jambi (PPJ) pada Februari 2013 menuduh perusahaan melakukan penyiksaan dan menyebabkan konflik sosial saat supplier serat APP mengambil 41.000 ha lahan milik 14.000 KK di lima kabupaten di Provinsi Jambi⁶⁵.

PT. WKS, sama seperti perusahaan lain, telah dituduh memobilisasi tentara dan polisi selama pengambilalihan lahan penduduk atau selama protes masyarakat. Pada November 2010, seorang petani ditemukan tewas ditembak polisi saat protes berdarah di Sungai Pengabuan terhadap pengambilalihan lahan seluas 7.224 ha oleh supplier SMB/APP yang diklaim oleh penduduk Senyerang sejak tahun 2001⁶⁶. Pada Juli 2013, PT. WKS dibantu oleh Kementerian Kehutanan mencari penyelesaian konflik di Desa Senyerang dengan memberikan 4.000 ha lahan kepada 2.000 petani (masing-masing 2 ha)⁶⁷. Akan tetapi perusahaan belum menyelesaikan banyak konflik lainnya dengan masyarakat lokal di Provinsi Jambi⁶⁸.

PT. WKS juga turut bertanggung jawab atas hancurnya hutan tradisional milih Masyarakat Adat Orang Rimba⁶⁹,
⁷⁰.

6. Kesimpulan

Studi ini mengevaluasi apakah Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu yang ada saat ini berlaku dan pelaksanaan sertifikat Legalitas Kayu (LK), Tata Kelola Produksi Lestari (PHPL) dan sertifikat V-Legal bisa memberikan jaminan legalitas dan kelestarian dari produk kayu Indonesia. Apakah sistem SVLK memberikan jaminan yang kredibel untuk legalitas produk bersertifikat sehingga pantas mendapatkan izin FLEGT?

Studi ini menyimpulkan bahwa sistem SVLK dalam bentuknya yang sekarang tidak memberikan jaminan yang kredibel bagi pemerintah pengimport atau perusahaan untuk mendapatkan produk yang legal dan atau lestari. Sertifikat SVLK diberikan seadanya dan tidak ditujukan untuk mempromosikan tata kelola hutan lestari. Peningkatan harus segera dilakukan.

Studi ini menemukan beberapa kekurangan sebagai berikut:

- **Implementasi kewajiban dalam sertifikasi SVLK lemah:** meskipun faktanya seluruh pemegang izin konsensi (IUPHHK-HT untuk konsensi tanaman industri, IUPHHK-HA untuk konsensi penebangan selektif, atau IUPHHK-RE untuk konsensi restorasi ekosistem) harus memiliki sertifikat PHPL sebelum 31 Desember 2013, di lapangan hanya satu pertiga dari seluruh pemegang izin dan hanya setelah dari wilayah konsensi yang menerima PHPL dan atau Sertifikat LK sampai dengan 31 Agustus 2013
- **Standar SVLK memiliki kelemahan serius dengan membiarkan pemilik sertifikat beroperasi tidak sesuai dengan sejumlah aturan pemerintah dan atau sangat tidak lestari:** hal ini sebagian besar berkaitan dengan definisi dari standard SVLK dan pedoman pelaksanaannya yang terus dilemahkan sejak pertama dibuat tahun 2009. Pelemahan tersebut termasuk:
 - Audit PHPL dan LK, scoring dan penggolongan tampaknya dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mungkin gagal mendapatkan sertifikasi.
 - Tidak mempertimbangkan relevansi SLVK dengan peraturan dan perundangundangan non-kehutanan.
 - Tidak mempertimbangkan tindakan korupsi dalam proses perolehan perizinan.
 - Lacak balak dan asosiasi kelompok tidak dipertimbangkan: tidak ada keterkaitan antara konsensi bersertifikat dan fasilitas pengolahan bersertifikat.
 - Tidak mempertimbangkan pelanggaran hak asasi manusia/konflik lahan.
 - Lemahnya proses audit.
- **Operasional dari perusahaan pemilik sertifikasi SVLK memiliki masalah serius soal legalitas dan kelestariannya:** Tujuh puluh tiga persen dari pemilik Sertifikat SLVK adalah area konsensi HTI dan 80% perusahaan penerima sertifikat adalah milik penyedia untuk dua perusahaan raksasa : Sinar Mas dan Royal Golden Eagle. Ada banyak isu seputar kelestarian dan legalitas dari kedua perusahaan besar ini. Rincian GIS mendukung analisa dari semua konsensi bersertifikat LK atau PHPL di tujuh provinsi di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan penyebaran isu soal legalitas dan kelestarian yang tidak hanya menyangkut dua grup perusahaan besar di atas tapi juga perusahaan pemegang sertifikat lainnya, termasuk kasus :
 - Izin konsensi diperoleh melalui praktek korupsi.
 - Penggundulan hutan memusnahkan habitat satwa liar yang dilindungi.
 - Pembukaan lahan hutan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter.
 - Deforestasi di dalam area hutan dilindungi oleh hukum.
- **Lemahnya lacak balak dan verifikasi terhadap asosiasi perusahaan tidak menjamin pengeluaran isu kayu yang terkait masalah legalitas dan kelestariannya:** SVLK sepenuhnya kurang dalam sistem verifikasi lacak balak yang berarti dokumen V-Legal tidak menjamin bahwa produk kayu yang diekspor dari Indonesia eksklusif terbuat dari hutan lestari dan bahan baku legal. Sebuah perusahaan yang proses keseluruhan produksinya bersertifikat SVLK mungkin dalam rantai pasokannya bersumber dari kayu

yang ilegal dan atau tidak Lestari. Rancangan SVLK dibangun untuk tidak bisa mendeteksi kayu yang tercampur menjadi produk akhir yang diekspor.

- **Monitoring independent yang tidak efektif:** Tidak ada pihak ketiga independen yang memonitor secara efektif ataupun ada peningkatan kualitas dari sistem ini. Keterlibatan masyarakat sipil dan akses menuju process audit dan data terlalu sulit.

Studi ini merekomendasikan untuk SVLK menjadi sistem yang lebih kuat sejalan Indonesia dan pemerintahan Uni Eropa yang bekerja ke arah yang sama, sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan yang saling berkaitan antara pengembangan sistem dan implementasinya:

1. Secara umum standard dan pedoman pelaksanaannya mengalami peningkatan termasuk dalam definisi “legalitas kayu” dan kelestarian, kriteria audit, indikator performa/verifikasi, pelaksana verifikasi dan skema penggolongan.
2. Semua sertifikat yang sudah dikeluarkan perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan standard yang telah diperbaharui dan harus dikeluarkan ulang sertifikatnya.
3. Auditor dan badan verifikasi dibentuk dengan standard tertinggi melalui audit independen dan verifikasi pihak ketiga yang independen.
4. Standar ini mengadopsi sistem lacak balak yang mengharuskan semua produk bersertifikat berasal dari sumber yang operasionalnya juga bersertifikat.
5. Transparansi proses ditingkatkan dan masyarakat sipil sebagai pengawas diberikan akses ke setiap langkah dalam proses SVLK.

Lampiran 1. Data yang dikumpulkan dan dianalisis

Kementarian Kehutanan tidak melakukan update database online SVLK secara teratur. Kemungkinan lebih banyak sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian. Dengan mencoba memeriksa sebanyak mungkin sertifikat, kajian ini mengumpulkan data IUPHHK dan sertifikat dari beberapa sumber yang berbeda. Hasilnya, kajian ini mengumpulkan database online yang paling komprehensif dari sistem sertifikasi SVLK Indonesia saat ini. Kajian ini mencoba untuk mengurangi kesalahan. Akan tetapi kajian ini tidak bisa menjamin kebenaran data dari sumber. Satu contoh yang dikutip pada Bab 5.3 tentang suatu perusahaan yang sertifikat SVLK-nya diterbitkan oleh auditor walaupun tidak diakui oleh Kementerian Kehutanan. Dengan mempertimbangkan adanya kesalahan dari database ini, diminta kesediaan pembaca untuk memeriksa sebanyak mungkin data dan semua masukan dan perbaikan sangat diterima. Kajian ini juga memverifikasi informasi baru dan melakukan pemutakhiran database yang berhasil dikumpulkan.

Data IUPHHK-HT/HA

- Kementerian Kehutanan, Indonesia (2009) publikasi data IUPHHK pada dan diunduh dari Peta Interaktif Online Kementerian Kehutanan (WebGis Kehutanan <http://webgis.dephut.go.id>).
- Kementerian Kehutanan, Indonesia (2011) Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2011. (<http://www.dephut.go.id/files/Buku%20Data%20dan%20Informasi%20Pemanfaatan%20Hutan%20Tahun%202012.pdf>)
- Kementerian Kehutanan (2012) Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2012. (<http://www.dephut.go.id/uploads/files/Buku%20Pemanfaatan%20Final%202012.pdf>)
- Pemerintah Provinsi Jambi Dinas Kehutanan (Januari 2009) Data Statistik Semester II (Kedua) Periode Bulan Juli 2008 S/D Desember 2008. http://www.dephut.go.id/files/stat_dishutJambi_II08_0.pdf
- BP2HP Wilayah XIII Samarinda (2013) Daftar IUPHHK Hutan Tanaman Sampai Dengan Bulan Nopember 2012.
- Data dan Informasi Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur. <http://www.dephut.go.id/INFORMASI/INFPROP/Inf-Ktim.PDF>
- Data dan Informasi Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat. <http://www.dephut.go.id/INFORMASI/INFPROP/Inf-klbr.pdf>
- Data dan Informasi Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah. <http://www.dephut.go.id/INFORMASI/INFPROP/INF-KTGH.PDF>
- Peta konsesi perusahaan pemasok Asia Pulp & Paper yang dipublikasikan di Asia Pulp & Paper Forest Conservation Policy Dashboard (<https://tfttest.chainfood.com/>, silakan hubungi perusahaan untuk username /password). Beberapa batas perusahaan pada peta APP berbeda dari yang dipublikasikan oleh Kementerian Kehutanan. Akan tetapi peta yang dipublikasikan APP pada dashboard berkualitas rendah dan tidak bisa memberikan proyeksi yang bagus sehingga kajian ini menggunakan batas dari Kementerian Kehutanan.
- Investigasi yang dilakukan oleh Eyes on the Forest, KKI Warsi, RPHK, Silvagama dan WBH.

Area jelajah satwaliar

- Wibisono, H.T. & W. Pusparini (2010) Review: Sumatran tiger (*Panthera tigris sumatrae*): A review of conservation status. Integrative Zoology 2010 (5) 313-323. http://www.dephut.go.id/files/Gajah%20Action%20Plan%20Final%20Akhir%20CETAK%20FINAL_0.pdf
- Kementerian Kehutanan (2007) Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007-2017. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam - Departemen Kehutanan RI. http://www.dephut.go.id/files/Gajah%20Action%20Plan%20Final%20Akhir%20CETAK%20FINAL_0.pdf
- Orangutan range 2011 in and around Bukit Tigapuluh National Park: Frankfurt Zoological Society.
- Caldecott, J. & L. Miles (Eds) (2005) World Atlas of Great Apes and Their Conservation. Prepared at the UNEP World Conservation Monitoring Centre. University of California Press, Berkeley, USA. http://www.cms.int/publications/pdf/world_atlas_great_apes/english.pdf

Kawasan dan kedalaman gambut

- Wahyunto, S. Ritung dan H. Subagio (2003). Peta Luas Sebaran Lahan Gambut dan Kandungan Karbon di

Pulau Sumatera / Maps of Area of Peatland Distribution and Carbon Content in Sumatera, 1990 – 2002. Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC).

<http://www.wetlands.or.id/PDF/buku/Atlas%20Sebaran%20Gambut%20Sumatera.pdf>

- Laumonier, Y. (1997) The Vegetation and Physiography of Sumatra. Kluwer Academic Publishers. Laumonier, Y. (1983) International Map of the Vegetation. "Southern Sumatra". 1:1.000.000. Institut de la Carte Internationale de la Végétation, Toulouse, France and SEAMEO-BIOTROP, Bogor, Indonesia.
 - Wahyunto, S. Ritung dan H. Subagjo (2004). Peta Sebaran Lahan Gambut, Luas dan Kandungan Karbon di Kalimantan / Map of Peatland Distribution Area and Carbon Content in Kalimantan, 2000 – 2002. Wetlands International - Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC).
- <http://www.wetlands.or.id/PDF/buku/Atlas%20Sebaran%20Gambut%20Kalimantan.pdf>

Rencana tata ruang dan kawasan konservasi

- *Provinsi Riau:* TGHK Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan (Tata Guna Hutan Kesepakatan/TGHK). Map published at: <http://www.dephut.go.id/halaman/Peta%20Tematik/Tghk/TGRIAU.GIF>
- *Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan:* Padu Serasi.
- *Provinsi Kalimantan Barat:* Padu Serasi.
- *Provinsi Kalimantan Tengah:* TGHK.
- *Provinsi Kalimantan Timur dan Utara:* Padu Serasi / Penetapan kawasan dari Kementarian Kehutanan (2001).

Titik api

- NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management Sistem). MODIS Hotspot / Active Fire Detections <http://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-data/firms>

Tutupan lahan termasuk tutupan hutan alam

- *Tutupan lahan Sumatera 2012:* WWF-Indonesia (2013) Peta tutupan lahan 2012.
- *Tutupan lahan Kalimantan 2011:* Kementerian Kehutanan Penutupan Lahan 2011, diunduh dari peta interaktif <http://appgis.dephut.go.id/appgis/download.aspx> on 23 October 2013.
- *Tutupan hutan Kalimantan 2009 – 2012:* WWF-Indonesia (2013) Peta tutupan hutan berdasarkan citra MODIS.

Izin kelapa sawit dari Kalimantan Timur dan Utara

- Dinas Perkebunan Propinsi Kaltim (2012) <http://disbun.kaltimprov.go.id/statis-68-peta-persebaran.html> (JPG peta diunduh dari laman tersebut kemudian didigitasi)

Lampiran 2: Kunci Isu Legalitas terkait dengan Kehutanan yang lestari pada pemegang IUPHHK-HA/HT yang beroperasi selama lebih dari 5 tahun, undang-undang dan peraturan Indonesia yang relevan dan indikator PHPL atau LK SVLK berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan terdapat di Tabel 6.

Masalah legalitas kunci terkait kehutanan yang lestari	Undang-undang dan peraturan Indonesia yang relevan	Indikator S-PHPL yang relevan	Indikator S-LK yang relevan
1. Hilangnya hutan alam di dalam habitat jenis yang hampir punah dan dilindungi, seperti gajah, harimau dan orangutan Sumatera dan orangutan dan gajah Kalimantan.	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. • UU Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan <i>United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Keanekaragaman Hayati)</i>. • PP Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan Dan Satwa. • PP No 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar. • Permenhut 48/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar. • Permenhut 57/Menhut-II/2008 Tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018. • Permenhut P.42/Menhut-II/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Harimau Sumatera. • Permenhut P.43/Menhut-II/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Badak 2007- 2017. • Permenhut P.44/Menhut-II/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Gajah Kalimantan 2007 -2017. • Permenhut P.53/Menhut-IV/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007 – 2017. 	Indikator 1.4, 3.3 dan/atau 3.4, 3.5, 3.6.	Tidak ada indikator
2. Hilangnya hutan alam dari gambut dengan kedalaman lebih dari 3 m..	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang • Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. • Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 Tentang: Pengelolaan Kawasan konservasi. 	Indikator 1.4 & 3.1.	Tidak ada indikator
3. Hilangnya hutan alam di Hutan Produksi Terbatas, Hutan/Kawasan Lindung dan Kawasan Konservasi (seperti Taman Nasional, Suaka Margasatwa) berdasarkan rencana tata ruang yang digunakan saat ini.	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. • Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan. Penjelasan UU Kehutanan Nomor 41 tahun 1999, Pasal 28, Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam. 	Indikator 1.4, 3.1.	Tidak ada indikator

4. Kejadian kebakaran.	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Pasal 8 ayat 2 " Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan, dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin yang bersangkutan. Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 8 UU 45/2004 meliputi antara lain bagian b). mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam; 	Indikator 3.2.	Tidak ada indikator
5. Korupsi dalam mendapatkan izin.	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 	Tidak ada indikator	Tidak ada indikator
6. Adanya perkebunan/ ladang non kehutanan di dalam konsesi .	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/95 jo SK Nomor 246/1996 jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 tahun 2006 Tentang Pengaturan Tata Ruang Hutan Tanaman Industri, (1) Luas areal tanaman pokok ditetapkan + 70 % dari suatu unit areal HTI; (2) Luas areal tanaman unggulan ditetapkan + 10 % dari suatu unit areal HTI; (3) Luas areal tanaman kehidupan ditetapkan + 5 % dari suatu unit areal HTI; (4) Luas areal konservasi ditetapkan + 10 % dari suatu unit areal HTI; (5) Luas areal untuk sarana/prasarana ditetapkan + 5 % dari suatu unit areal HTI. 	Indikator 2.1.	Tidak ada indikator
7. Tumpang tindih dengan izin lain, seperti perkebunan kelapa sawit.	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Pasal 51 A (1) Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang 	Indikator 1.1.	Tidak ada indikator

Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri.

- **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2012** Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Pasal 25A
 - (1) Kegiatan usaha Pertambangan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Menteri.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004** Tentang Perlindungan Hutan.

Lampiran 2. Perusahaan IUPHHK-HT yang memiliki sertifikat wajib SVLK di Indonesia.

RIAU

Pemegang SVLK			Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
Group	#	Nama			Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
SMG	1	PT. Arara Abadi	362.886	S-PHPL , tanpa S-LK	07-SIC-04.0 1	2011/4/16	2014/4/15	PT. Sarbi International Certification	Baik	-	-	-	-	http://www1.dephut.go.id/files/HasilAuditPHPL_PTAraAbadi2011.pdf
SMG	2	PT. Bina Daya Bentala	20.386	S-PHPL & S-LK	013/EQC-PH PL/VI/2013	2013/6/29	2018/6/28	PT. Equality Indonesia	Baik	009/EQC-VLK /VII/2012	2012/7/2	2015/7/1	PT. Equality Indonesia	S-PHPL Wajib: http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_phpl/29_Hasil_PHPL_PT_Bina_Daya_Bentala_.pdf S-LK: http://www.dephut.go.id/uploads/apl/HasilAuditVLK_PT_Binadaya_Bentala_.pdf
SMG	3	PT. Bina Duta Laksana	29.200	S-PHPL & S-LK	007/EQC-PH PL/XI/2011	2011/11/25	2014/11/24	PT. Equality Indonesia	Baik	004/EQC-VLK /XI/2011	2011/11/25	2014/11/24	PT. Equality Indonesia	S-PHPL Wajib: http://www.dephut.go.id/uploads/apl/10_PT_Ruas_Utama_Jaya_.pdf S-LK: http://www.dephut.go.id/uploads/apl/HasilAuditVLK_PT_Ruas_Utama_Jaya_.pdf
SMG	4	PT. Bukit Batu Hutani Alam	33.057	S-PHPL , tanpa S-LK	03-SIC-04.1 0	2011/1/15	2014/1/14	PT. Sarbi International Certification	Baik	-	-	-	-	S-PHPL Wajib: http://sic.sarbigroups.com/index.php?option=com_content&view=article&id=122%3Ahasil-penilaian-pt-bukit-batu-hutani-alam&catid=44%3Akehutanan&limitstart=2 S-PHPL Sukarela: http://www.certipedia.com/certificates/TRID-PHTL-0005?locale=en
SMG	5	PT. Perawang Sukses Perkasa Industri	54.472	S-PHPL , tanpa S-LK	005.1/EQC- PHPL/VIII/20 12	2012/8/24	2013/12/28	PT. Equality Indonesia	Baik	-	-	-	-	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/10c_PT_Perawang_Sukses_Perkasa_Industri_.pdf
RGE	6	PT. RAPP	345.792	S-PHPL , tanpa S-LK	LPPHPL-008 /MUTU/FM-0 01	2010/10/20	2013/10/19	PT. Mutu Certification International	Baik	-	-	-	-	Tidak ditemukan online. Terdaftar di: http://www.mutucertification.com/assets/modules/content/files/jurnal-phpl_sep-2012.pdf
SMG	7	PT. Ruas Utama Jaya	44.773	S-PHPL & S-LK	009/EQC-PH PL/V/2012	2012/5/21	2015/5/20	PT. Equality Indonesia	Baik	005/EQC-VLK /II/2012	2012/2/9	2015/2/8	PT. Equality Indonesia	S-PHPL Wajib: http://www.dephut.go.id/uploads/apl/10_PT_Ruas_Utama_Jaya_.pdf S-LK: http://www.dephut.go.id/uploads/apl/HasilAuditVLK_PT_Ruas_Utama_Jaya_.pdf

SMG	8	PT. Satria Perkasa Agung	75.253	S-PHPL , tanpa S-LK	004/EQC-PH PL/XII/2010	2010/12/29	2013/12/28	PT. Equality Indonesia	Baik	-	-	-	-	S-PHPL Wajib: http://www.dephut.go.id/uploads/files/hasilauditPHPL_pt SatriaPerkasaAgung_2011.pdf S-PHPL Sukarela (PHTL-LEI): Tidak ditemukan online.
SMG	9	PT. Satria Perkasa Agung - Serapung	11.867	S-PHPL , tanpa S-LK	001.1/EQC-PHPL/VII/2012	2012/7/25	2013/11/10	PT. Equality Indonesia	Baik	-	-	-	-	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/10b. PT . Satria Perkasa Agung Unit Serapung .pdf
SMG	10	PT. Sekato Pratama Makmur	44.782	S-PHPL , tanpa S-LK	PHPL 0001	2010/12/1	2013/11/30	PT. Sucofindo	Not found	-	-	-	-	S-PHPL Wajib: Tidak ditemukan online. S-PHPL Sukarela: http://www.certipedia.com/certificates/TRID-PHTL-0006?locale=en
RGE	11	PT. Sumatera Riang Lestari	107.416	S-PHPL , tanpa S-LK	09-SIC-04.01	2011/6/3	2014/6/2	PT. Sarbi International Certification	Baik	-	-	-	-	http://www.dephut.go.id/uploads/files/HasilAuditPHPLSumateraRiangLestari_062011.pdf
RGE	12	PT. Wananugraha Bina Lestari	8.841	S-PHPL , tanpa S-LK	LPPHPL-008 /MUTU/FM-003	2011/8/4	2014/8/3	PT. Mutu Agung Lestari	Baik	-	-	-	-	Tidak ditemukan online. Terdaftar di http://www.dephut.go.id/uploads/files/2c.%20Daftar%20Sertifikat%20PHPL%20IUPHHK-HTI.pdf
SMG	13	PT. Balai Kayang Mandiri	21.211	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	824 303 120007	2012/7/6	2015/7/5	PT. TUV Rheinland Indonesia	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/7f. PT . Balai Ka yang Mandiri .pdf
RGE	14	PT. Bina Daya Bintara	6.029	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	042/EQC-VLK /III/2013	2013/3/24	2016/3/23	PT. Equality Indonesia	Tidak ditemukan online. Terdaftar di http://www.equalityindonesia.com/index.php/pengumuman/realisasi-penilaian/hasil-vlk
RGE	15	PT. Bukit Batabuh Sei. Indah	14.604	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	LVLK-003/MU TU-LK-089	2013/1/8	2016/1/7	PT. Mutu Certification International	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/3d. PT . Bukit Be tabuh Sei Indah MAL .pdf
RGE	16	PT. Citra Sumber Sejahtera	15.423	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	LVLK-003/MU TU-LK-090	2013/1/8	2016/1/7	PT. Mutu Certification International	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/3e. PT . Citra Su mber Sejahtera MAL .pdf
RGE	17	PT. Eka Wana Lestari Dharma	9.485	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	044/EQC-VLK /III/2013	2013/3/28	2016/3/27	PT. Equality Indonesia	Tidak ditemukan online. Terdaftar di http://www.equalityindonesia.com/index.php/pengumuman/realisasi-penilaian/hasil-vlk
RGE	18	PT. Merbau Pelalawan Lestari	6.472	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	LVLK-003/MU TU-LK-087	2013/1/8	2016/1/7	PT. Mutu Certification International	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/3f. PT . Merbau Pelalawan Lestari MAL .pdf
SMG	19	PT. Mitra Hutani Jaya	9.672	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	0003/MHI-VL KH	2012/11/14	2015/11/13	PT. Mutu Hijau Indonesia	Tidak ditemukan online. Terdaftar di: http://www.mutuhijau.com/index.php?option=com_client &catid=43&Itemid=173
RGE	20	PT. Mitra Kembang Selaras	14.737	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	LVLK-003/MU TU-LK-088	2013/1/8	2016/1/7	PT. Mutu Certification International	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/3g. PT . Mitra Ke mbang Selaras MAL .pdf
RGE	21	PT. Mitra Taninusa Sejati	7.617	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	05-SIC-04.02	2012/12/3	2015/12/2	PT. Sarbi International Certification	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/9. PT . Mitra Tan inusa Sejati .pdf

RGE	22	PT. Nusa Prima Manunggal	4.325	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	Not found	2013/4/19	2016/4/19	PT. Mutu Certification International	Tidak ditemukan
RGE	23	PT. Nusa Wana Raya	23.893	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	06-SIC-04.02	2012/12/12	2015/12/11	PT. Sarbi International Certification	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/9. PT . Nusa Wana Raya .pdf
SMG	24	PT. Riau Abadi Lestari	15.831	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	05/A-SERT-V LK/XII/2012	2012/12/14	2015/12/13	PT. Ayamaru Sertifikasi	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/4b. PT . Riau Abadi Lestari .pdf
SMG	25	PT. Riau Indo Agropalma	9.704	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	026/EQC-VLK /XII/2012	2012/12/21	2015/12/20	PT. Equality Indonesia	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/8. PT . Riau Indo Agropalma .pdf
RGE	26	PT. Rimba Lazuardi	20.932	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	048/EQC-VLK /IV/2013	2013/4/11	2016/4/10	PT. Equality Indonesia	Tidak ditemukan online. Terdaftar di http://www.equalityindonesia.com/index.php/pengumuman/realisasi-penilaian/hasil-vlk
SMG	27	PT. Rimba Mandau Lestari	5.604	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	824 303 120024	2012/11/29	2015/11/28	PT. TUV Rheinland Indonesia	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/3. PT . Rimba Mandau Lestari TUV .pdf
RGE	28	PT. Rimba Mutiara Permai	8.069	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	04-SIC-04.02	2012/11/24	2015/11/23	PT. Sarbi International Certification	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/11. PT . Rimba Mutiara Permai .pdf
RGE	29	PT. Rimba Peranap Indah	14.160	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	043/EQC-VLK /III/2013	2013/3/24	2016/3/23	PT. Equality Indonesia	Tidak ditemukan online. Terdaftar di http://www.equalityindonesia.com/index.php/pengumuman/realisasi-penilaian/hasil-vlk
RGE	30	PT. Sari Hijau Mutiara	16.670	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	Tidak ditemukan online	2012/5/21	2015/5/20	PT. Equality Indonesia	Tidak ditemukan online. Terdaftar di S.443/VI-BUHT/2013 Daftar IUPHHK-HTI yang memperoleh sertifikat verifikasi legalitas kayu (SVLK) S/D Maret 2013. Dated 28 March 2013.
SMG	31	PT. Satria Perkasa Agung & KTH. Sinar Merawang - Pulau Muda	9.885	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	06/A-SERT-V LK/XII/2012	2012/12/26	2015/12/25	PT. Ayamaru Sertifikasi	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/4d. PT . Satria Perkasa Agung .pdf
RGE	32	PT. Selaras Abadi Utama	17.435	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	LVLK-003/MU TU/LK-050	2012/6/25	2015/6/24	PT. Mutu Certification International	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/HasilAuditVLK P T. Selaras Abadi Utama Hasil .pdf
RGE	33	PT. Seraya Sumber Lestari	19.052	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	033/EQC-VLK /III/2013	2013/3/7	2016/3/6	PT. Equality Indonesia	Tidak ditemukan online. Terdaftar di http://www.equalityindonesia.com/index.php/pengumuman/realisasi-penilaian/hasil-vlk
RGE	34	PT. Siak Raya Timber	21.402	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	13/A-SERT-V LK/II/2013 (PT. Nusantara Sentosa Raya)	2013/2/15	2016/2/14	PT. Ayamaru Sertifikasi	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/6c. PT . Nusantara Sentosa Raya Ayamaru .pdf

RGE	35	PT. Sumatera Sylva Lestari	8.957	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	LVLK-003/MU TU/LK-098	2013/2/4	2016/2/3	PT. Mutu Certification International	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/2f_PT_Sumatera Sylva Lestari %28Unit Pasir Pangaraian%29_MAL.pdf
SMG	36	PT. Suntara Gajapati	34.790	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	824 303 120008	2012/7/9	2015/7/8	PT. TUV Rheinland Indonesia	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/4c_PT_Suntara Gajapati TUV .pdf
RGE	37	PT. Triomas FDI	9.687	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	035/EQC-VLK /III/2013	2013/3/12	2016/3/11	PT. Equality Indonesia	http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_php/9b_PT_Triomas_Forestry_DI_Equality_.pdf
RGE	38	PT. Uni Seraya	32.830	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	045/EQC-VLK /III/2013	2013/3/28	2016/3/27	PT. Equality Indonesia	Tidak ditemukan online. Terdaftar di http://www.equalityindonesia.com/index.php/pengumuman/realisasi-penilaian/hasil-vlk

JAMBI

Pemegang SVLK			Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
Group	#	Nama			Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
Barito Pacific	1	PT. Lestari Asri Jaya	61.709	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	032/EQC-VLK /II/2013	2013/2/19	2016/2/18	PT. Equality Indonesia	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/2a_PT_Lestari Asri Jaya Equality .pdf
SMG	2	PT. Tebo Multi Agro	20.132	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	016/EQC-VLK /X/2012	2012/10/25	2015/10/24	PT. Equality Indonesia	http://www.equalityindonesia.com/downloads/hasil-vlk/7a_PT_Tebo Multi Agro .pdf
Barito Pacific	3	PT. Wanamukti Wisesa	9.375	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	029/EQC-VLK /II/2013	2013/2/4	2016/2/3	PT. Equality Indonesia	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/4b_PT_Wanamukti Wisesa Equality .pdf
SMG	4	PT. Wira Karya Sakti	291.887	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	824 303 120001	2012/4/14	2015/4/13	PT. TUV Rheinland Indonesia	S-LK: http://www.tuv.com/media/indonesia/brochure_2/forest certification/pengumuman_hasil_vlk_php/cert_vlk_wks.pdf

SUMATERA SELATAN

Pemegang SVLK			Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
Group	#	Nama			Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
SMG	1	PT. Bumi Andalas Permai	192.932	S-PHPL , tanpa S-LK	07-1/A-CERT/XI/2012	2011/2/7	2014/2/6	PT. Ayamuru Baktipertiwi	Baik	-	-	-	-	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/14c_PT_Bumi Andalas Permai .pdf
SMG	2	PT. Bumi Mekar Hijau	251.191	S-PHPL , tanpa S-LK	16-SIC-04.01	2012/6/1	2015/5/31	PT. Sarbi International Certification	Baik	-	-	-	-	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/9_PT_Bumi Mekar Hijau .pdf
Marube ni	3	PT. Musi Hutan Persada	437.685	S-PHPL , tanpa S-LK	003.1/EQC-PHPL/XI/2012	2010/11/24	2013/11/23	PT. Equality Indonesia	Baik	-	-	-	-	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/10e_PT_Musi Hutan Persada .pdf

SMG	4	PT. SBA Wood Industries	143.483	S-PHPL, tanpa S-LK	06-1/A-CERT/XI/2012	2011/2/7	2014/2/6	PT. Ayamaru Baktipertiwi	Baik	-	-	-	-	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/14b. PT . SBA Wood .pdf
SMG	5	PT. Sumber Hijau Permai	30.072	S-PHPL, tanpa S-LK	02.1/FCS-LP-PHPL/CERT-III/2011	2011/3/10	2014/3/9	PT. Forestcitra Sejahtera	Baik	-	-	-	-	Tidak ditemukan online. Terdaftar di: http://www.focusqe.com/?q=node/10
SMG	6	PT. Tri Pupajaya	19.019	S-PHPL & S-LK	17/A-SERT-PHPL/VI/2013	2013/6/12	2018/6/11	PT. Ayamaru Sertifikasi	Baik	02/A-SERT-VLK/XI/2012	2012/11/26	2015/11/25	PT. Ayamaru Sertifikasi	S-PHPL Wajib: http://ayamarucertification.wordpress.com/pengumuman/3hasil-pelaksanaan-audit-lapangan/hasil-phpl/pt-tri-pupajaya/ S-LK: http://www.dephut.go.id/uploads/apl/12c. PT . Tri Pupajaya .pdf
SMG	7	PT. Bumi Persada Permai I	60.486	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	07/A-SERT-VLK/XII/2012	2012/12/26	2015/12/25	PT. Ayamaru Sertifikasi	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/4c. PT . Bumi Persada Permai 1.pdf
SMG	8	PT. Bumi Persada Permai II	24.666	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	03/A-SERT-VLK/XI/2012	2012/11/26	2015/11/25	PT. Ayamaru Sertifikasi	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/12a. PT . Bumi Persada Permai .pdf
SMG	9	PT. Rimba Hutani Mas	66.101	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	015/EQC-VLK/X/2012	2012/10/12	2015/10/11	PT. Equality Indonesia	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/8b. PT . Rimba Hutani Mas .pdf

SUMATERA BARAT

Pemegang SVLK			Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
Group	#	Nama			Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
RGE	1	PT. Bukit Raya Mudisa	28.617	Hanya S-LK						LVLK-003/MUTU/LK-049	2012/6/5	2015/6/4	PT. Mutuagung Lestari	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/7b. PT . Bukit Raya Mudisa .pdf

SUMATERA UTARA

Pemegang SVLK			Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
Group	#	Nama			Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
RGE	1	PT. Sumatera Riang Lestari (Blok I)	25.320	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	09-SIC-04.01	2011/6/3	2014/6/2	PT. Sarbi International Cetrification	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/files/HasilAuditPHPLSumateraRiangLestari_062011.pdf
RGE	2	PT. Toba Pulp Lestari, Tbk.	188.055	S-PHPL Wajib & S-LK	PHPL 00001	2010/10/25	2013/10/24	Sucofindo	Baik	SGS-ID-LKI-0005	2013/1/3	2016/1/2	PT. SGS Indonesia	S-PHPL: http://www.tobapulp.com/index.php/PHPL-Certificate/phpl-certificate.html , S-LK: http://www.dephut.go.id/uploads/apl/11. PT . Toba Pulp Lestari Tbk .pdf

KALIMANTAN BARAT

Pemegang SVLK			Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
Group	#	Nama			Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
	1	PT. Bina Silva Nusa	9.314	S-PHPL , tanpa S-LK	MXC-SPHPL -001	2010/11/19	2013/11/18	PT. Multima Sertifikasi	Tidak ditemuk an	-	-	-	-	http://dephut.net/files/PT_Bina_Silva_Nusa.pdf
	2	PT. Nitiyasa Idola	98.811	S-PHPL , tanpa S-LK	06/PHPL/00 1	2013/3/19	2018/3/18	PT. Almasentra Certification	Sedang	-	-	-	-	http://www.almasentra.com/images/pdf/Sertifikat%20PT_%20Nityasa%20Idola.pdf
Sumitomo & Alas Kusuma Group	3	PT. Wana Subur Lestari	40.159	S-PHPL & S-LK	10/PHPL/00 1	2013/6/25	2018/6/24	PT. Alamsentra Certification	Baik	11/A-SERT-V LK/II/2013	2013/2/7	2016/2/6	PT. Ayamaru Sertifikasi	S-PHPL: http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_phpl/3_Hasil_PHP_L_PT_Wana_Subur_Lestari.pdf S-LK: http://www.dephut.go.id/uploads/apl/6a_PT_Wana_Subur_Lestari_Ayamaru.pdf
SMG	4	PT. Asia Tani Persada	20.719	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	027/EQC-VLK /XII/2012	2012/12/21	2015/12/20	PT. Equality Indonesia	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/5g_PT_Asia_Tani_Persada.pdf
SMG	5	PT. Daya Tani Kalbar	47.915	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	04/A-SERT-V LK/KKPS/XII/ 2012	2012/12/12	2015/12/11	PT. Ayamaru Sertifikasi	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/4a_PT_Daya_Tani_Kalbar.pdf
SMG	6	PT. Finnantara Intiga	286.928	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	824 303 120011	2012/7/27	2015/7/26	PT. TUV Rheinland Indonesia	S-PHPL Sukarela: https://www.certipedia.com/certificates/TRID-PHTL-0003?locale=en S-LK: http://www.dephut.go.id/uploads/apl/5b_PT_Finnantara_Intiga.pdf
SMG	7	PT. Kalimantan Subur Permai	13.416	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	019/EQC-VLK /VI/2012	2012/11/22	2015/11/21	PT. Equality Indonesia	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/11b_PT_Kalimantan.pdf
Sumitomo	8	PT. Mayangkara Tanaman Industri (SK 480)	71.952	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	12/A-SERT-V LK/II/2013	2013/2/8	2016/2/7	PT. Ayamaru Sertifikasi	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/6b_PT_Mayangkara_Tanaman_Industri_Ayamaru.pdf
	9	PT. Wana Hijau Pesaguan	103.867	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	LVLK-003/MU TU/LK-126	2013/8/2	2016/8/1	PT. Mutuagung Lestari	Tidak ditemukan tapi terdaftar di: http://www.mutucertification.com/assets/modules/content/files/vlk-4004-1-daftar-klien-avl2.pdf

KALIMANTAN TENGAH

Pemegang SVLK			Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
Group	#	Nama			Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
Korindo	1	PT. Korintiga Hutani	97.808	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	LVLK-003/MU TU/LK-077	2012/10/25	2015/10/24	PT. Mutu Certification International	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/13b_PT_Korintiga_Hutani.pdf

Barito Pacific	2	PT. Meranti Sembada	17.798	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	039/EQC-VLK /III/2013	2013/3/25	2016/3/24	PT. Equality Indonesia	http://www.equalityindonesia.com/downloads/hasil-vlk/VLK_PT_MERANTI_SEMBADA.pdf
----------------	---	---------------------	--------	------------	---	---	---	---	---	-----------------------	-----------	-----------	------------------------	---

KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA

Pemegang SVLK			Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
Group	#	Nama			Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
SMG	1	PT. Acasia Andalan Utama (Kukar)	39.300	S-PHPL , tanpa S-LK	03/A-CERT/XI/2010	2010/11/18	2013/11/17	PT. Ayamaru Sertifikasi	Baik	-	-	-	-	http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/Sertifikat_PHPL_PT_Acacia_Andalan_Utama_2010.pdf
RGE	2	PT. Adindo Hutani Lestari	195.453	S-PHPL , tanpa S-LK	01-SIC-04.01	2010/11/13	2013/11/12	PT. Sarbi International Certification	Baik	-	-	-	-	http://sic.sarbigroups.com/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3Apengumuman-hasil-penilaian-lapangan-phpl-pt-adindo-hutani-lestari&catid=44%3Akehutanan&Itemid=1
Murdaya	3	PT. Intraca Hutani Lestari	40.241	S-PHPL , tanpa S-LK	02/PHPL/001	2010/11/8	2013/11/7	PT. Almasentra Certification	Baik	-	-	-	-	http://118.97.90.222/files/PT_%20Intraca_Hutani_Lestari.pdf
RGE	4	PT. ITCI Hutani Manunggal	159.908	S-PHPL , tanpa S-LK	02.SIC.04.01	2010/12/8	2013/12/7	PT. Sarbi International Certification	Baik	-	-	-	-	http://sic.sarbigroups.com/index.php?option=com_content&view=article&id=120:hasil-penilaian-pt-itci-hutani-manunggal&catid=44:kehutanan&limitstart=3
SMG	5	PT. Surya Hutani Jaya	194.629	S-PHPL , tanpa S-LK	02/S. PHPL-RGT/2010	2010/11/15	2013/11/14	PT. Rensa Global Trust Certification	Baik	-	-	-	-	S-PHPL WAJIB: http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/sertifikatPHPL_ptSuryaHutaniJaya_2010_0.pdf S-PHPL V: http://www.tuv.com/media/indonesia/brochure_2/forestcertification/public_summary_lei/Public_Summary_Surya_Hutani_Jaya.pdf
	6	PT. Belantara Subur	21.074	Hanya S-LK						LVLK-003/MUTU/LK-125	2013/7/30	2016/7/29	PT. Mutuagung Lestari	Tidak ditemukan tapi terdaftar di: http://www.mutucertification.com/assets/modules/content/files/lvk-4004-1-daftar-klien-lvk2.pdf
SMG	7	PT. Kelawit Wana Lestari (Kubar)	21.503	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	004/Sertf./VLK-IUPHHK/TPK/XII/2012	2012/12/29	2015/12/28	PT. Trustindo Prima Karya	http://www.trustindo.net/data/pengumuman/pt-kelawit-wana-lestari_vlk-iuphhk-hutan-tanaman_hasil_17-22-desember-2012.pdf
SMG	8	PT. Sumalindo Hutani Jaya II	69.098	Hanya S-LK	-	-	-	-	-	003/Sertf./VLK-IUPHHK/TPK/XII/2012	2012/12/27	2015/12/26	PT. Trustindo Prima Karya	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/7a_PT_Sumalindo_Hutani_Jaya_.pdf

KALIMANTAN SELATAN

Pemegang SVLK			Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
Group	#	Nama			Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	

Inhutani	1	PT. Inhutani II Pulau Laut (Semaras)	48.720	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	010/EQC-PH PL/VI/2013	2013/6/13	2018/6/12	PT. Equality Indonesia	Tidak ditemuk an					Tidak ditemukan online. Terdaftar di: http://www.equalityindonesia.com/index.php/pengumuman/realisasi-penilaian/hasil-phpl
United Fiber Sistem	2	PT. Hutan Rindang Banua	268.585	Hanya S-LK						049/EQC-VLK /IV/2013	2013/4/14	2016/4/13	PT. Equality Indonesia	Tidak ditemukan online. Terdapat di: http://www.equalityindonesia.com/index.php/pengumuman/realisasi-penilaian/hasil-vlk

PAPUA

Pemegang SVLK			Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
Group	#	Nama			Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
Medco	1	PT. Selaras Inti Semesta	169.400							022/EQC-VLK /XII/2012	2012/12/7	2015/12/6	PT. Equality Indonesia	http://www.equalityindonesia.com/downloads/hasil-vlk/5_b_PT_Selaras_Inti_Semesta.pdf

Lampiran 3. Perusahaan IUPHHK-HA yang memiliki sertifikat wajib SVLK di Indonesia.

RIAU

#	Pemegang SVLK		Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
	Nama	Luasan peta (ha)		Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
1	PT. Diamond Raya Timber	90.956	S-PHPL, tanpa S-LK	09/PHPL/001	2013/6/20	2018/6/19	PT. Almasentra Certification	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_php/2. Hasil PHP L PT . Diamond Raya Timber .pdf
2	PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa	44.314	Hanya S-LK		-	-	-	-	01/A-SERT-V LK/XI/2012	2012/11/26	2015/11/25	PT. Ayamaru Sertifikasi	http://www.ayamarusertifikasi.co.id/index.php/pengumuman/verifikasi-legalitas-kayu-vlk/penilaian-kinerja/hasil-audit/61-pt-mutiara-sabuk-khatulistiwa

SUMATERA BARAT

#	Pemegang SVLK		Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
	Nama	Luasan peta (ha)		Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
1	PT. Salaki Summa Sejahtera	48.420	S-PHPL, tanpa S-LK	05/A-CERT/XII /2010	2010/12/15	2013/12/14	PT. Ayamaru Sertifikasi	Baik	-	-	-	-	http://www.dephut.go.id/uploads/files/hasilauditPHPL_p tSalakiSummaSejahtera_2010.pdf
2	PT. Minas Pagai Lumber	83.330	S-PHPL, tanpa S-LK	08-SIC-04.01	2011/6/1	2014/5/31	PT. Sarbi International Certification	Baik	-	-	-	-	Tidak ditemukan online, tapi terdaftar di: http://www.dephut.go.id/uploads/files/Daftar%20Sertifikat%20PHPL%20IUPHHK-HA_revised.pdf

KALIMANTAN TENGAH

#	Pemegang SVLK		Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
	Nama	Luasan peta (ha)		Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
1	PT. Amprah Mitra Jaya	79.411	S-PHPL, tanpa S-LK	08/S.PHPL-R GT/2013	2013/2/22	2018/2/21	PT. Rensa Global Trust						Tidak ditemukan online.
2	PT. Austral Byna	263.557	S-PHPL, tanpa S-LK	001/LPPHPL-018/X/2012	2012/10/9	2017/10/8	PT. Transtra Permada	Baik					http://www.transtrapermada.co.id/editor/images/dokumen/HASIL%20PHPL/Sert.Austral%20Byna.pdf
3	PT. Bina Multi Alam Lestari	34.836	S-PHPL, tanpa S-LK	16/A-SERT-P HPL/VI/2013	2013/6/3	2018/6/2	PT. Ayamaru Sertifikasi	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_php/2. Hasil PHP L PT . Bina Multi Alam Lestari 3.pdf
4	PT. Bumimas Permata Abadi	47.076	S-PHPL & S-LK	003/LPPHPL-018/VIII/2013	2013/8/2	2018/8/1	PT. Transtra Permada	Baik	02-SIC-04.02	2012/11/15	2014/11/14	PT. Sarbi International Certification	S-PHPL WAJIB: http://www.transtrapermada.co.id/editor/images/dokumen/HASIL%20PHPL/Sertifikat%20BUMIMAS.zip S-LK Tidak ditemukan online. Listed at: http://sic.sarbigroups.com/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=100

5	PT. Dwima Jaya Utama	128.448	S-PHPL, tanpa S-LK	06/S-PHPL-R GT/2012	2012/6/19	2017/6/18	PT. Rensa Global Trust	Baik					S-PHPL WAJIB: http://www.dephut.go.id/uploads/apl/8_PT_Dwimajaya_Utama.pdf S-PHPL V: http://dwima.net/Sertifikat/
6	PT. Erna Juliawati	180.322	S-PHPL & S-LK	LPPHPL-008/MUTU/FM-006	2012/11/6	2017/11/5	PT. Mutu Agung Lestari	Baik	LVLK-003/MUTU/LK079	2012/11/6	2015/11/5	PT. Mutu Agung Lestari	S-PHPL WAJIB & S-LK: http://www.dephut.go.id/uploads/apl/8b_PT_Erna_Diuliawati.pdf S-PHPL V: http://info.fsc.org/Detail?id=a0240000005sV0ZAAU , http://info.fsc.org/Detail?id=a0240000005sThIAAU
7	PT. Erythrina Nugraha Megah	42.236	S-PHPL, tanpa S-LK	4/S.PHPL-RGT/2011	2011/7/28	2014/7/27	PT. Rensa Global Trust	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/files/Daftar%20Sertifikat%20PHPL%20IUPHHK-HA_revised.pdf
8	PT. Fitamaya Asmapara	43.184	S-PHPL, tanpa S-LK	189/ASC-Adm/VIII/2013	2013/8/24	2018/8/23	PT. Alma Sentra Certification	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_phpl/10_Hasil_PHPL_PT_Fitamaya_Asmapara.pdf
9	PT. Graha Sentosa Permai	45.984	S-PHPL, tanpa S-LK	013-PHPL-NBM	2013/1/4	2018/1/3	PT. Nusa Bakti Mandiri						Tidak ditemukan online. Terdaftar di: http://www.nbm-unb.com/Direktori%20Klien%20Tersertifikasi%20PT.NBM%20per%2018%20Januari%202013.pdf
10	PT. Gunung Meranti	87.544	S-PHPL, tanpa S-LK	14-SIC-04.01	2012/1/5	2015/1/4	PT. Sarbi International Certification	Baik					Tidak ditemukan online. Terdaftar di: http://sic.sarbigroups.com/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=99
11	PT. Hasil Kalimantan Jaya	51.522	S-PHPL, tanpa S-LK	09/A-CERT/VII/2011	2011/8/12	2014/8/11	PT. Ayamaru Sertifikasi	Baik					http://ayamarucertification.wordpress.com/pengumuman/3hasil-pelaksanaan-audit-lapangan/hasil-phpl/pt-hasil-kalimantan-jaya/
12	PT. Hutanindo Lestari Raya Timber	92.579	S-PHPL, tanpa S-LK	05/RGT-SK/III/2011	2011/3/17	2014/3/16	PT. Rensa Global Trust	Baik					http://www1.dephut.go.id/files/hasilauditPHPL_ptHutanindoLestariRayaTimber_2011.pdf
13	PT. Indexim Utama Corp.	52.789	S-PHPL, tanpa S-LK	002/LPPHPL-018/V/2013	2013/5/1	2018/4/30	PT. Transtra Permada	Baik					http://www.transtrapermada.co.id/editor/images/dokumen/HASIL%20PHPL/SERTIFIKAT%20PT.%20INDEXIM%20UTAMA.pdf
14	PT. Kahayan Terang Abadi	42.985	S-PHPL & S-LK	18/A-SERT-PHPL/VI/2013	2013/6/25	2018/6/24	PT. Ayamaru Sertifikasi	Baik	10/A-SERT-VLK/2013	2013/1/30	2016/1/29	PT. Ayamaru Sertifikasi	S-PHPL Wajib: http://ayamarucertification.wordpress.com/pengumuman/3hasil-pelaksanaan-audit-lapangan/hasil-phpl/pt-kahayan-terang-abadi/ S-LK: http://www.dephut.go.id/uploads/apl/5_PT_Kahayan_Terang_Abadi_Ayamaru.pdf
15	PT. Karya Delta Permai	79.134	S-PHPL, tanpa S-LK	008-PHPL-NBM	2012/4/3	2017/4/2	PT. Nusa Bakti Mandiri	Baik					Tidak ditemukan online. Terdaftar di: http://www.nbm-unb.com/Direktori%20Klien%20Tersertifikasi%20PT.NBM%20per%2018%20Januari%202013.pdf
16	PT. Kayu Tribuana Rama	87.534	S-PHPL, tanpa S-LK	004-PHPL-NBM	2011/10/4	2014/10/3	PT. Nusa Bakti Mandiri						http://www1.dephut.go.id/files/HasilAuditPHPL_PT.%20Kayu%20Tribuana%20Rama_0.pdf
17	PT. Kayu Waja	38.363	S-PHPL, tanpa S-LK	05/S.PHPL-RGT/2012	2012/5/7	2017/5/6	PT. Rensa Global Trust	Baik					Tidak ditemukan online. Terdaftar di: http://www.dephut.go.id/uploads/files/Daftar%20Sertifikat%20PHPL%20IUPHHK-HA_revised.pdf

18	PT. Meranti Mustika	45.018	S-PHPL, tanpa S-LK	LP PHPL-008/MU TU/FM-002	2011/8/12	2014/8/11	PT. Mutu Certification International	Baik					http://www1.dephut.go.id/files/HasilAuditPHPL_PT.%20Meranti%20Mustika_0.pdf
19	PT. Mitra Perdana Palangka	56.523	S-PHPL, tanpa S-LK	04-SIC-04.01	2011/4/13	2014/4/12	PT. Sarbi International Certification	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/files/HasilAuditPHPL_PTMitraPerdanaPalangka2011.pdf
20	PT. Pematang Abaditama	53.128	S-PHPL, tanpa S-LK	005/S-PHPL/G RS/VII/2013	2013/7/8	2018/7/7	PT. Global Research Sertifikasi	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_phpl/4_Hasil_PHP_L_PT_Pematang_Abaditama_.pdf
21	PT. Sarana Piranti Utama	48.340	S-PHPL, tanpa S-LK	09/S.PHPL-R GT/2013	2013/4/19	2018/4/18	PT. Rensa Global Trust	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_phpl/5_Hasil_PHP_L_PT_Sarana_Piranti_Utama_2.pdf
22	PT. Barito Putera	27.392	Hanya S-LK						09/A-SERT-V LK/II/2013	2013/1/4	2016/1/3	PT. Ayamaru Sertifikasi	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/10a_PT_Barito_Putra_.pdf
23	PT. East Point Indonesia	51.377	Hanya S-LK						17/A-SERT-V LK/Kpts/VIII/2013	2013/8/13	2016/8/12	PT. Ayamaru Sertifikasi	http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_phpl/17_Hasil_VL_K_PT_East_Point_Indonesia_.pdf
24	PT. Hasnur Jaya Utama	34.664	Hanya S-LK						08/A-SERT-V LK/II/2013	2013/1/4	2016/1/3	PT. Ayamaru Sertifikasi	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/10b_PT_Hasnur_Jaya_Utama_.pdf
25	PT. Sari Bumi Kusuma (Unit I dan II)	144.644	Hanya S-LK						15/A-SERT-V LK/III/2013	2013/3/4	2016/3/3	PT. Ayamaru Sertifikasi	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/4a_PT_Sari_Bumi_Kusuma_Ayamaru_.pdf
26	PT. Sindo Lumber	37.308	Hanya S-LK						014/LVLK-009-IDN/IV/2013	2012/6/22	2015/6/21	PT. Transtra Permada	http://www.transtrapermada.co.id/editor/images/dokumen/HASIL%20VLK/Sertifikat%20PT.%20Sindo%20Lumber.pdf
27	PT. Trisetia Intiga	67.650	Hanya S-LK						031/EQC-VLK/II/2013	2013/2/13	2016/2/12	PT. Equality Indonesia	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/2b_PT_Trisetia_Intiga_Equality_.pdf
28	PT. Wana Inti Kahuripan Intiga	92.252	Hanya S-LK						013/LVLK-009/IV/2013	2013/4/1	2018/3/31	PT. Transtra Permada	http://www.transtrapermada.co.id/editor/images/dokumen/HASIL%20VLK/SERTIFIKAT%20WIKI.zip

**KALIMANTAN TIMUR
DAN UTARA**

#	Pemegang SVLK		Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib				Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat	
	Nama				Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa		Auditor
1	PT. Adimitra Lestari		51.984	S-PHPL, tanpa S-LK	LPPHPL-015-I DN	2013/7/18	2018/7/17	PT. Multima Krida Cipta	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_phpl/16_Hasil_PHP_L_PT_ADIMITRA_LESTARI_.pdf
2	PT. Balikpapan Forest Industri		140.844	S-PHPL & S-LK	14/A-SERT-P HPL/II/2013	2013/1/21	2018/1/20	PT. Ayamaru Sertifikasi	Baik	021/EQC-VLK /XII/2012	2012/12/7	2015/12/6	PT. Equality Certification	S-PHPL Wajib: http://www.dephut.go.id/uploads/apl/6_PT_BFI_Ayamaru_.pdf S-LK: http://www.equalityindonesia.com/downloads/hasil-vlk/5c_PT_Balikpapan_Forest_Industries_.pdf

3	PT. Belayan River Timber	96.179	S-PHPL, tanpa S-LK	824 470 120001	2012/7/19	2017/7/18	PT. TUV Rheinland Indonesia	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/apl/11. PT. Belayan River Timber TUV .pdf
4	PT. Borneo Karya Indah Mandiri	48.185	S-PHPL, tanpa S-LK	24-SIC-04.01	2013/6/22	2018/6/21	PT. Sarbi International Certification	Sedang					http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_phpl/5. Hasil PHP L PT. BORNEO KARYA INDAH .PDF
5	PT. Civika Wana (Eks Damukti)	73.284	S-PHPL, tanpa S-LK	006-PHPL-NB M	2012/2/20	2015/2/19	PT. Nusa Bhakti Mandiri	Baik					http://www.nbm-unb.com/2012.02.20_Hasil%20Audit%20PHPL_PT.%20Civika%20Wana%20Lestari_Kaltim.pdf
6	PT. Daisy Timber	45.547	S-PHPL, tanpa S-LK	018-PHPL-NB M	2013/6/8	2018/6/7	PT. Nusa Bhakti Mandiri	Sedang					http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_phpl/1_Hasil_PHP L PT. Daisy .pdf
7	PT. Essam Timber	326.866	S-PHPL, tanpa S-LK	13/A-CERT/VI/2012	2012/6/4	2017/6/3	PT. Ayamaru Certification	Sedang					http://ayamarucertification.wordpress.com/pengumuman/3hasil-pelaksanaan-audit-lapangan/hasil-phpl/pt-essam-timber/
8	PT. Gunung Gajah Abadi	78.648	S-PHPL, tanpa S-LK	01.1/FCS-LP-PHPL/CERT-IX/2010	2010/9/24	2013/9/23	PT. Forestciitra Sejahtera	Baik					http://118.97.90.222/files/hasilauditPHPL_ptGunungGajahAbadi_2010_0.pdf
9	PT. Hanurata Coy (Unit Sangkulirang)	90.302	S-PHPL, tanpa S-LK	009-PHPL-NB M	2012/5/8	2017/5/7	PT. Nusa Bhakti Mandiri	Baik					http://www.nbm.unb.com/2012.05.16_Hasil_Audit%20PHPL_PT%20Hanurata%20Unit%20Sangkulirang_Kaltim.pdf
10	PT. Hutani Kalimantan Abadi Permai	35.616	S-PHPL, tanpa S-LK	014-PHPL-NB M	2013/1/5	2018/1/4	PT. Nusa Bhakti Mandiri	Sedang					http://www.nbm-unb.com/2013.01.05_Hasil%20Audit%20PHPL_%20PT.HKAP_Kaltim.pdf
11	PT. Inhutani I (Pangean)	50.741	S-PHPL, tanpa S-LK	03/PHPL/001	2010/11/21	2013/11/20	PT. Almasentra Certification	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/files/hasilauditPHPL_ptInhutaniUnitPangean_2010.pdf
12	PT. Inhutani I (Pimping)	43.077	S-PHPL, tanpa S-LK	04/PHPL/001	2013/1/15	2018/1/14	PT. Almasentra Certification	Baik					http://www.almasentra.com/images/pdf/srt%20ppg.pdf
13	PT. Inhutani I (Sambarata)	115.218	S-PHPL, tanpa S-LK	08/PHPL/002	2013/4/30	2018/4/29	PT. Almasentra Certification	Baik					http://www.almasentra.com/images/pdf/kpts%20Sambara.pdf
14	PT. Inhutani I (Unit Kunyit-Simendurut)	119.532	S-PHPL, tanpa S-LK	05/PHPL/001	2013/1/29	2018/1/28	PT. Almasentra Certification	Baik					http://www.almasentra.com/images/pdf/srt%20kytsmdr.pdf
15	PT. Inhutani I (Unit Labanan)	146.909	S-PHPL, tanpa S-LK	01/PHPL/001	2010/11/5	2013/11/4	PT. Almasentra Certification	Baik					http://www.almasentra.com/index.php/2012-12-14-05-50-19/keputusan-sertifikasi
16	PT. Inhutani I (Unit Meraang)	70.709	S-PHPL, tanpa S-LK	12-SIC-04.01	2011/11/18	2014/11/17	PT. Sarbi International Certification	Baik					http://sarbigroups.com/sic/index.php?option=com_content&view=article&id=147%3Apengumuman-hasil-penilaian-pt-inhutani-i-unit-meraang&catid=44%3Akehutanan&Itemid=1&limitstart=3

17	PT. Inhutani I (Unit Segah Hulu)	55.067	S-PHPL, tanpa S-LK	07/PHPL/002	2013/4/22	2018/4/21	PT. Almasentra Certification	Baik					http://www.almasentra.com/images/pdf/segah%20hulu%20sertifikat.pdf
18	PT. Inhutani II (Unit Malinau)	46.705	S-PHPL, tanpa S-LK	006/RQC-PHP L/V/2011	2011/5/6	2014/5/5	PT. Equality Indonesia	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/files/HasilAuditPHPL_PTIInhutaniII_2011.pdf
19	PT. Intracawood Manufacturing	193.475	S-PHPL, tanpa S-LK	TRID-PHPL-K 0002	2011/9/7	2014/9/6	PT. TUV Rheinland Indonesia	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/files/HasilAuditPHPL_PT.%20Intracawood%20Manufacturing_0911.pdf
20	PT. ITCI Kayan Hutani (Ikani)	225.766	S-PHPL, tanpa S-LK	015-PHPL-NB M	2013/3/23	2018/3/22	PT. Nusa Bhakti Mandiri	Baik					http://www.nbm-unb.com/2013.03.22_Hasil%20Audit%20PHPL_%20PT.IKANI_Kaltim.pdf
21	PT. Kemakmuran Berkah Timber	89.550	S-PHPL, tanpa S-LK	001/SPHPL/G RS/XII/2011	2011/12/1	2014/11/30	PT. Global Resource Sertifikasi	Baik					http://www.globalresource.co.id/index.php/hasil-penilaian-kinerja-phpl-iupphk-pt-kemakmuran-berkah-timber
22	PT. Kiani Lestari (Eks PT GPI)	208.677	S-PHPL, tanpa S-LK	06-SIC-04.01	2011/4/15	2014/4/14	PT. Sarbi International Certification	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/files/HasilAuditPHPL_PTKianiLestari2011.pdf
23	PT. Mardhika Insan Mulia	56.322	S-PHPL, tanpa S-LK	12 PHPL 001	2013/8/18	2018/8/17	PT. Almasentra Certification	Baik					http://www.almasentra.com/images/pdf/mim%20kelay%20lengkap.pdf
24	PT. Mardhika Insan Mulia (Unit Talabar)	24.217	S-PHPL & S-LK	14 PHPL 001	2013/8/28	2018/8/27	PT. Almasentra Certification	Baik	002/EQC-VLK /XI/2011	2011/11/21	2014/11/20	PT. Equality Indonesia	S-PHPL Wajib: http://www.almasentra.com/images/pdf/mim%20tabalar%20lengkap.pdf S-LK: http://www.equalityindonesia.com/index.php/pengumuman/realisasi-penilaian/hasil-vlk
25	PT. Narkata Rimba	40.887	S-PHPL, tanpa S-LK	012-PHPL-NB M	2012/11/23	2017/11/22	PT. Nusa Bhakti Mandiri	Baik					http://www.nbm-unb.com/2012.11.23_Hasil%20Audit%20PHPL_%20PT.%20Narkata%20Rimba_Kaltim.pdf
26	PT. Puji Sempurna Raharja	43.950	S-PHPL*, tanpa S-LK	010-PHPL-NB M	2012/5/25	2017/5/24	PT. Nusa Bhakti Mandiri	Sedang					*Sertifikat ini tidak diakui oleh Kemenhut (lihat Bab 5.3): http://www.nbm-unb.com/2012.05.24_Hasil%20Audit%20PHPL_PT.%20Puji%20Sempurna%20Raharja_Kaltim.pdf
27	PT. Ratah Timber	93.095	S-PHPL, tanpa S-LK	03.1/FCS-LP-PHPL/CERT-V III/2011	2011/8/3	2014/8/2	PT. Forestciitra Sejahtera	Baik					http://www.focusqe.com/?q=node/36
28	PT. Rimba Karya Rayatama (Sk 186-Kutai Barat)	40.361	S-PHPL, tanpa S-LK	001-PHPL-NB M	2010/11/15	2013/11/14	PT. Nusa Bhakti Mandiri	Baik					http://www.nbm-unb.com/Direktori%20Klien%20Tersertifikasi%20PT.NBM%20per%2018%20Januari%202013.pdf
29	PT. Rimba Makmur Sentosa	40.781	S-PHPL, tanpa S-LK	10/A-CERT/XI/2011	2011/11/29	2014/11/28	PT. Ayamaru Certification	Baik					http://ayamarucertification.wordpress.com/pengumuman/3hasil-pelaksanaan-audit-lapangan/hasil-phpl/pt-rimba-makmur-sentosa/
30	PT. Rodamas Timber Kalimantan	115.069	S-PHPL, tanpa S-LK	MKC-SPHPL-002	2011/8/25	2014/8/24	PT. Multimakrida Cipta	Baik					http://www1.dephut.go.id/files/HasilAuditPHPL_PT.%20Roda%20Mas_0911_1.pdf

31	PT. Sarana Tirasa Bhakti	34.255	S-PHPL, tanpa S-LK	007-PHPL-NB M	2012/3/2	2015/3/1	PT. Nusa Bhakti Mandiri	Baik					http://www.nbm-unb.com/2012.03.05_Hasil%20Audit%20PHPL_PT.%20Sarana%20Tri%20Rasa%20Bhakti_Kaltim.pdf
32	PT. Segara Indochem & PT Segara Timber	83.751	S-PHPL, tanpa S-LK	007-SPHPL/G RS/VII/2013	2013/7/29	2018/7/28	PT. Global Resource Sertifikasi	Baik					http://globalresource.co.id/index.php/hasil-penilaian-kinerja-phpl-pt-segara-indochem
33	PT. Seroja Universum Narwastu	34.240	S-PHPL, tanpa S-LK	002/EQC-PHP L/XI/2010	2010/11/11	2013/11/10	PT. Equality Indonesia	Baik					http://118.97.90.222/files/hasilauditPHPL_ptSerojaUniversumNarwastu_2010.pdf
34	PT. Sumalindo Lestari Jaya II	257.694	S-PHPL, tanpa S-LK	003.PHPL.019 -IDN.07.13	2013/7/6	2018/7/5	PT. Trustindo Prima Karya	Baik					http://www.trustindo.net/data/pengumuman/pt-sumalindo-lestari-jaya-ii_phpl-iuphkh-ha_hasil_17-23-juni-2013.pdf
35	PT. Sumalindo Lestari Jaya IV	63.142	S-PHPL, tanpa S-LK	001.PHPL.019 -IDN.06.13	2013/6/14	2018/6/13	PT. Trustindo Prima Karya	Baik					http://www.trustindo.net/data/pengumuman/pt-sumalindo-lestari-jaya-iv_phpl-iuphkh-ha_hasil_24-30-mei-2013.pdf
36	PT. Timber Dana	61.940	S-PHPL, tanpa S-LK	10-SIC-04.01	2011/8/22	2014/8/21	PT. Sarbi International Certification	Baik					http://www1.dephut.go.id/files/2a.%20Daftar%20Sertifikat%20PHPL%20IUPHKK-HA.pdf
37	PT. Wana Rimba Kencana	69.826	S-PHPL, tanpa S-LK	002/PHPL-NB M	2010/12/23	2013/12/22	PT. Nusa Bhakti Mandiri	Baik					http://www.dephut.go.id/index.php/news/details/7428
38	PT. Aditya Kirana Mandiri	37.700	Hanya S-LK						015.SVLK.01 0-IDN.06.13	2013/6/13	2016/6/12	PT. Trustindo Prima Karya	http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_phpl/20_Hasil_VLK_PT_Aditya_Kirana_mandiri_2.pdf
39	PT. Batu Karang Sakti	47.189	Hanya S-LK						016-A/SERT-VLK/III/2013	2013/3/22	2016/3/21	PT. Ayamara Sertifikasi	http://www.ayamarusertifikasi.co.id/index.php/pengumuman/verifikasi-legalitas-kayu-vlk/penilaian-kinerja/hasilaudit/78-pt-batu-karang-sakti
40	PT. Harapan Kaltim lestari	44.459	Hanya S-LK						VLK 00103	2012/6/22	2015/6/21	PT. Sucofindo	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/HasilAuditVLK_PT_Harapan_Kaltim_Lestari.pdf
41	PT. Indowana Arga Timber	38.876	Hanya S-LK						051/EQC-VLK /I/2013	2013/5/10	2016/5/9	PT. Equality Certification	http://www.equalityindonesia.com/index.php/our-experiences-2/sertifikasi-lk-2
42	PT. Meranti Sakti Indonesia II	39.870	Hanya S-LK						LVLK.003/MU TU/LK020	2011/5/11	2014/5/10	PT. Mutuagung Lestari	http://www.dephut.go.id/uploads/files/hasilauditVLK_pt_MerantiSaktiIndonesia_2011_0.pdf
43	PT. Rimba Karya Rayatama (Sk 384-Malinau)	142.374	Hanya S-LK						VLK-00105	2012/6/22	2015/6/21	PT. Sucofindo	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/HasilAuditVLK_PT_Rimba_Karya_Rayatama.pdf
45	PT. Rizki Kacida Reana (Unit II)	55.056	Hanya S-LK						L-VLK-003/M UTU/LK-029	2011/11/16	2014/11/15	PT. Mutuagung Lestari	Sertifikat S-LK Tidak ditemukan online tapi terdaftar di: http://www.mutucertification.com/assets/modules/content/files/vlk-4004-1-daftar-klien-lvlk2.pdf
44	PT. Rizki Kacida Reana SK 354 (Unit I)	27.067	Hanya S-LK						L-VLK-003/M UTU/LK-103	2013/2/22	2016/2/21	PT. Mutuagung Lestari	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/4c_PT_RKR_MAL.pdf

46	PT. Sumalindo Lestari Jaya V	59.813	Hanya S-LK						001.SVLK.01 0-IDN.03.13	2013/5/30	2016/5/29	PT. Trustindo Prima Karya	http://www.trustindo.net/data/pengumuman/pt-sumalindo-lestari-jaya-v-vlk-iuphkh-hutan-alam-hasil-16-20-maret-2013.pdf
47	PT. Wana Bhakti Persada Utama	47.472	Hanya S-LK						007.SVLK.01 0-IDN.03.13	2013/3/5	2016/3/4	PT. Trustindo Prima Karya	http://www.trustindo.net/data/pengumuman/pt-wana-bhakti-persada-utama-vlk-iuphkh-hutan-alam-hasil-15-19-februari-2013.pdf

KALIMANTAN BARAT

Pemegang SVLK		Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
#	Nama			Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
1	PT. Bina Ovivipari Semesta	10.192	S-PHPL & S-LK	17-SIC-04.01	2012/8/4	2017/8/3	PT. Sarbi International Certification	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/apl/HasilAuditPHPL_PT_Bina_Ovivipari_Semesta.pdf
2	PT. Kalimantan Satya Kencana	46.079	S-PHPL, tanpa S-LK	LPPHPL-008/MUTU/FM-005	2012/11/6	2017/11/5	PT. Mutuagung Lestari	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/apl/8a_PT_Kalimantan_Satya_Kencana.pdf
3	PT. Kandelia Alam	18.203	S-PHPL & S-LK	25-SIC-04.01	2013/6/22	2018/6/21	PT. Sarbi International Certification	Tidak ditemukan					Tidak ditemukan
4	PT. Wanasokan Hasilindo	46.925	S-PHPL, tanpa S-LK	26-SIC-04.01	2013/8/19	2013/8/18	PT. Sarbi International Certification	Tidak ditemukan					Tidak ditemukan
5	PT. Suka Jaya Makmur	170.581	Hanya S-LK						14/A-SERT-V LK/III/2013	2013/3/4	2016/3/3	PT. Ayamaru Sertifikasi	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/4b_PT_Suka_Jaya_Makmur_Ayamaru.pdf

KALIMANTAN SELATAN

Pemegang SVLK		Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
#	Nama			Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
1	PT. Kodeco Timber	99.570	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	22-SIC-04.01	2013/6/16	2018/6/15	PT. Sarbi International Certification	Sedang					http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_phpl/1_Hasil_PHP_L_PT_KODECO_TIMBER.PDF
2	PT. Aya Yayang Indonesia	87.241	Hanya S-LK						030/EQC-VLK /II/2013	2013/2/7	2016/2/6	PT. Equality Certification	http://www.equalityindonesia.com/downloads/hasil-vlk/4c_PT_Aya_Yayang_Indonesia_Equality.pdf

PAPUA

Pemegang SVLK		Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
#	Nama			Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
1	PT. Bade Makmur Orissa	462.600	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	08/A-CERT/VI/2011	2011/5/10	2014/5/9	PT. Ayamaru Certification	Baik					http://ayamarucertification.wordpress.com/pengumuman/3hasil-pelaksanaan-audit-lapangan/hasil-phpl-pt-bade-makmur-orissa/

2	PT. Damai Setiatama	305.000	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	11/A-CERT/XI/ 2011	2011/11/29	2014/11/28	PT. Ayamaru Certification	Baik					http://ayamarucertification.wordpress.com/pengumuman/3hasil-pelaksanaan-audit-lapangan/hasil-phpl/pt-damai-setiatama-timber/
3	PT. Diadyani Timber	205.160	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	004-PHPL-NB M	2012/2/4	2015/2/3	PT. Nusa Bhakti Mandiri	Baik					http://www.nbm-unb.com/2012.02.06_Hasil%20Audit%20PHPL_PT.%20Diadyani%20Timber_Papua.pdf
4	PT. Hanurata Unit Jayapura	169.500	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	003-PHPL-NB M	2011/8/3	2014/8/2	PT. Nusa Bhakti Mandiri	Baik					http://www.nbm-unb.com/2011.08.05_Hasil%20Audit%20PHPL_PT.%20Hanurata%20Unit%20Jayapura_Papua.pdf
5	PT. Mamberamo Alasmandiri	677.310	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	008/EOC-PHP L/V/2012	2012/5/1	2017/4/30	PT. Equality Indonesia	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/apl/HasilAuditPHPL_P.T.Mamberamo_Alasmandiri_.pdf
6	PT. Tunas Timber Lestari	214.935	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	12/A-CERT/II/ 2012	2012/2/17	2015/2/16	PT. Ayamaru Certification	Baik					http://ayamarucertification.wordpress.com/pengumuman/3hasil-pelaksanaan-audit-lapangan/hasil-phpl/pt-tunas-timber-lestari/
7	PT. Inocin Abadi	99.665	Hanya S-LK						024/EQC-VLK /XII/2012	2012/12/11	2015/12/10	PT. Equality Certification	http://www.equalityindonesia.com/downloads/hasil-vlk/5d_PT_.Inocin_Abadi_.pdf

PAPUA BARAT

#	Pemegang SVLK		Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
	Nama	Luasan peta (ha)		Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
1	PT. Bintuni Utama Murni Wood Industries	82.120	S-PHPL Wajib & S-LK	11-SIC-04.01	2011/11/17	2014/11/16	PT. Sarbi International Certification	Baik	07-SIC-04.02	2012/12/26	2015/12/25	PT. Sarbi International Certification	S-PHPL Tidak ditemukan online, tapi terdaftar di: http://www.dephut.go.id/uploads/files/Daftar%20Sertifikat%20PHPL%20IUPHHK-HA_revised.pdf S-LK: http://sarbigroups.com/sic/index.php?option=com_content&view=article&id=168%3Apengumuman-publik-hasil-penilaian-vlk-pt-bintuni-utama-murni-wood-industries&catid=44%3Akehutanan&limitstart=3
2	PT. Bangun Kayu Irian	299.000	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	011-PHPL-NB M	2012/8/4	2017/8/3	PT. Nusa Bhakti Mandiri	Sedang					Tidak ditemukan online, tapi terdaftar di: http://www.nbm-unb.com/Direktori%20Klien%20Tersertifikasi%20PT.NBM%20per%2018%20Januari%202013.pdf
3	PT. Hanurata Unit Sorong	417.570	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	017-PHPL-NB M	2013/5/20	2018/5/19	PT. Nusa Bhakti Mandiri	Baik: 3 blocks & Sedang : 1 block					http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_phpl/3_Hasil_PHP_L_PT_.Hanurata_Unit_Papua_Barat_.pdf
4	PT. Multi Wahana Wijaya	139.000	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	15/A-SERT-P HPL/II/2013	2013/5/31	2018/5/30	PT. Ayamaru Sertifikasi	Sedang					http://ayamarucertification.wordpress.com/pengumuman/3hasil-pelaksanaan-audit-lapangan/hasil-phpl/pt-multi-wahana-wijaya/

5	PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya	239.000	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	05-SIC-04.01	2011/3/3	2014/3/2	PT. Sarbi International Certification	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/files/hasilauditPHPL_p tTelukBintuniMinaAgroKarya_2011.pdf
6	PT. Wana Irian Perkasa	76.900	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	13-SIC-04.01	2011/11/25	2014/11/24	PT. Sarbi International Certification	Baik					http://sic.sarbigroups.com/index.php?option=com_content&view=article&id=148%3Apengumuman-hasil-penilaian-pt-wana-irian-perkasa&catid=44%3Akehutanan&limitstart=3
7	PT. Wanagalang Utama	212.000	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	15-SIC-04.01	2012/1/7	2015/1/6	PT. Sarbi International Certification	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/apl/HasilAuditPHPL_P T. Wanagalang Utama .pdf
8	PT. Yotefa Sarana Timber	123.565	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	016-PHPL-NB M	2013/5/3	2018/5/2	PT. Nusa Bhakti Mandiri	Baik					http://www.dephut.go.id/uploads/vlk_phpl/2. Hasil PHP L PT . Yotefa Sarana Timber .pdf

MALUKU

Pemegang SVLK		Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
#	Nama			Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
1	PT. Nusapadma Corporation	39.920	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	18-SIC-04.01	2013/5/13	2018/5/12	PT. Sarbi International Certification	sedang					http://www.dephut.go.id/neosis/uploads/vlkphpl/3. Hasil PHPL PT . Nusapadma Corporation 2.pdf
2	PT. Karya Jaya Berdikari	93.980	Hanya S-LK						VLK 00064	2011/12/5	2014/12/4	PT. Sucofindo	http://www.dephut.go.id/uploads/apl/RencanaVLK_PT_Karya_Jaya_Berdikari .pdf

MALUKU UTARA

Pemegang SVLK		Luasan peta (ha)	Status SVLK hingga Agt 2013	Detil S-PHPL Wajib					Detil S-LK Wajib				URL Sertifikat
#	Nama			Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	Skor	Sertifikat#	Tanggal terbit	Tanggal kadaluarsa	Auditor	
1	PT. Telagabakti Persada	63.405	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	002/S-PHPL/G RS/VII/2012	2012/7/1	2017/6/30	PT. Global Resources Sertifikasi	Baik					http://www.globalresource.co.id/index.php/hasil-penilaian-kinerja-phpl-iuphpk-pt-telagabakti-persada
2	PT. Bela Berkat Anugerah	33.880	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	003/S-PHPL/G RS/III/2013	2013/3/11	2018/3/11	PT. Global Resources Sertifikasi	Sedang					http://www.globalresource.co.id/index.php/hasil-penilaian-kinerja-phpl-pt-bela-berkat-anugerah
3	PT. Wana Kencana Sejati	47.410	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	19-SIC-04.01	2013/5/14	2018/5/13	PT. Sarbi International Certification	Sedang					http://www.dephut.go.id/neosis/uploads/vlkphpl/4. Hasil PHPL PT . Wana Kencana Sejati 1.pdf
4	PT. Wana Kencana Sejati Unit II	45.825	S-PHPL Wajib, tanpa S-LK	20-SIC-04.01	2013/5/14	2018/5/13	PT. Sarbi International Certification	Sedang					Tidak ditemukan. Terdaftar di http://sarbigroups.com/sic/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=99

Daftar Pustaka

- ¹ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.42/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
<http://www.dephut.go.id/uploads/files/38a96c50d7f7a171fa1e0f209cd99527.pdf>
- ² Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.45/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 Tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
http://www.dephut.go.id/uploads/apl/P45_2012_StandarPedomanPenilaianKinerjaKelolaHPLdanVLKpadaHutanHak_Rev_.pdf
- ³ Ministry of Forestry (2012) Data and Information Forest Utilization Year 2012 / Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2012. <http://www.dephut.go.id/uploads/files/Buku%20Pemanfaatan%20Final%202012.pdf>
- ⁴ References webgis, MoF (2012), EoF Investigation
- ⁵ Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.6/VI-Set/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legaritas Kayu.
http://www.fkt.ugm.ac.id/files/u1/Produksi_Lestari_dan_Verikasi_Legalitas_Kayu.pdf
- ⁶ Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.02/VI-BPPHH/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legaritas Kayu.
http://www.fkt.ugm.ac.id/files/u1/Perdirjen_BPK_P_02-2010.pdf
- ⁷ Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legaritas Kayu (VLK).
http://pantauhutan.files.wordpress.com/2012/06/p-8_vi-bpphh_2011.pdf
- ⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legaritas Kayu (VLK).
http://www.mutuhijau.com/attachments/article/107/Revisi%20Perdirjen%20P.8%20Tahun%202011_0.pdf
- ⁹ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
- ¹⁰ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menhut-II/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MENHUT-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
http://loggingoff.info/sites/loggingoff.info/files/P%2068_2011.pdf
- ¹¹ Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.45/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/MENHUT-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
<http://ja.scribd.com/doc/180112887/P-45-2012-StandarPedomanPenilaianKinerjaKelolaHPLdanVLKpadaHutanHak-Rev-pdf>
- ¹² The European Union Delegation to Indonesia and Burnei Darussalam, Republic of Indonesia Ministry of Forestry (2011) FLEGT Voluntary Partnership Agreement Between Indonesia and the European Union. Briefing Note May 2011.
<http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23029/FLEGT+Voluntary+Partnership+Agreement+Between+the+Republic+of+Indonesia+and+the+European+Union+-+Briefing+Note+May+2011/cfed6026-55a9-4b7f-a28d-f147d9e6c9d5>
- ¹³ Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor: P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legaritas Kayu (VLK).
http://pantauhutan.files.wordpress.com/2012/06/p-8_vi-bpphh_2011.pdf
- ¹⁴ Annex VIII, "Criteria for Assessing the Operationality of the Indonesian Timber Legality Assurance System" of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Indonesia on Forest Law Enforcement, Governance and Trade in Timber Products into the European Union, included in European Commission (20 June 2013) Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Union, of the Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Indonesia on forest law enforcement, governance and trade in timber products to the European Union.
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0432:FIN:EN:PDF>
- ¹⁵ Human Rights Watch (2013) The Dark Side of Green Growth Human Rights Impacts of Weak Governance in Indonesia's Forestry

Sector. <http://www.hrw.org/reports/2013/07/16/dark-side-green-growth>

¹⁶ Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (30 September 2013) Access to Data and Information is the Key to the Successful of Timber Trade Agreement between Indonesia – European Union.

http://info.jpik.or.id/wp-content/uploads/2013/09/JPIK-Final-Press-Release-30-September-2013_English-Version.pdf / Akses Data dan Informasi Sangat Vital Dalam Perjanjian Perdagangan Kayu Indonesia-EU.

<http://info.jpik.or.id/wp-content/uploads/2013/09/JPIK-Final-Press-Release-30-September-2013.pdf>

¹⁷ Eyes on the Forest (27 September 2013) APP, APRIL suppliers named suspects of fires.

<http://eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=671>

¹⁸ Eyes on the Forest (24 October 2013) ‘Companies setting fires may link to money laundry probe’.

<http://eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=673>

¹⁹ Eyes on the Forest (27 June 2013) Fires, smoke and haze – new in EoF’s online database.

<http://eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=646>

²⁰ Eyes on the Forest (10 July 2013) Checking fires on the ground – photos published in EoF’s online database.

<http://eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=652>

²¹ We calculated the total area size of “cleared area with some vegetation”, “oil palm plantation” and “other no-natural forest covers” in WWF Indonesia’s 2012 land cover map.

²² Ministry of Forestry (2012)

²³ IUPHHK-HT licenses issued by either Azmun Jafar or Arwin A.S are against technical guidelines on utilizing forest product of plantation based on the Minister of Forestry Decree Number 10.1/Kpts-II/2000 Concerning to Guidelines on Granting License for Utilizing Forest Product of Timber Plantation Enterprise and the Minister of Forestry Decree number 21/Kpts-II/2001 on Criteria and Standard for License of Utilizing Forest Product of Timber Plantation on Production Forest.

²⁴ Anti Forest-Mafia Coalition of NGOs (4 May 2012a) Joint Press Release: APP & APRIL products linked to corruption – none of the companies related with corruption and bribery brought to court. Anti Forest-Mafia Coalition of NGOs (4 May 2012b) APP, APRIL and Corruption –Buyers Beware!

http://www.eyesontheforest.or.id/attach/KLAKH%20%2804May12%29%20Factsheet%20APP%20APRIL%20and%20Corruption_FINAL_20120525080524.pdf

²⁵ The Jakarta Post (2 October 2012) Islands in focus: 6 years sought for former Kampar regent.

<http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/02/6-years-sought-former-kampar-regent.html>

²⁶ Eyes on the Forest (23 August 2013) Judges have no guts against corruption on Burhanuddin Husin’s verdict.

<http://eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=665>

²⁷ Eyes on the Forest (11 November 2013) Riau Governor tried for issuing permits to pulp suppliers.

<http://eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=675>

²⁸ The Jakarta Globe (21 November 2013) Riau Governor’s Graft Trial to Continue After Judges Reject Objections.

<http://www.thejakartaglobe.com/news/riau-governors-graft-trial-to-continue-after-judges-reject-objections/>

³¹ The Jakarta Globe (16 May 2011a) Special Report: How a \$115b Illegal Logging Probe Was Felled.

<http://www.thejakartaglobe.com/archive/special-report-how-a-115b-illegal-logging-probe-was-felled/441679/> The Jakarta Globe (16 May 2011b) A Timeline of the Riau Investigation.

<http://www.thejakartaglobe.com/archive/a-timeline-of-the-riau-investigation/441823/>

³² TEMPO (16-22 April 2012) Going After the Big 14.

³³ Eyes on the Forest (27 July 2005) WWF, Walhi, Jikalahari: “Logging Moratorium for Companies with Questionable Industrial Timber Plantation Licenses.” <http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=82>

³⁴ Koalisi Anti Mafia Kehutanan (4 February 2010) KPK Harus Bongkar Praktik Mafia Kehutanan.

<http://www.silvagama.org/sites/default/files/KPK%20harus%20berantas%20korupsi%20kehutanan.pdf>

- ³⁵ Hukum online.com (5 December 2013) Penegakan Hukum Sektor Kehutanan Masih Bermasalah. Korupsi di sektor kehutanan harus diberantas siapapun pelakunya, termasuk korporasi.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a05ae5c66bc/penegakan-hukum-sektor-kehutanan-masih-bermasalah>
- ³⁶ WWF Indonesia (5 December 2013) Tindak Pidana Bagi Korporasi Pelaku Kejahatan di Sektor Kehutanan.
<http://www.wwf.or.id/?30263/Tindak-Pidana-Bagi-Korporasi-Pelaku-Kejahatan-di-Sektor-Kehutanan>
- ³⁷ <http://www.transtrapermada.co.id/editor/images/dokumen/HASIL%20PHPL/Sert.Austral%20Byna.pdf>
- ³⁸ Forest Watch Indonesia (2011) Potret Kadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000 – 2009.
http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2013/02/PHKI_2000-2009_FWI_low-res.pdf
- ³⁹ http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/kehutanan/sertifikatPHPL_ptSuryaHutaniJaya_2010_0.pdf
- ⁴⁰ 15 perusahaan yang dimaksud adalah: PT. Telen Prima Sawit, PT. Synergy Resources Indonesia, PT. Sawit Kaltim Lestari, Koperasi Karya Bersama Kerajaan, Koperasi Perkebunan Sawit Sendowan, PT. Hamparan Sentosa, PT. Khaleda Agroprima Malindo, PT. Malaya Sawit Khatulistiwa, PT. Muara Kaman Sawit Sejahtera 1, PT. Sawit Khatulistiwa Plantation, PT Agri East Borneo Kencana, PT Bakacak Himba Bahari, PT Anugrah Urea Sakti, PT Teguh Jaya Prima Sakti dan PT Sawit Prima Sakti.
- ⁴¹ http://www.trustindo.net/data/pengumuman/pt-surya-hutani-jaya_phpl-iuphhk-ht_hasil_23-29-september-2013.pdf
- ⁴² http://www.dephut.go.id/uploads/apl/HasilAuditPHPL_PT_Puji_Sempurna_Raharja_.pdf
- ⁴³ http://www.nbm-unb.com/2012.05.24_Hasil%20Audit%20PHPL_PT.%20Puji%20Sempurna%20Raharja_Kaltim.pdf
- ⁴⁴ Surat No.017/Dirut/PSR/VII/2007 dated 30 July 2007
- ⁴⁵ SK Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. S.728/VI-BPHA/2009 tanggal 16 Juli 2009.
- ⁴⁶ Kementerian Kehutanan melalui SK Direktur Bina Usaha Hutan Alam No. S.1018/BUHA-I/2011 dated 3 November 2011.
- ⁴⁷ SK Direktur Bina Usaha Hutan Alam No. S.24/BUHA-4/2012 tanggal 9 Januari 2012 disampaikan pada Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Samarinda.
- ⁴⁸ Surat Keputusan Sertifikasi No. 20/DIRSERTF/II/2012 tertanggal 4 Februari 2012.
- ⁴⁹ <http://www.nbm-unb.com/klien.html>
- ⁵⁰ <http://sisni.bsn.go.id/index.php/?lombsert/inspeksi/detail/7980>
- ⁵¹ http://www.dephut.go.id/uploads/apl/4c_PT_.Suntara_Gajapati_TUV_.pdf
- ⁵² Riaupos.co (4 Juli 2012) Polisi Selidiki Kematian Supratmin di Kanal PT SGP.
<http://www.riapos.co/cetak.php?act=full&id=1820&kat=12>
- ⁵³ Metroterkini.com (5 Juli 2012) KT BahulaMinta Polis UsutPembunuhan Supratmin.
<http://www.metroterkini.com/read-2897-kt-bahula-minta-polis-usut-pembunuhan-supratmin.html>
- ⁵⁴ Eyes on the Forest (6 Juli 2012) APRIL concessions protested by communities, one dies at APP site.
<http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=559>
- ⁵⁵ Tribun Pekanbaru (5 Desember 2012) Polda Gelar Perkara Supratmin.
<http://pekanbaru.tribunnews.com/2012/12/05/polda-gelar-perkara-supratmin>
- ⁵⁶ Eyes on the Forest (11 September 2012) Human Rights body: farmer's death in APP's concession questionable.
<http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=569>
- ⁵⁷ Rekrim Dumai (26 September 2012) Polisi Bongkar Makam Supratmin. <http://reskrimdumai.dhcp.biz/?paged=6>
- ⁵⁸ http://www.dephut.go.id/uploads/files/HasilAuditPHPLSumateraRiangLestari_062011.pdf
- ⁵⁹ Halloriau.com (19 November 2011) Rupat Bergejolak, 5 Unit Eskavator PT SRL Dibakar.
<http://www.halloriau.com/read-hukrim-17172-2011-11-19-rupat-bergejolak-5-unit-eskavator-pt-srl-dibakar.html>
- ⁶⁰ Antarariau.com (18 November 2011) Polda Selidiki Insiden Pulau Rupat.
<http://www.antarariau.com/berita/16584/polda-selidiki-insiden-pulau-rupat.html>
- ⁶¹ PT. Sarbi International Certification (12 May 2011) Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). <http://ebookbrowse.com/pt-sumatera-rl-sarbi-pdf-d152745911>
- ⁶² Walhi (31 May 2011) PT.Sumatera Riang Lestari Terbukti Melakukan Praktek Buruk Dalam Operasi HTI-Nya.
<http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/siaran-pers/915-pt-sumatera-riang-lestari-terbukti-melakukan-praktek-buruk-dalam-operasi-ht>

[i-nya-.html](#)

⁶³ PT. Sarbi International Certification (13 June 2011) Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). http://www.dephut.go.id/files/HasilAuditPHPLSumateraRiangLestari_062011.pdf

⁶⁴ Hasyim, Z. & H. Setiawan (2011) Pengalaman Pemantauan Sertifikasi PK-PHPL dalam Skema SVLK untuk PT Sumatera Riag Lestari di Provinsi Riau. <http://www.slideshare.net/ZainuriHasyim/pengalaman-pemantauan-pt-srl-riau-final>

⁶⁵ WBH (22 February 2013) 7 Dosa Besar yang dilakukan PT.WKS terhadap Petani Jambi. http://www.wbh.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=183:7-dosa-besar-yang-dilakukan-ptwks-terhadap-petani-jambi&catid=42:media-lain&Itemid=53

⁶⁶ Eyes on the Forest (11 November 2010) Farmer shot to death at rally protesting APP's supplier. <http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=305>

⁶⁷ Okezone.com (8 July 2013) Wira Karya Sakti Akhiri Konflik Lahan di Jambi. <http://economy.okezone.com/read/2013/07/08/320/833893/redirect>

⁶⁸ KKI Warsi website <http://warsi.or.id/> see for example Catatan Akhir Tahun 2010 KKI WARSI – Jambi Satu Kesatuan Ekosistem yang Terkoyak Multi Kepentingan, Desember 2010.

⁶⁹ Eyes on the Forest (2 July 2009) APP logging road threatens Orang Rimba. <http://www.eyesontheforest.or.id/index.php?page=news&action=view&id=235>

⁷⁰ WWF-Indonesia (13 December 2010) Once-Untouched Haven for Tigers, Orangutans, Elephants Being Systematically Targeted by APP/SMG. <http://www.wwf.or.id/en/?21160/Once-Untouched-Haven-for-Tigers-Orangutans-El%20ephants-Being-Systematically-Targeted-by-APP/SMG>